



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019



LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN
2019**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

LKjIP Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen laporan yang menggambarkan capaian yang diperoleh dalam menjalankan program kegiatan pokok sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan melalui dokumen RPJMD 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian program dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat regional dan nasional secara keseluruhan.

LKjIP Kabupaten Banjar Tahun 2019 ini merupakan laporan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Terdapat berbagai kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan, namun juga tidak seluruh harapan yang diinginkan melalui target pembangunan daerah dapat dicapai.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjar agar lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja pembangunan Kabupaten Banjar bagi Pemerintah di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Martapura, Maret 2020

Bupati Banjar,



H. KHALILURRAHMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banjar, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Prioritas Daerah Kabupaten Banjar.....	3
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah	3
1.4.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar	10
1.4.3. Rencana Strategis.....	15
1.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar	19
1.4.5. Masalah Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar.....	21
1.4.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2019	30
1.5. Sistematisasi Penyusunan LkjIP Kabupaten Banjar	32
BAB 2	33
PERENCANAAN KINERJA	33
2.1. Perjanjian Kinerja Pembangunan Tahun 2019	33
2.2. Rencana Anggaran Masing-masing Tujuan/sasaran Tahun 2019	34
BAB 3	36
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH	36
KABUPATEN BANJAR	36
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2019	37
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	38
3.2.1. Indikator Kinerja Utama Angka kriminalitas	39
3.2.2. Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	48

3.2.3.	Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk	78
3.2.4.	Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka	82
3.2.5.	Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin	87
3.2.6.	Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana.....	95
3.2.7.	Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi	101
3.2.8.	Indikator Kinerja Utama Indeks Gini.....	108
3.2.9.	Indikator Kinerja Utama Laju Inflasi.....	116
3.2.10.	Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	151
3.2.11.	Indikator Kinerja Utama Persentase Konektivitas	157
3.2.12.	Indikator Kinerja Utama Persentase Pemukiman Layak Huni	160
3.2.13.	Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi	167
3.3.	Realisasi Anggaran.....	201
BAB 4	205
PENUTUP	205
LAMPIRAN	209

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan.....	4
Tabel 1. 2.	Penduduk Kabupaten Banjar Per Kecamatan Tahun 2014-2018	7
Tabel 1. 3.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, Tahun 2018.....	8
Tabel 1. 4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin	14
Tabel 1. 5.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Jabatan	14
Tabel 1. 6.	Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 1. 7.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar.....	20
Tabel 1. 8.	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2019	30
Tabel 2. 1.	Perjanjian Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2019	33
Tabel 2. 2.	Rencana Anggaran Per Tujuan/sasaran Tahun 2019	34
Tabel 3. 1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	36
Tabel 3. 2.	Pencapaian IKU Tahun 2019	37
Tabel 3. 3.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Kriminalitas	39
Tabel 3. 4.	Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan	40
Tabel 3. 5.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	41
Tabel 3. 6.	Penjabaran Pencapaian Target Dan Realisasi Sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat Tahun 2019.....	46
Tabel 3. 7.	Trand Jenis Pelanggaran.....	47
Tabel 3. 8.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia.....	49
Tabel 3. 9.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran	60
Tabel 3. 10.	Daftar Budaya Benda di Kabupaten Banjar	65
Tabel 3. 11.	Daftar Unsur Budaya Tak Benda	67
Tabel 3. 12.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk	79
Tabel 3. 13.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka	82
Tabel 3. 14.	Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Banjar, Tahun 2014-2018.....	84

Tabel 3. 15. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	85
Tabel 3. 16. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial	88
Tabel 3. 17. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	91
Tabel 3. 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana	96
Tabel 3. 19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana	97
Tabel 3. 20. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana dengan Provinsi Kalimantan Selatan Dan Kabupaten/Kota Tetangga	98
Tabel 3. 21. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	99
Tabel 3. 22. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	100
Tabel 3. 23. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi	102
Tabel 3. 24. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)	102
Tabel 3. 25. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Gini	108
Tabel 3. 26. Distribusi Pendapatan Per Kapita Menurut Kriteria World Bank dan Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Tahun 2018 (Persen)	113
Tabel 3. 27. Pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan 40% terbawah	114
Tabel 3. 28. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Laju Inflasi.....	116
Tabel 3. 29. Laju Inflasi Kota Banjarmasin menurut Kelompok Komoditi, Tahun 2014–2018 (Persen)	119
Tabel 3. 30. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	121
Tabel 3. 31. Kontribusi Per Sub kategori Perdagangan Terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)	137
Tabel 3. 32. Kontribusi Per Sub kategori Perdagangan Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan.....	138
Tabel 3. 33. Kontribusi Per Subkategori Industri terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)	140

Tabel 3. 34. Kontribusi Per Subkategori Terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)	146
Tabel 3. 35. Kontribusi Per Subkategori terhadap PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)	148
Tabel 3. 36. Angka Pengunjung Wisata.....	149
Tabel 3. 37. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	152
Tabel 3. 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tahun sebelumnya	152
Tabel 3. 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja sasaran.....	153
Tabel 3. 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	155
Tabel 3. 41. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Konektivitas	158
Tabel 3. 42. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran	158
Tabel 3. 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	159
Tabel 3. 44. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Permukiman Layak Huni.....	161
Tabel 3. 45. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	162
Tabel 3. 46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	163
Tabel 3. 47. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi.....	168
Tabel 3. 48. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	169
Tabel 3. 49. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran	170
Tabel 3. 50. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran	172
Tabel 3. 51. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	173
Tabel 3. 52. Realisasi Kinerja Tahun 2019	174
Tabel 3. 53. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 dan Target Provinsi.....	176
Tabel 3. 54. Komponen penilaian SAKIP.....	177
Tabel 3. 55. Rincian Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Banjar.....	178
Tabel 3. 56. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Tahun 2019	181
Tabel 3. 57. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	183



Tabel 3. 58. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	186
Tabel 3. 59. Realisasi Indikator Tahun 2019	194
Tabel 3. 60. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019	196
Tabel 3. 61. Pencapaian Anggaran	202
Tabel 3. 62. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	204

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2018.....	7
Gambar 1. 2.	Piramida Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2018.....	10
Gambar 3. 1.	Tingkat Capaian IKU Tahun 2019	38
Gambar 3. 2.	Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota Lain Tahun 2019	40
Gambar 3. 3.	Trand kenaikan dan penurunan jumlah kasus pelanggaran terhadap produk hukum daerah setiap tahun.....	47
Gambar 3. 4.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019	50
Gambar 3. 5.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 -2019	50
Gambar 3. 6.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019.....	52
Gambar 3. 7.	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019	53
Gambar 3. 8.	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 -2019.....	53
Gambar 3. 9.	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.....	54
Gambar 3. 10.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019.....	54
Gambar 3. 11.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	55
Gambar 3. 12.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019	55
Gambar 3. 13.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019	56
Gambar 3. 14.	Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	56

Gambar 3. 15.	Perbandingan Rata rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019	57
Gambar 3. 16.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019	58
Gambar 3. 17.	Perbandingan Pengeluaran Per kapita Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	58
Gambar 3. 18.	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019	59
Gambar 3. 19.	Perkembangan Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan Tahun 2016 -2018.....	63
Gambar 3. 20.	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019	69
Gambar 3. 21.	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 -2019.....	70
Gambar 3. 22.	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.....	70
Gambar 3. 23.	Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2015 -2019	74
Gambar 3. 24.	Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2015 -2019.....	80
Gambar 3. 25.	Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019.....	80
Gambar 3. 26.	TPT dan Kesempatan Kerja Kabupaten Banjar, Tahun 2014-2018 (Persen)	83
Gambar 3. 27.	Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019	89
Gambar 3. 28.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2019	89
Gambar 3. 29.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.....	90
Gambar 3. 30.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran	93
Gambar 3. 31.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2018.....	93
Gambar 3. 32.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2018.....	94

Gambar 3. 33. Perbandingan Indeks Risiko Bencana dari Tahun 2016 s/d 2019.....	97
Gambar 3. 34. Grafik perbandingan Indeks Risiko Bencana Antar Kabupaten Banjar dengan Prov. Kalsel dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019.....	98
Gambar 3. 35. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar, 2018 (Persen)	104
Gambar 3. 36. Pengeluaran Riil Perkapita Pertahun Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan, 2014 - 2018 (000 rupiah)	106
Gambar 3. 37. Kurva Lorenz.....	109
Gambar 3. 38. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2018	110
Gambar 3. 39. Perkembangan Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar, 2014-2018.....	111
Gambar 3. 40. Distribusi Pendapatan Per kapita Kabupaten Banjar Menurut Kriteria World Bank, Tahun 2014-2018 (Persen)	112
Gambar 3. 41. Perkembangan Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, Tahun 2014-2018 (Persen)	114
Gambar 3. 42. Kumulatif Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2018 (Persen)	117
Gambar 3. 43. Inflasi Bulanan Kota Banjarmasin dan Indonesia Tahun 2018 (Persen).....	118
Gambar 3. 44. Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar pertumbuhan sub sektor tanaman pangan.....	126
Gambar 3. 45. Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan	127
Gambar 3. 46. Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	131
Gambar 3. 47. Kegiatan untuk mendukung mencapai sasaran Strategis meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	133
Gambar 3. 48. Kegiatan Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM.....	135
Gambar 3. 49. Kegiatan pelatihan kewirausahaan	135
Gambar 3. 50. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)	138
Gambar 3. 51. Pertumbuhan Tiga Besar Sub kategori Industri Pengolahan, 2016-2018 dan Perkiraan 2019	141

Gambar 3. 52. Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019	148
Gambar 3. 53. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2017 s/d 2019	153
Gambar 3. 54. Perbandingan realisasi dan capaian IKA, IKU, dan Tutupan Lahan Tahun 2017 s/d 2019	154
Gambar 3. 55. Asistensi Hasil Evaluasi SAKIP dengan KEMENPAN-RB	180
Gambar 3. 56. SAKIP Award 2019	180
Gambar 3. 57. Nilai Rata-Rata Unsur 9 Pelayanan	191
Gambar 3. 58. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Banjar Tahun 2017 – 2019	194

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Teknis penyusunan pelaporan kinerja diatur lebih lanjut melalui Permenpan nomor 53 Tahun 2014.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator tujuan yang juga merupakan indikator kinerja utama Kabupaten, dalam tataran pelaksanaannya indikator tersebut menjadi tanggung jawab dari

masing-masing SKPD sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi yang diemban.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Laporan LKjIP tahun 2019 yang disusun saat ini merupakan laporan pelaksanaan tahun ke empat dari periode RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021, nantinya akan digambarkan sejauh mana pencapaian indikator-indikator dari sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar, dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kabupaten Banjar dalam mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banjar, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Prioritas Daerah Kabupaten Banjar

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1.1. Letak Wilayah

Secara astronomi, Kabupaten Banjar terletak antara $2^{\circ} 49' 55''$ - $3^{\circ} 43' 38''$ pada garis Lintang Selatan dan $114^{\circ} 30' 20''$ hingga $115^{\circ} 35' 37''$ pada Bujur Timur. Secara geografis,

Kabupaten Banjar berada pada posisi yang strategis, yaitu berada di perlintasan antara Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan :

- a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara,
- b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur,
- c. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan;
- d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

1.4.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Banjar memiliki luas sebesar 4.668,50 Km² yang merupakan daerah dengan wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan serta 13 kelurahan dan 277 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Lebih rinci luas kecamatan di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1. Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Aluh-Aluh	82,48	1,77
2.	Beruntung Baru	61,42	1,32
3.	Gambut	129,30	2,77
4.	Kertak Hanyar	45,83	0,98
5.	Tatah Makmur	35,47	0,76
6.	Sungai Tabuk	147,30	3,16
7.	Martapura	42,03	0,90
8.	Martapura Timur	29,99	0,64
9.	Martapura Barat	149,38	3,20
10.	Astambul	216,50	4,64
11.	Karang Intan	215,35	4,61
12.	Aranio	1.166,35	24,98
13.	Sungai Pinang	458,65	9,82

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
14.	Paramasan	560,85	12,01
15.	Pengaron	433,25	9,28
16.	Sambung Makmur	134,65	2,88
17.	Mataraman	148,40	3,18
18.	Simpang Empat	141,10	3,02
19.	Telaga Bauntung	158,00	3,38
20.	Cintapuri Darussalam	312,20	6,69
Jumlah		4.668,50	100,00

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2019

1.4.1.3. Topografi

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % persen bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir. Sisanya 5,39 persen bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 persen, dan 30-60 hanya 14,83 persen.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai tanah; Tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57 persen dari luas wilayah. Tanah Aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 persen. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29 persen. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84 persen. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 persen.

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka di Kabupaten Banjar juga hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga

mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober - November.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Banjar tahun 2019 berkisar antara 35,1°C – 21,7°C, dengan suhu tertinggi 37,1°C terjadi di bulan Oktober 2019 dan suhu terendah 33,6°C terjadi pada bulan Januari 2019. Sebagai daerah tropis, kelembaban udara di Kabupaten Banjar relatif tinggi dengan rata-rata 71,3 persen (berkisar 44,4% sampai 96,8%). Kelembaban maksimum terjadi pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Oktober dan Desember sedangkan kelembaban minimum terjadi di Bulan September.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2019 tercatat mencapai 1.766.0 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Juli (4 mm) dan tertinggi pada bulan April (372 mm). Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari yaitu sebanyak 17 hari.

1.4.1.4. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Banjar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 550.264 jiwa yang terdiri dari 278.943 jiwa penduduk laki-laki dan 271.321 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Banjar 2010-2018 sebesar 1,63 persen.

Pada tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi yaitu Kecamatan Paramasan 2,82 Persen, Simpang Empat 2,60 Persen, Sambung Makmur 2,09 Persen, Aranio 1,92 Persen, Martapura 1,87 Persen, dan Kertak Hanyar 1,84 Persen. Sedangkan kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan Cintapuri Darussalam yang mencapai 0,19 Persen per tahun.

Gambar 1. 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar,
Tahun 2018

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

3.1 KEPENDUDUKAN/POPULATION

Tabel 3.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, 2010 dan 2018
Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Sub District in Banjar Regency, 2010 and 2018

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010 ¹	2010 ²	2018 ²	2009-2010	2010-2018 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aluh-Aluh	27 285	27 086	30 815	0,68	1,61
2. Beruntung Baru	13 181	13 161	14 742	0,11	1,42
3. Gambut	35 956	36 089	41 398	2,89	1,72
4. Kertak Hanyar	38 909	39 056	45 242	4,04	1,84
5. Tatah Makmur	10 974	11 052	12 638	1,24	1,68
6. Sungai Tabuk	56 869	56 734	63 863	2,70	1,48
7. Martapura	101 482	101 491	117 898	3,76	1,87
8. Martapura Timur	29 200	29 153	32 516	1,76	1,36
9. Martapura Barat	16 972	17 060	18 764	1,02	1,19
10. Astambul	33 009	33 082	36 720	0,42	1,30
11. Karang Intan	30 679	30 986	34 849	1,57	1,47
12. Aranio	8 246	8 212	9 578	2,01	1,92
13. Sungai Pinang	14 511	14 765	16 990	1,37	1,75
14. Paramasan	4 214	4 340	5 438	2,65	2,82
15. Pengaron	15 764	16 035	17 871	1,20	1,36
16. Sambung Makmur	10 562	11 266	13 315	2,68	2,09
17. Mataraman	23 662	23 708	26 282	1,17	1,29
18. Simpang Empat	32 252	32 686	26 819	0,85	2,60
19. Telaga Bauntung	3 112	3 129	3 538	0,84	1,54
20. Cintapuri Darussalam	---	---	10 750	---	-0,19
Kabupaten Banjar	506 839	509 091	580 026	2,11	1,63

Sumber Kabupaten Banjar Dalam Angka 2019

Tabel 1. 2. Penduduk Kabupaten Banjar Per Kecamatan Tahun
2015-2019

KECAMATAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aluh-Aluh	29.464,00	29.917,00	30.370,00	30.815,00	28.592,00
Beruntung Baru	14.185,00	14.375,00	14.559,00	14.742,00	14.813,00
Gambut	39.414,00	40.076,00	40.736,00	41.398,00	41.513,00
Kertak Hanyar	43.022,00	43.770,00	44.509,00	45.242,00	39.120,00
Tatah Makmur	12.052,00	12.248,00	12.442,00	12.638,00	12.380,00
Sungai Tabuk	61.358,00	62.208,00	63.041,00	63.863,00	59.710,00
Martapura	111.692,00	113.762,00	115.828,00	117.898,00	117.325,00
Martapura Timur	31.307,00	31.713,00	32.115,00	32.516,00	29.499,00
Martapura Barat	18.170,00	18.373,00	18.570,00	18.764,00	19.019,00
Astambul	35.534,00	35.940,00	36.334,00	36.720,00	35.313,00

KECAMATAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Karang Intan	33.516,00	33.972,00	34.415,00	34.849,00	35.064,00
Aranio	9.074,00	9.241,00	9.410,00	9.578,00	9.305,00
Sungai Pinang	16.206,00	16.473,00	16.734,00	16.990,00	14.275,00
Paramasan	5.001,00	5.145,00	5.289,00	5.438,00	3.708,00
Pengaron	17.251,00	17.463,00	17.668,00	17.871,00	16.251,00
Sambung Makmur	12.567,00	12.819,00	13.068,00	13.315,00	11.388,00
Mataraman	25.397,00	25.700,00	25.994,00	26.282,00	25.715,00
Simpang Empat	35.839,00	36.424,00	37.000,00	26.819,00	22.987,00
Telaga Bauntung	3.394,00	3.443,00	3.910,00	3.538,00	3.261,00
Cintapuri Darussalam	-	-	-	10.750,00	11.026,00
JUMLAH	554.443,00	563.062,00	571.573,00	580.026,00	550.264,00

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2019

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2019 mencapai 118 jiwa per Km², sedangkan di tingkat kecamatan, yang paling tinggi ada di Kecamatan Martapura sebesar 2.791 jiwa per Km², disusul Martapura Timur 984 jiwa per Km² dan Kertak Hanyar yang mencapai 854 jiwa per Km². Tingginya tingkat area pusat ibu kota dan menjadi bisnis roda perekonomian. Adapun wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Aranio yang mencapai 8 jiwa per Km², Kecamatan Paramasan 7 jiwa per Km² dan Kecamatan Telaga Bauntung yang hanya 21 orang per Km²

Tabel 1. 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, Tahun 2019

Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Aluh-Aluh	82,48	28.592	347
Beruntung Baru	61,42	14.813	241
Gambut	129,30	41.513	321
Kertak Hanyar	45,83	39.120	854
Tatah Makmur	35,47	12.380	349
Sungai Tabuk	147,3	59.710	405
Martapura	42,03	117.325	2791
Martapura Timur	29,99	29.499	984

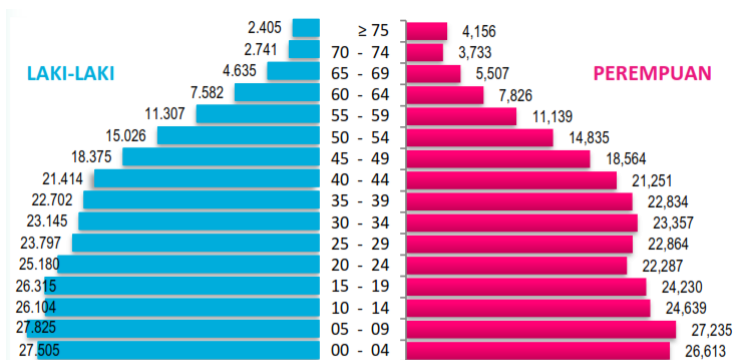
Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Martapura Barat	149,38	19.019	127
Astambul	216,50	35.313	163
Karang Intan	215,35	35.064	163
Aranio	1.166,35	9.305	8
Sungai Pinang	458,65	14.275	31
Paramasan	560,85	3.708	7
Pengaron	433,25	16.251	38
Sambung Makmur	134,65	11.388	85
Mataraman	148,40	25.715	173
Simpang Empat	141,10	22.987	163
Telaga Bauntung	158,00	3.261	21
Cintapuri Darussalam	312,20	11.026	35
JUMLAH	4668,50	550.264	118

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2020

Salah satu penyebab belum meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Banjar dilatarbelakangi oleh letak geografis yang cukup sulit di beberapa daerah, misalnya di Kecamatan Aranio, Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Paramasan, dengan medan yang cukup sulit, transportasi yang sulit dan fasilitas yang kurang memadai menyebabkan penduduk sulit berkembang dan sebagian memilih migrasi keluar untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Berdasarkan hasil proyeksi SP 2010, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2018 berbentuk piramida yang mengecil ke atas, artinya secara struktur umur penduduk di Kabupaten Banjar sudah cukup baik karena jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan non produktif, hal ini merupakan aset besar dalam pembangunan jika mampu dibina dengan baik.

Gambar 1. 2. Piramida Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2018



Sumber : BPS Kab Banjar, Proyeksi SP2010

Hal yang cukup menarik dari komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tabel diatas adalah di rentang usia 0-64 tahun yang merupakan usia muda sampai dengan usia produktif nampak bahwa penduduk laki-laki mempunyai jumlah yang lebih besar dibanding perempuan (kecuali pada kelompok umur 30-34 tahun). Namun pada kelompok umur tua 64 tahun ke atas terlihat bahwa semakin bertambahnya umur semakin didominasi oleh penduduk perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan lebih dapat bertahan hidup hingga usia tua dibanding laki-laki.

1.4.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar

1.4.2.1. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Kabupaten Banjar merupakan salah satu dari pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. kewenangan Kabupaten Banjar sebagai daerah otonom mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan tersebut terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 5 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib pelayanan dasar terdiri :
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 6. Sosial
- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari :
 1. Tenaga Kerja
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 3. Pangan
 4. Pertanahan
 5. Lingkungan Hidup
 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi & Informatika
 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 12. Penanaman Modal
 13. Kepemudaan dan Olah Raga
 14. Statistik
 15. Kebudayaan
 16. Perpustakaan
 17. Kearsipan
- c. Urusan Pilihan terdiri dari :
 1. Kelautan dan Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Pertanian
 4. Perdagangan
 5. Perindustrian
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari :
 1. Administrasi Pemerintahan
 2. Pengawasan

3. Perencanaan
4. Keuangan;
5. Kepegawaian

1.4.2.2. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Banjar yang lebih sejahtera. Visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 adalah Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing tahun 2025. Sedangkan visi Bupati Banjar Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah.

1.4.2.3. Struktur Organisasi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Perangkat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Pemukiman

8. Dinas Pertanahan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
20. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Pemuda dan Olah Raga
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
26. Dinas Peternakan dan Perkebunan
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Kecamatan Sebanyak 20 Buah
33. Staf Ahli Sebanyak 3 Bidang
34. Tugas pembantuan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang menjadi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.2.4. Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Banjar merupakan satu dari tiga belas Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 1959, pada

periode 2016-2021 ini Kabupaten Banjar dipimpin oleh Bupati KH. Khalilurrahman didampingi Wakil bupati H. Saidi Mansyur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar didukung oleh aparatur pemerintah dengan jumlah 6591 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 2785 dan perempuan sebanyak 3806 orang Pegawai tersebut tersebar di perangkat daerah, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin

Dinas/Instansi Pemerintah		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat Daerah	71	47	118
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar	20	17	37
3.	Dinas-Dinas Daerah	498	420	918
4.	Lembaga Teknis Daerah	369	436	805
5.	Pemerintah Kecamatan	244	49	293
6.	Pemerintah Kelurahan	50	67	117
7.	UPT Pendidikan/ Cabang Dinas Pendidikan	54	56	110
8.	UPT Dinas Kesehatan	203	551	754
9.	Puskesmas Desa/ Pembantu	1	77	78
10.	Pendidikan TK/SD/MI	975	1563	2538
11.	SMP/SLTP/MTS	298	520	818
12.	Perbantuan Daerah	2	2	4
13.	Unit Kerja Lain	0	1	1
Jumlah		2785	3806	6591

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar

Dari jumlah pegawai tersebut bila dilihat dari golongan kepangkatan, maka dapat diketahui jumlah terbanyak ada pada golongan III disusul golongan IV khususnya golongan IVa yang berasal dari fungsional tertentu, sebagaimana berikut :

Tabel 1. 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Jabatan

Golongan Kepangkatan	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
I/A (Juru Muda)	-	-	1	1
I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	10	10
I/C (Juru)	-	-	20	20

Golongan Kepangkatan	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
I/D (Juru Tingkat I)	-	1	42	43
Golongan I/ Range I	-	1	73	74
II/A (Pengatur Muda)	-	13	51	64
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	-	147	99	246
II/C (Pengatur)	-	212	195	407
II/D (Pengatur Tingkat I)	-	130	147	277
Golongan II/ Range II	-	502	492	994
III/A (Penata Muda)	11	658	306	975
III/B (Penata Muda Tingkat I)	44	753	242	1.039
III/C (Penata)	193	556	101	850
III/D (Penata Tingkat I)	363	544	94	1.001
Golongan III/ Range III	611	2.511	743	3.865
IV/A (Pembina)	182	997	13	1.192
IV /B (Pembina Tingkat I)	59	357	8	424
IV /C (Pembina Utama Muda)	29	12	0	41
IV /D (Pembina Utama Madya)	1	0	0	1
Golongan IV/ Range IV	271	1.366	21	1.658
Jumlah/ Total	882	4.380	1.329	6.591

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar

1.4.3. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa unsur yang dilakukan penilaian diantaranya adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Unsur perencanaan pada LKjIP Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. RPJMD dokumen merupakan perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sekali yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

1. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Banjar

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ditetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah".

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Banjar, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021 yaitu adalah :

Misi 1 "Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama". Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Misi 2 "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial". Misi ini tentang Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 3 "Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan". Misi ini tentang Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan

produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik

Misi 4 “Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah”. Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah”. Misi ini tentang bagaimana upaya pemerintah dalam Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dari kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dimana setiap tujuan dan sasaran strategis

tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan misi tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada. Tujuan dan sasaran strategis dari kelima misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6. Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Pelestarian budaya keagamaan
		Pemberdayaan lembaga keagamaan
		Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat
		Meningkatnya pelestarian budaya
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Mantapnya ketahanan pangan daerah
		Meningkatnya kesehatan reproduksi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga
		Menurunnya tingkat pengangguran
	Membbaiknya hubungan industrial	
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial
Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif		
Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif	
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatnya kontribusi

Misi	Tujuan	Sasaran
pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri	Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah	sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya nilai investasi	
Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan LH dan SDA
	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah	Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya ketersediaan ruang dan bangunan
		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal
		Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah		

Sumber : Buku Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2019

1.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia

diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah, Secara khusus IKU ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. 7. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan
1.	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas	Skor
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks
3.	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Persen
4.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
5.	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	Persen
6.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks
7.	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen
8.	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Gini	Indeks
9.	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi	Persen
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks
11.	Meningkatnya konektivitas antar	Persentase	Persen

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan
	wilayah	konektivitas	
12.	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	Persen
13.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks

Sumber : Buku Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2019

1.4.5. Masalah Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar

Permasalahan Utama pembangunan di Kabupaten Banjar yang teridentifikasi dalam setiap urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Rendahnya kuantitas sekolah PAUD di kecamatan
 - b. Kurangnya pembangunan sekolah pada wilayah terpencil
 - c. Transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil belum memadai
 - d. Buruknya fasilitas Pendidikan
 - e. Rendahnya pembangunan sekolah inklusi
 - f. Kurangnya bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket
 - g. Rendahnya kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP
 - h. Kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan non-guru yang membantu kegiatan administratif Pendidikan
 - i. Masih rendahnya pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses KBM yang efektif
 - j. Kurangnya muatan keagamaan di PAUD
 - k. Kurangnya penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-qur'an
 - l. Kurangnya pemberian insentif bagi guru baca tulis al-quran dan madrasah
2. Urusan Kesehatan , Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih Fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa Puskesmas sudah cukup baik dengan menggunakan perhitungan jumlah penduduk maupun ketersediaan sarana tersebut minimal tersedia di setiap kecamatan. Fasilitas kesehatan yang masih kurang adalah Puskesmas

- Pembantu dimana rasio Puskesmas Pembantu sesuai ketentuan adalah 1: 2.500, sedangkan rasio yang ada di Kabupaten Banjar adalah 1 : 8.200.
- b. Standar tenaga Puskesmas yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menetapkan 11 jenis tenaga yang perlu ada di Puskesmas meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, tenaga administrasi dan pekaya. Lokasi Puskesmas dibagi kedalam 3 kategori yaitu kawasan perkotaan, kawas pedesaan serta kawasan terpencil dan sangat terpencil. Berdasarkan jenis pelayanan Puskesmas dibagi kedalam Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap. Berdasarkan data sumber daya manusia kesehatan yang ada disandingkan dengan peraturan tersebut, secara kuantitas jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Banjar sebagian besar telah terpenuhi, kecuali untuk jenis tenaga tertentu seperti dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan tenaga administrasi. Permasalahan lainnya adalah sebaran yang belum merata antar Puskesmas dan wilayah, sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pelayanan.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum tersedianya jalan dan jembatan pada wilayah-wilayah terpencil
 - b. Belum optimalnya kontstruksi jalan dan jembatan terbangun
 - c. Upaya rehabilitasi jalan dan jembatan belum optimal
 - d. Belum optimalnya upaya tanggap darurat jalan dan jembatan
 - e. Sarana dan prasarana kebinamargaan belum memadai
 - f. Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perpipaan belum memadai
 - g. Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan belum memadai
 - h. Perlu ditingkatkannya pengelolaan air limbah individual
 - i. Belum optimalnya pengelolaan air limbah IPLT

- j. Belum optimalnya upaya pengembangan sistem drainase skala Kawasan
 - k. Belum optimalnya kualitas perencanaan tata ruang
 - l. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang
 - m. NSPK bangunan gedung belum tersedia
 - n. Belum optimalnya pengawasan bangunan Gedung
 - o. Belum optimalnya upaya pembinaan konstruksi
 - p. Kualitas penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten belum memadai
 - q. Perlu ditingkatkannya pengawasan dan penertiban penyelenggaraan konstruksi
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Minimnya akses masyarakat terhadap rumah umum, khusus, dan susun
 - b. Belum optimalnya upaya penanganan pemukiman kumuh
 - c. Belum optimalnya upaya pencegahan pemukiman kumuh
 - d. Belum optimalnya upaya penertiban pemukiman kumuh
 - e. Perlu ditingkatkannya ketersediaan jalan lingkungan skala perumahan, pemukiman, perkotaan, dan kawasan strategis
 - f. Belum optimalnya layanan penerangan jalan lingkungan
 - g. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan
 - h. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala Kawasan
 - i. Perlu ditingkatkannya pengelolaan air limbah individual
 - j. Belum optimalnya pengelolaan air limbah komunal
 - k. Belum optimalnya upaya pengembangan sistem drainase skala lingkungan
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Permasalahan yang dihadapi :
- a. Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan aparat tentang hukum
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum
 - c. Belum optimalnya cakupan patroli

- d. Belum optimalnya pembinaan kelompok masyarakat
 - e. Rendahnya pengawasan pelaksanaan Perda
 - f. Masih terbatasnya kapasitas SDM pemuda
 - g. Rendahnya kerjasama masyarakat dan aparat dalam menindak penyakit masyarakat
 - h. Fasilitas organisasi sosial politik masih belum optimal
 - i. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat
6. Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Belum optimalnya pembinaan dan penanggulangan masalah sosial
 - b. Rendahnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - c. Masih rendahnya kualitas manajemen lembaga zakat
 - d. Masih rendahnya pengawasan terhadap aparaturnya daerah
 - e. Rendahnya pemberdayaan terhadap pesantren
 - f. Perlu ditingkatkannya kesiapsiagaan terhadap bencana
 - g. Belum optimalnya pencegahan bencana
 - h. Belum optimalnya kemampuan kedaruratan
 - i. Belum optimalnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik
 - j. Belum optimalnya perencanaan penanggulangan bencana
 - k. Belum optimalnya proteksi kebakaran
7. Urusan Tenaga Kerja, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Tingginya Kurangnya pelaksanaan bursa kerja
 - b. Fasilitas penyediaan lapangan kerja belum optimal
 - c. Kurangnya keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan vokasi
 - d. Fasilitas penyelesaian sengketa hubungan industrial belum optimal
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Belum optimalnya kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi
 - b. Belum optimalnya pendampingan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - c. Belum optimalnya kelembagaan Kabupaten layak anak
9. Urusan Pangan Permasalahan yang dihadapi :

- a. Belum optimalnya pengelolaan komoditas produksi tanaman pangan
 - b. Belum optimalnya suplai pangan daerah
 - c. Belum optimalnya pengembangan diversifikasi pangan non-beras
 - d. Kurangnya sertifikasi layak konsumsi pangan dari dalam daerah
10. Urusan Pertanahan Permasalahan yang dihadapi :
- a. Belum optimalnya sistem pertanahan
 - b. Belum optimalnya penataan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pertanahan
 - c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan belum optimal
 - d. Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan belum berjalan optimal
11. Urusan Lingkungan Hidup, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan air
 - b. Semakin tingginya polusi akibat kebakaran hutan dan lahan
 - c. Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis
 - d. Belum optimalnya pengembangan luas RTH
 - e. Belum optimalnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
 - f. Tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Kurangnya Jangkauan layanan kependudukan bagi seluruh masyarakat masih belum optimal
 - b. Masih terbatasnya kapasitas aparatur pelayanan kependudukan
 - c. Sarana dan prasarana pelayanan kependudukan masih belum memadai
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Masih rendahnya perencanaan pembangunan desa
 - b. Masih rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat
 - c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- d. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan desa
 - e. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan aset desa
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Kurangnya jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon)
 - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga)
 - c. Belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi
 - d. Belum optimalnya kapasitas keluarga melalui kelompok bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15. Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan simpul jaringan perhubungan
 - b. Perlu ditingkatkannya sistem jaringan transportasi
 - c. Belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi
16. Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahan yang dihadapi:
- a. Belum optimalnya pengembangan teknologi dan informasi
 - b. Belum optimalnya transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
 - c. Belum optimal cakupan pelayanan pembangunan melalui media massa
17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi
 - b. Kurangnya kapasitas manajemen usaha koperasi
 - c. Belum optimalnya kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi
 - d. Kurangnya pengawasan dan penilaian kelembagaan koperasi
 - e. Rendahnya kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM
 - f. Kurangnya akses bantuan permodalan UKM
 - g. Rendahnya kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM
 - h. Kurangnya sarana dan prasarana pemasaran UKM

18. Urusan Penanaman Modal, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Rendahnya kondusifitas iklim investasi
 - b. Belum optimalnya promosi investasi
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - b. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Olahraga
 - c. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
20. Urusan Statistik, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum optimalnya pendokumentasian capaian pembangunan daerah
 - b. Masih rendahnya koordinasi antar instansi untuk menyusun data statistik sektoral
21. Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya masih rendah
 - b. Ketersediaan data kebudayaan masih belum optimal
 - c. Kajian sejarah lokal belum optimal
 - d. Even festival budaya yang bernuansa religi masih rendah
 - e. Partisipasi/ keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya masih rendah
 - f. Kajian warisan/cagar budaya masih rendah
 - g. Belum selarasnya pengamalan agama dengan seni dan budaya
22. Urusan Perpustakaan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Jangkauan pelayanan perpustakaan belum optimal
 - b. Kapasitas pengelola perpustakaan masih terbatas
23. Urusan kearsipan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum optimalnya kemampuan identifikasi arsip daerah yang penting
 - b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip daerah
 - c. Belum optimalnya pengelola kearsipan
24. Urusan Kelautan dan Perikanan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang belum optimal

- b. Daya saing produk hasil olahan perikanan yang belum optimal
 - c. Pengawasan dan pelestarian Sumber Daya Ikan yang belum optimal
25. Urusan Pariwisata, permasalahan yang dihadapi :
- a. Kurangnya daya tarik destinasi pariwisata
 - b. Belum optimalnya keterlibatan stakeholder pariwisata
 - c. Belum optimalnya pemasaran pariwisata
26. Urusan Pertanian, permasalahan yang dihadapi :
- a. Rendahnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan komoditas unggulan perkebunan
 - b. Kurangnya pemasaran produk dan pengolahan hasil pertanian
 - c. Kurangnya kapasitas hasil produksi peternakan
 - d. Kurangnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan tangkap
 - e. Kurangnya kapasitas pemasaran produk perikanan
27. Urusan Perdagangan, permasalahan yang dihadapi :
- a. Kurangnya standarisasi ekspor produk-produk perdagangan
 - b. Rendahnya kualitas SDM pedagang kecil dan menengah
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan
 - d. Kurangnya akses permodalan bagi pedagang
 - e. Belum optimalnya keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting
28. Urusan Perindustrian, permasalahan yang dihadapi :
- a. Belum optimalnya pengembangan sektor industri Logam, Mesin Elektronika, dan Alat Angkut (ILMEASA)
 - b. Belum optimalnya pengembangan sektor industri Kimia, Hasil Perkebunan, dan Bahan Bangunan (AGROKIM)
29. Urusan Administrasi Pemerintahan, permasalahan yang dihadapi:
- a. Belum optimalnya frekuensi hearing/dialog antara DPRD dengan masyarakat
 - b. Masih rendahnya pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
 - c. Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah
 - d. Belum optimalnya kerjasama antara daerah
 - e. Belum optimalnya fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat

30. Urusan Pengawasan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum optimalnya pencegahan korupsi
 - b. Kemudahan penyampaian pengaduan masyarakat dan efektivitas penanganannya belum berjalan optimal
 - c. Kompetensi aparatur pengawasan dan penyempurnaan sistem serta prosedur pengawasan belum optimal
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah dan desa belum optimal
31. Urusan Perencanaan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
 - b. Belum optimalnya konsistensi perencanaan daerah
 - c. Belum optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah
 - d. Belum optimalnya kualitas aparatur perencana
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan data informasi pembangunan
 - f. Belum optimalnya *updating* data pembangunan melalui SIPD
 - g. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah
32. Urusan Keuangan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih rendahnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - b. Rendahnya kepatuhan wajib pajak
 - c. Belum optimalnya akurasi data pajak daerah
 - d. Masih kurangnya penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT)
 - e. Belum optimalnya kapasitas pengawasan dan monev
 - f. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah
 - g. Rendahnya kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah
 - h. Masih kurangnya akuntabilitas laporan kinerja OPD
 - i. Belum optimalnya legalisasi aset daerah
33. Urusan Kepegawaian, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan uji kompetensi
 - c. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur

- d. Belum optimalnya kualitas kelembagaan
- e. Masih belum optimalnya penerapan punishment dan reward pegawai
- f. Pelayanan kepegawaian belum optimal

1.4.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Untuk mengantisipasi permasalahan diatas pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 menetapkan 9 prioritas pembangunan dan terdiri dari 28 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 8. Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2019

Tujuan	Sasaran
1. Penerapan Nilai-Nilai Agama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian budaya keagamaan 2. Pemberdayaan lembaga keagamaan 3. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
2. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 5. Meningkatnya kualitas pendidikan 6. Meningkatnya budaya baca dikalangan pelajar dan masyarakat
3. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 8. Mantapnya ketahanan pangan daerah 9. Meningkatnya kesehatan reproduksi 10. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga
4. Peningkatan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 11. Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja 12. Membaiknya hubungan industrial
5. Peningkatan Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 13. Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi

Tujuan	Sasaran
	14. Meningkatnya nilai investasi 15. Meningkatnya pelestarian budaya
6. Penataan Infrastruktur Daerah	16. Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi 17. Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi 18. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman 19. Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan
7. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	20. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 21. Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif
8. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa	22. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal 23. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 24. Meningkatnya keterbukaan informasi publik 25. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 26. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
9. Perlindungan Sosial Masyarakat	27. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial 28. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

Sumber : Buku Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2019

Masing-masing sasaran tersebut didukung oleh sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD (54 SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yakni sebanyak

206 program dan 924 kegiatan. dari sejumlah program tersebut dapat diklasifikasikan program prioritas ada sebanyak 202 program dan non prioritas ada sebanyak 817 program.

1.5. Sistematika Penyusunan LkjIP Kabupaten Banjar

Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut ini:

- ❖ Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Aspek Strategis Kabupaten Banjar dan Permasalahan Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar, Prioritas Daerah dan Sistematika Penulisan LKjIP.
- ❖ Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019.
- ❖ Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja Bappeda Banjar dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019.
- ❖ Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2019 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019.
- ❖ Lampiran :
 - Penetapan Kinerja (PK) (Murni dan Perubahan) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banjar

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP ini mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.1. Perjanjian Kinerja Pembangunan Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2019. Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2019 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, disajikan dalam Perjanjian Kinerja setiap SKPD Tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th. 2019
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama	Angka Kriminalitas	Skor	10,17

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th. 2019
	masyarakat dalam kehidupan sehari-hari			
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,32
3	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,5
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,92
5	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase Penduduk Miskin / tingkat kemiskinan	Persen	2,66
6	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	164
7	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,31
8	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Gini	Indeks	0,34
9	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi	Persen	3,8
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,7
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	Persen	73,67
12	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	Persen	70,49
13	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	73

Sumber : Buku Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2019

2.2. Rencana Anggaran Masing-masing Tujuan/sasaran Tahun 2019

Sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 berikut dimuat pagu anggaran yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai seluruh tujuan/sasaran strategis yang telah direncanakan.

Tabel 2. 2. Rencana Anggaran Per Tujuan/sasaran Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran per Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama	16.377.735.972	Angka Kriminalitas	16.377.735.972

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019



No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran per Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran
	masyarakat dalam kehidupan sehari-hari			
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	213.106.196.846	Indeks Pembangunan Manusia	213.106.196.846
3	Meningkatnya kesehatan reproduksi	5.661.904.000	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	5.661.904.000
4	Menurunnya tingkat pengangguran	1.397.286.680	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.397.286.680
5	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	4.738.616.784	Persentase Penduduk Miskin / tingkat kemiskinan	4.738.616.784
6	Menurunnya risiko bencana	5.777.810.000	Indeks Risiko Bencana	5.777.810.000
7	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	47.971.778.939	Laju pertumbuhan ekonomi	47.971.778.939
8	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Gini	
9	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah		Laju Inflasi	
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3.164.022.000	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	3.164.022.000
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	153.461.410.217	Persentase konektivitas	153.461.410.217
12	Meningkatnya kelayakhunian	92.420.818.600	Persentase pemukiman layak huni	92.420.818.600
13	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	273.199.566.757	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	273.199.566.757

Sumber : Buku Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2019

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengamanatkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2019 ini telah mengakomodir beberapa perihal penting yang menjadi bagian dari analisa capaian kinerja seperti perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional, dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai alternative solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kategori Kode
1	≥ 100	Berhasil	Green
2	$70 < 100$	Cukup Berhasil	Blue
3	$40 < 70$	Kurang Berhasil	Yellow
4	< 40	Tidak Berhasil	Red

Sumber : Tim LKjIP Kabupaten Banjar

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2019

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2019. Pencapaian IKU Tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

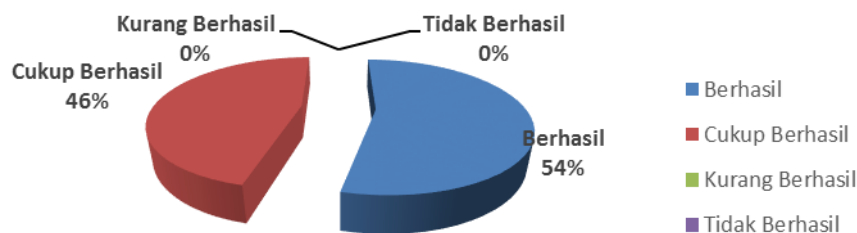
Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Tahun 2019

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas	11,17	NA	10,17	11,74	84,55	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,32	NA	68,32	68,94	100,91	Berhasil
3	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,48%	72,54%	1,50%	1,39%	107,33	Berhasil
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,03%	96,97%	2,92%	3,01%	96,92	Cukup Berhasil
5	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase Penduduk Miskin/ tingkat kemiskinan	2,70%	NA	2,66%	2,72%	97,74	Cukup Berhasil
6	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	176,4	NA	164	176,4	92,44	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	5,01%	NA	5,31%	5,18%	97,55	Cukup Berhasil
8	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Gini	0,35	NA	0,34	0,33	102,94	Berhasil

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
9	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi	2,63%	NA	3,80%	2,63%	130,79	Berhasil
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,5	99,3	69,7	72,36	103,82	Berhasil
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	98,73%	NA	73,67%	76,27%	103,53	Berhasil
12	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	92,96%	NA	70,49%	95,25%	135,12	Berhasil
13	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	72,71	NA	73,00	72,71	99,60	Cukup Berhasil

Sumber : Pengolahan Data

Gambar 3. 1. Tingkat Capaian IKU Tahun 2019



3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per tujuan/sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam

analisis ini. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Indikator Kinerja Utama Angka kriminalitas

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kesatu maka ditetapkan tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hasil capaiannya diukur melalui indikator yaitu Angka Kriminalitas. Angka Kriminal merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu, semakin tinggi Angka Kriminalitas maka tingkat kerawanan suatu daerah semakin tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Angka Kriminal adalah angka kejahatan per 10.000 penduduk dengan formulasi total seluruh kasus kejahatan dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.

Indikator Angka Kriminalitas untuk mengukur pencapaian tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan indikator proxi (pendekatan) karena sulit menemukan indikator yang Smart untuk mengukur hasil dari pengamalan nilai-nilai agama. Apabila nilai-nilai agama diamalkan maka orang tersebut akan memiliki akhlak yang baik dan tentu tidak akan melanggar norma dan peraturan yang berlaku serta tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama di atas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Kriminalitas

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka kriminalitas	11.17	NA	10.17	11.74	84.55%	8.44	60.94%

Sumber : Pengolahan Data

Capaian Indikator Angka Kriminalitas pada tahun 2019 adalah 84,55 % didapat dari realisasi sebesar 11,74 dibandingkan

dengan target yang ditetapkan sebesar 10,17, capaian sebesar 84,55% ini masuk dalam kategori cukup berhasil walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 menyumbang sebesar 68,07 % dari target Angka Kriminalitas yang ditetapkan sebesar 8,44 pada tahun 2021.

Bila dibandingkan dengan realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2018 sebesar 11,17 maka realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2019 ada penurunan sebesar 0,57 poin.

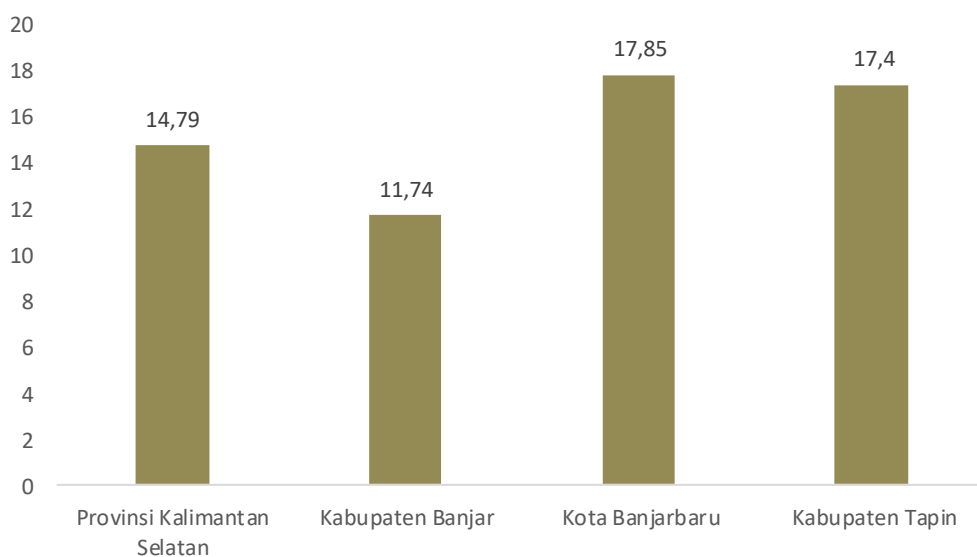
Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan dan dengan Kabupaten/kota tetangga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4. Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan

Daerah	Angka Kriminalitas Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Selatan	14,79
Kabupaten Banjar	11,74
Kota Banjarbaru	17,85
Kabupaten Tapin	17,40

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, data diolah

Gambar 3. 2. Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota Lain Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Diolah

Dilihat pada tabel di atas Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Kabupaten/kota tetangganya masih lebih rendah, kondisi ini patut di syukuri dan dipertahankan serta harus tetap selalu berusaha untuk diturunkan.

Upaya penurunan angka kriminalitas diintervensi sesuai kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dilakukan melalui 3 sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Pelestarian budaya keagamaan dengan indikator Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan
2. Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan dengan indikator Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan dan persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan
3. Sasaran Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum

Target, realisasi dan capaian dari masing masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan	45.45%	45.45%	100.00%	83.33%	54.54%
2	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	9.92%	113.12%	1140.32%	11.13%	1016.35%
3	Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan	40%	100%	250%	60%	166.67%
4	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum	619	1.012	36.51%	592	29.05%

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran Pelestarian budaya keagamaan

Kabupaten Banjar yang terkenal dengan julukan kota Serambi Mekkah memiliki cukup banyak budaya yang bernilai religius.

Pemerintah daerah menaruh perhatian yang cukup serius terhadap pelestarian budaya yang bernilai religius ini, hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kelestarian dan menjaga eksistensi Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi Mekkah. Selain itu yang terpenting dari penetapan sasaran pelestarian budaya keagamaan ini adalah untuk mendukung pencapaian indikator tujuan angka kriminalitas. Harapannya dengan adanya kegiatan seni yang bernuansa keagamaan yang rutin dilaksanakan seperti festival bedug, festival hadrah dan yang lainnya bisa menjadi salah satu faktor penekan angka kriminalitas di Kabupaten Banjar.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya pelestarian budaya keagamaan diukur dengan **persentase budaya keagamaan yang dilestarikan**.

Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan merupakan pencerminan keberhasilan pelestarian budaya keagamaan :

$$\begin{aligned} \% \text{ Budaya Keagamaan Yang Dilestarikan} \\ = \frac{\text{Jlh Unsur Budaya Lokal Yg Dilestarikan}}{\text{Jlh Unsur Budaya Lokal Yg Diinventarisir}} \times 100\% \end{aligned}$$

Capaian Pelestarian Budaya Keagamaan pada tahun 2019 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 45.45% dibandingkan dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja sebesar 45.45%. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Pelestarian Budaya Keagamaan	$= \frac{\text{Jlh Unsur Bdy Lokal Yg Dilestarikan}}{\text{Jlh Unsur Bdy Lokal Yg Diinventarisir}} \times 100$		
	$= \frac{5}{11} \times 100 = 45.45\%$		

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 menyumbang sebesar 83,84% dari target 54.54% pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100 % masuk dalam capaian kategori **Berhasil**.

Pencapaian target kinerja sasaran 1 didukung oleh keberadaan Martapura khususnya dan Kabupaten Banjar pada umumnya yang kental dengan kehidupan religius yang menjadi tempat tumbuhnya budaya yang bernuansa religi.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sasaran 1 adalah belum terdapat data yang valid dan lengkap mengenai jenis budaya yang bernuansa religi termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya bernuansa islami di Kabupaten Banjar.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan inventarisasi kebudayaan bernuansa religi, termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya Islam (alamat, keanggotaan, aktivitas) sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan dan pelestarian budaya yang bernilai religi.

2. Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan

Sasaran **Pemberdayaan lembaga keagamaan** merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah :

a. Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan

Pemberdayaan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Banjar merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Pemberdayaan lembaga keagamaan ini dilaksanakan pada pemberdayaan lembaga zakat yang ada di Kabupaten Banjar. Saat ini jumlah lembaga zakat yang dibina di Kabupaten Banjar adalah 1 (satu) BAZNAS sedangkan Unit Pengumpul Zakat ada 34 yang dibina. Dengan penyaluran zakat yang tepat kepada mustahiq diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pengungkit penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Banjar.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran pemberdayaan lembaga keagamaan diukur dengan persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan.

Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan merupakan pencerminan keberhasilan pemberdayaan lembaga keagamaan :

$$\% \text{ Peningkatan Dana Zakat Yg Tersalurkan} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi tahun Awal Renstra}}{\text{Realisasi tahun Awal Renstra}} \times 100\%$$

Capaian pemberdayaan lembaga keagamaan pada tahun 2019 adalah 1.140% didapat dari realisasi sebesar 113.12 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 9.92 % Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	=	$\frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan-Realisasi Tahun AwalRenstra}}{\text{Realisasi Tahun AwalRenstra}}$	X 100	
	=	$\frac{797.682.094 -}{374.281.000}$	X 100	= 113.12 %

Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan menggunakan cara perhitungan realisasi tahun berjalan dikurang dengan realisasi tahun awal renstra dibagi realisasi tahun awal renstra dikali 100, pada tahun 2019 realisasi penyaluran dana zakat adalah 797.682.094 sedangkan realisasi penyaluran dana zakat pada tahun awal renstra adalah 374.281.000 apabila dipersentasekan maka realisasi kinerja sasaran persentase dana zakat yang tersalurkan adalah 113,12% dari target 9,92% maka capaian sasaran pemberdayaan lembaga keagamaan dengan indikator kinerja persentase dana zakat yang tersalurkan adalah 1.140%, predikat capaian kinerja ini adalah berhasil;

Realisasi kinerja tahun 2019 pada Sasaran Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dengan indikator persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan adalah 113,12% jika dibandingkan dengan target periode akhir RPJMD 11,13 maka tingkat capaian kerjanya adalah 1.016% capaian ini sudah melampaui jauh dari target periode akhir RPJMD yaitu 11,13.

b. Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan

Indikator sasaran pemberdayaan lembaga keagamaan yang kedua adalah persentase pesantren yang mendapat pembinaan. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan

Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya yang pembinaannya dibantu oleh pemerintah daerah.

Cara penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Pesantren yang dibina}}{\text{Jumlah pesantren}} \times 100$$

Berdasarkan data dari Kemenag Kabupaten Banjar, di Kabupaten Banjar terdapat 52 pesantren. Dan semuanya mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{52 \text{ Pesantren yang dibina}}{52 \text{ Pesantren}} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa dari target indikator persentase pesantren yang mendapat pembinaan tahun 2019 sebesar 40%, maka dapat diperoleh realisasi capaian sebesar 250,00% dan masuk dalam kategori Berhasil.

Realisasi kinerja tahun 2019 pada Sasaran Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dengan indikator persentase pesantren yang mendapat pembinaan adalah 250,00% jika dibandingkan dengan target periode akhir RPJMD 60% maka tingkat capaian kinerjanya adalah 166,67% capaian ini sudah melampaui jauh dari target periode akhir RPJMD yaitu 60%.

3. Sasaran Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Suasana lingkungan aman dan nyaman serta kondusif adalah dambaan semua orang. Demikian juga dengan warga Kabupaten Banjar, karena dengan suasana yang kondusif, aman dan nyaman roda kehidupan di segala aspek bisa berjalan dengan baik. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menaruh perhatian yang sangat besar terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada sasaran pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat hal yang hendak dicapai adalah meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, adapun indikator kinerja sasarannya adalah persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum

dengan target penurunan sebesar 3% atau dari angka 1033 kasus pelanggaran diturunkan menjadi 1002 kasus pelanggaran, formula perhitungan indikator yang dipakai yaitu :

Jumlah kasus pelanggaran pada tahun berjalan (n) dikurang jumlah kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya (n-1) dikali

Jumlah kasus pelanggaran adalah jumlah semua kasus pelanggaran perda atau produk hukum daerah lainnya yang ditangani Satpol PP Kabupaten Banjar termasuk yang bernuansa agama dari hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat dan dari hasil operasi yang dilakukan oleh Satpol PP.

Tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani/terjadi sebanyak 1012 kasus pelanggaran atau realisasi penurunannya 2.03% dari tahun sebelumnya sebanyak 1033 kasus, ini berarti target untuk bisa menurunkan jumlah kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dengan target 3% atau di angka 1002 kasus pelanggaran tidak tercapai.

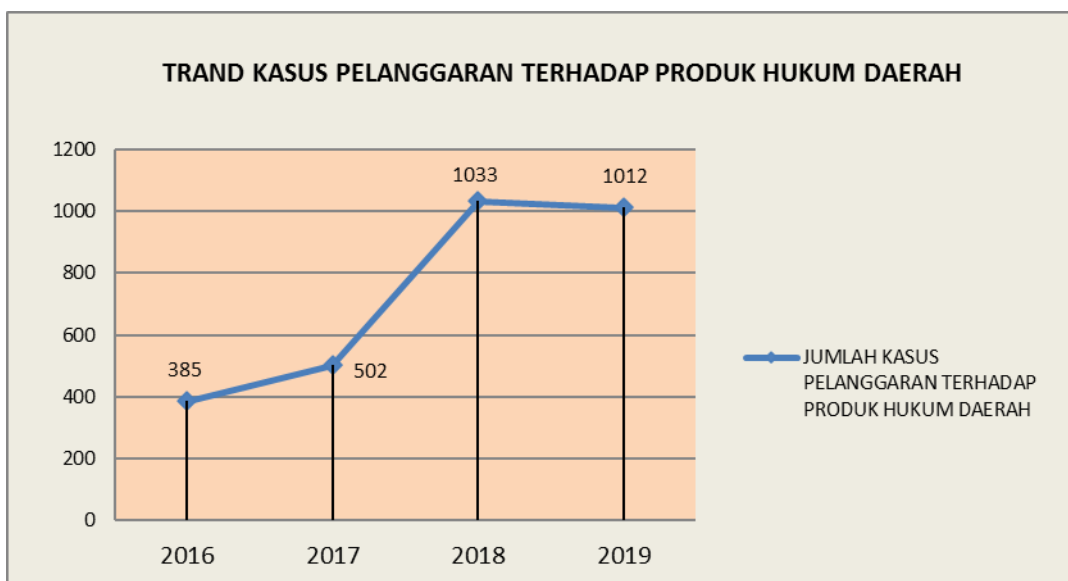
Penjabaran pencapaian target dan realisasinya untuk sasaran pertama ini dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 6. Penjabaran Pencapaian Target Dan Realisasi Sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019

Triwulan	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Akumulasi Target 2019	Realisasi 2019	Capaian terhadap Target Kasus 2019		Tingkat Capaian 2019
I	Kasus	258	258	250	250	141	141	-109	143.60%
II	Kasus	259	517	252	502	319	460	-42	108.37%
III	Kasus	258	775	250	752	286	746	-6	100.80%
IV	Kasus	258	1033	250	1002	266	1012	10	99.00%
Jumlah		1033	1033	1002	-3%	1012	1012	-2.03%	99.00%
Catatan :		Hasil negative sama dengan hasil jumlah penurunan							

Sumber : Data Satpol PP Kabupaten Banjar

Gambar 3. 3. Trand kenaikan dan penurunan jumlah kasus pelanggaran terhadap produk hukum daerah setiap tahun



Dari gambar grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2019 mengalami penurunan angka kasus pelanggaran dibandingkan tahun 2018 sebanyak 21 kasus pelanggaran, walaupun mengalami penurunan dari tahun 2018 tapi masih tinggi kalau dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Dari angka kasus pelanggaran yang ditangani Satpol PP di tahun 2019 jenis kasus pelanggarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 7. Trand Jenis Pelanggaran

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS				KASUS YANG TERSELESAIKAN			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	PKL	133	125	167	206	76	120	167	206
2	JALUR HIJAU	141	137	152	184	135	132	149	184
3	PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF	0	5	67	94	0	5	67	94
4	KEGIATAN MENGGANGGU TERTIBAN UMUM	0	7	64	87	0	7	60	86
5	ANJAL	9	3	28	72	9	3	28	72
6	ASUSILA	11	4	35	68	11	4	34	68
7	LINGKUNGAN	2	7	22	54	2	7	21	51
8	KEARIFAN LOKAL	13	42	52	49	13	42	52	49
9	PERIZINAN DAN TATA RUANG	32	38	188	47	32	38	187	43

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS				KASUS YANG TERSELESAIKAN			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
10	KEBERSIHAN	5	2	10	34	5	2	10	34
11	GEPENG	12	16	53	33	12	16	53	33
12	KAWASAN BEBAS ROKOK	0	0	0	28	0	0	0	28
13	JAM SEKOLAH	0	0	7	25	0	0	7	25
14	KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN	0	5	13	17	0	5	13	17
15	MINUMAN OPLOSAN	0	1	2	7	0	1	2	7
16	KTP	0	87	166	5	0	87	166	5
17	AKSI MASSA/DEMO	3	1	0	1	3	1	0	1
18	PEREDARAN MIRAS ILEGAL	1	3	2	1	1	3	2	1
19	EVENT MASYARAKAT/ PEMERINTAH	23	19	5	0	23	19	5	0
JUMLAH		385	502	1033	1012	322	492	1023	1004

Sumber : Data Satpol PP Kabupaten Banjar

Capaian indikator sasaran Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tahun 2019 adalah 36.51% didapat dari realisasi sebesar 1.012 kasus yang ditangani dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 619 kasus. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 menyumbang sebesar 29.05 % dari target 592 kasus pada tahun 2021. Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 36.51% masuk dalam capaian kategori Tidak Berhasil.

3.2.2. Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan.

Sumber daya manusia (SDM) adalah yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformative yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah daerah. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau lambatnya suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM), adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu Indikator Utama Kabupaten Banjar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

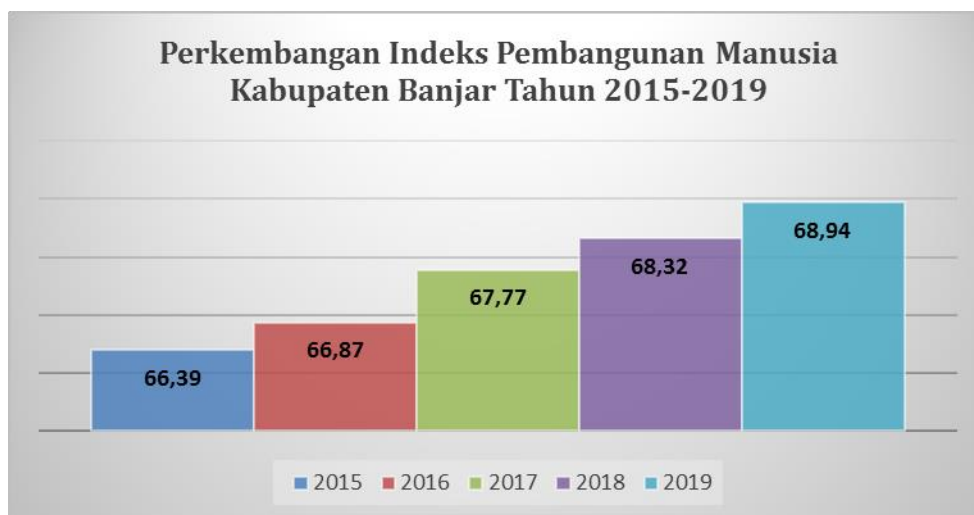
$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Tabel 3. 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	indeks pembangunan manusia (IPM)	68,32	NA	68.32	68.94	100.91%	69.35	99.41%

Sumber : Pengolahan Data

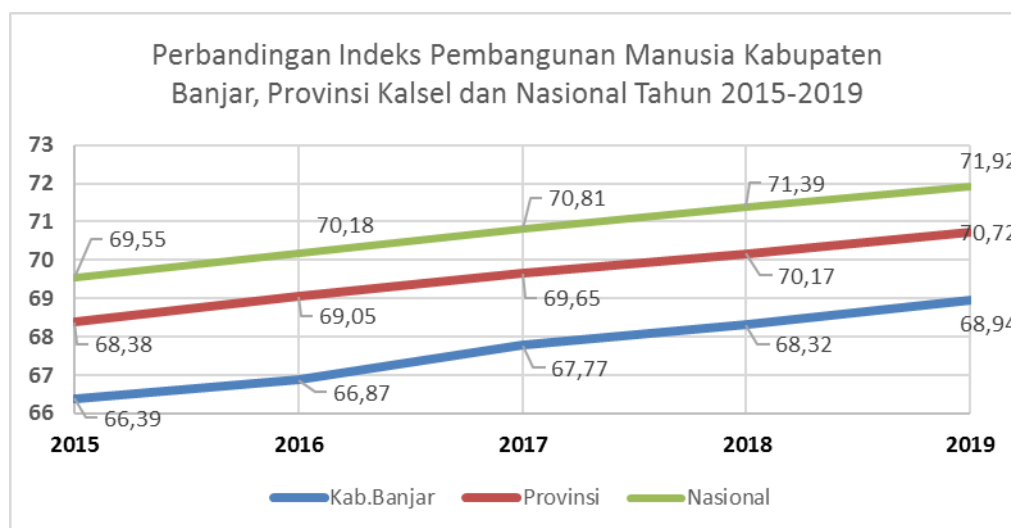
Gambar 3. 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Dari Gambar di atas dapat dilihat IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Banjar tercatat sebesar 66,39 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar 68,94 pada tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 5. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 -2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, Data diolah

Dilihat gambar di atas, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar dari tahun 2015-2019, masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

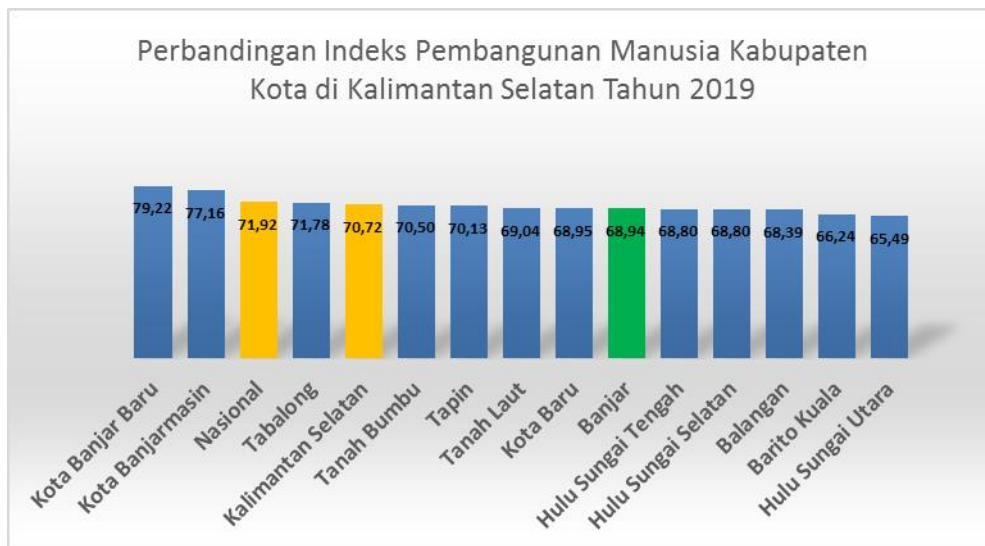
Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong peningkatan IPM yang merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Secara umum IPM Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sejak 2015. Pada 2015 IPM Kabupaten Banjar sebesar 66,39, meningkat menjadi 66,87 di tahun 2016 dan terus meningkat hingga mencapai 67,77 di tahun 2017, pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan menjadi 68,32 atau meningkat sebesar 0,81 point dan tahun 2019 meningkat kembali menjadi 68,94. Posisi IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun masih di bawah angka rata-rata Kalimantan Selatan. Angka IPM Kalimantan Selatan di tahun 2018 sebesar 70,17. Perbedaan IPM Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan ini cenderung melebar dari tahun 2015 ke 2016, hingga berbeda 2,18 poin di tahun 2015. Namun kemudian perbedaan mengecil menjadi 1,88 di tahun 2017 dan pada tahun 2018 dapat ditekan lagi menjadi 1,85. Hal ini terlihat juga dari pertumbuhan IPM Kabupaten Banjar IPM Kabupaten Banjar yang lebih cepat dari pertumbuhan prov. Kalsel

Pada tahun 2019, Peringkat IPM Kabupaten Banjar meningkat menjadi 8 (68,94) dari sebelumnya Tahun 2018 berada pada peringkat 9 (68,32). Terdapat 2 Kabupaten dengan nilai IPM yang sama yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah menempati urutan ke-9, IPM tertinggi dicapai Kota Banjarbaru dan terendah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdapat 10 Kabupaten dengan capaian IPM masih dibawah capaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan ini merupakan suatu catatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan terutama di sepuluh Kabupaten tersebut, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perbandingan IPM Kabupaten Banjar

dengan Kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 6. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019



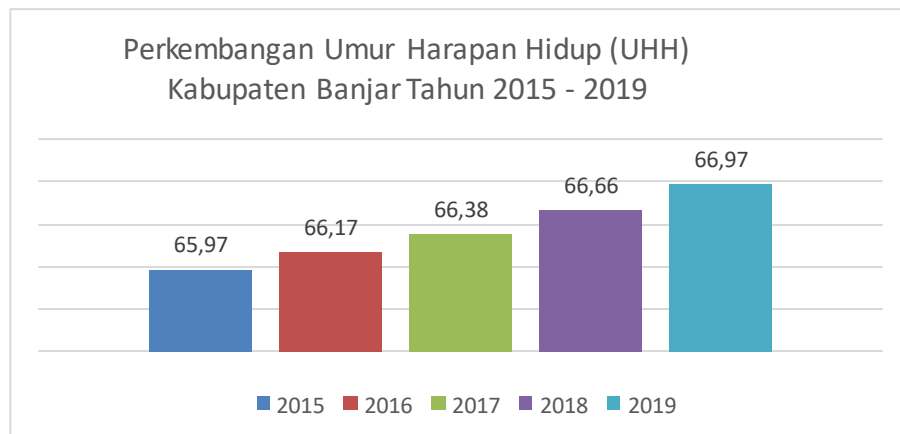
Sumber : BPS Provinsi Kalsel 2019, Data diolah

Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Banjar secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a) Usia Harapan Hidup

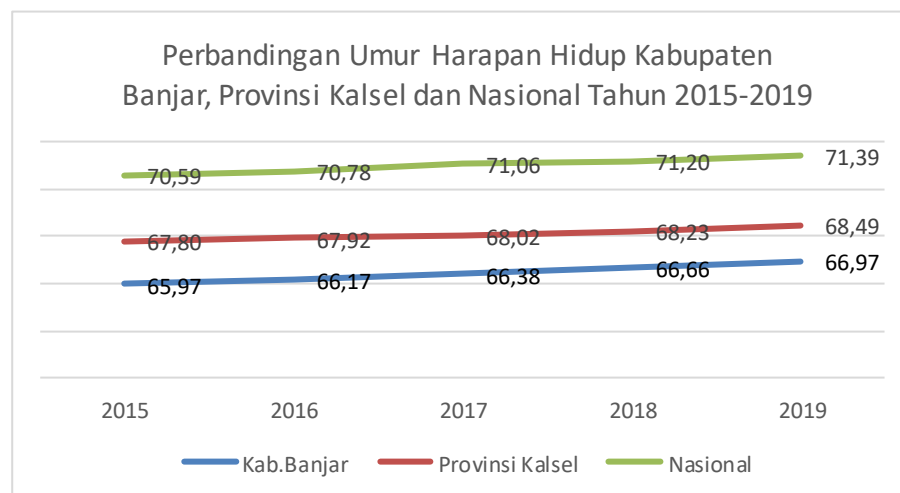
Usia harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 65,97 pada tahun 2015 meningkat menjadi 66,97 pada tahun 2019, perkembangan tersebut relevan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Perkembangan umur harapan hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2015-2019 bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 7. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Gambar 3. 8. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 -2019

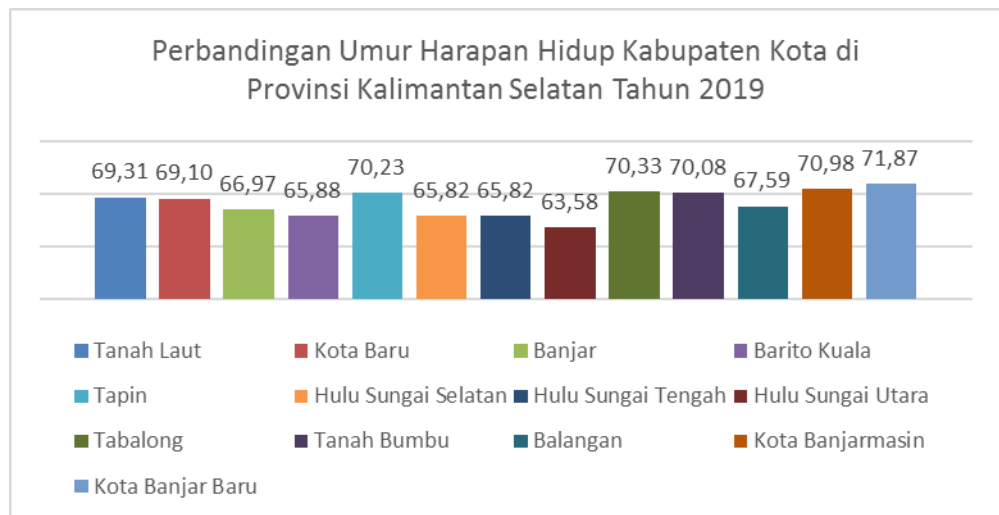


Sumber: BPS Kabupaten Banjar , 2019. Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian Umur harapan hidup di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, umur harapan hidup Kabupaten Banjar menempati posisi ke sembilan.

Sedangkan Umur Harapan Hidup yang tertinggi di tempati Kota Banjarbaru dengan Umur Harapan Hidup sebesar 71,67. Perbandingan Umur harapan hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 9. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2019

b) Harapan Lama Sekolah

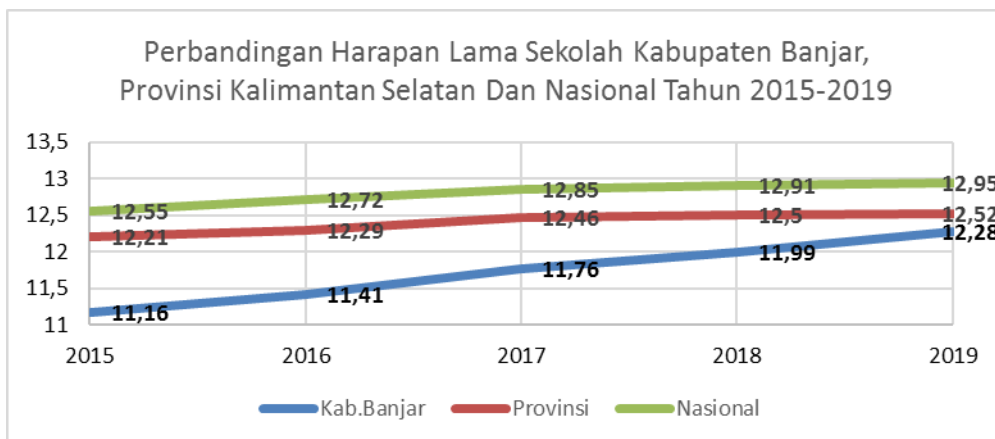
Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 11,16 (tahun 2015) menjadi 12,28 (tahun 2019), seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 3. 10. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Gambar 3. 11. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

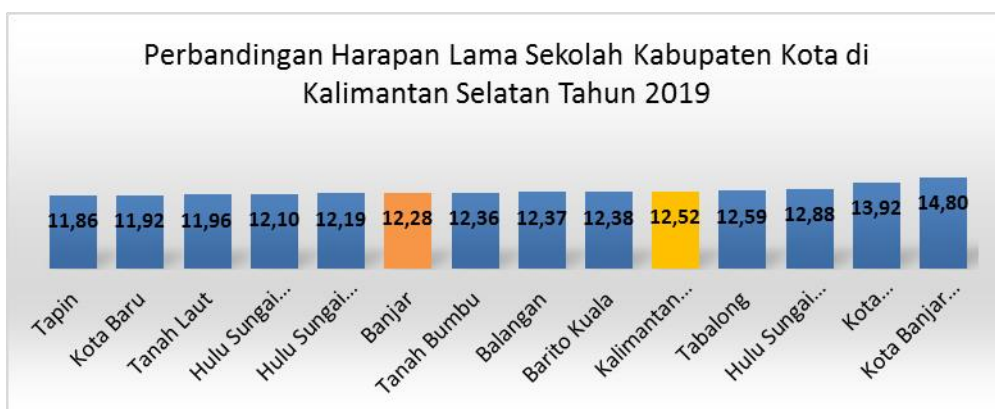


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, Data diolah

Pada gambar di atas dapat dilihat Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banjar berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, tetapi dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan dan terus mendekati angka Provinsi.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian harapan lama sekolah di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, harapan lama sekolah Kabupaten Banjar menempati posisi ke delapan. Perkembangan Angka harapan lama sekolah Kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 12. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019

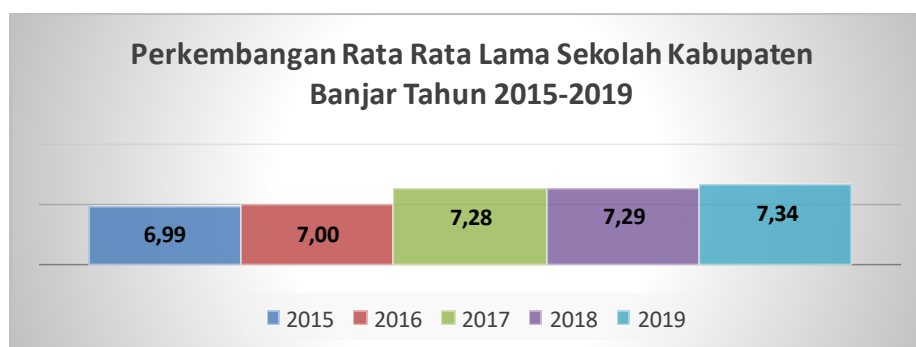


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Data diolah

c) Rata-Rata Lama Sekolah

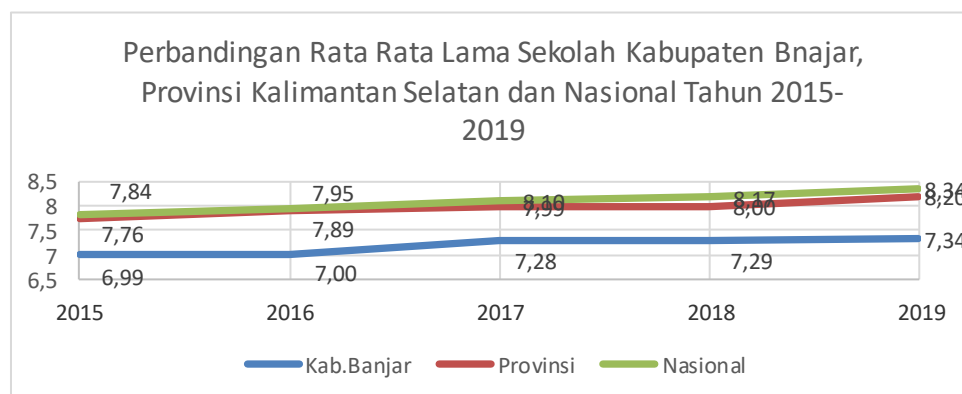
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2015-2019 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,99 pada tahun 2015 menjadi 7,34 pada tahun 2019, perkembangan tersebut relevan dengan Kalimantan Selatan dan Nasional. Berikut Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 13. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Gambar 3. 14. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

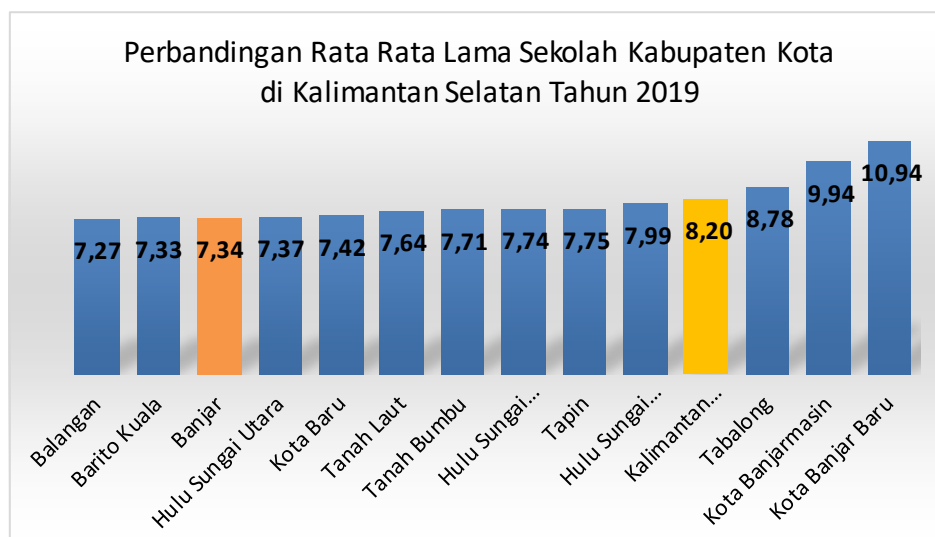


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Kalimantan Selatan dan BPS RI, Data diolah

Dilihat dari gambar di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Selisih antara Kabupaten Banjar dengan Provinsi pada tahun 2019 masih cukup besar yaitu 0,88 poin.

Apabila dibandingkan Kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjar pada tahun 2019 berada pada urutan ke sebelas dari 13 Kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan urutan pertama untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan dipegang oleh Kota Banjarbaru

Gambar 3. 15. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019

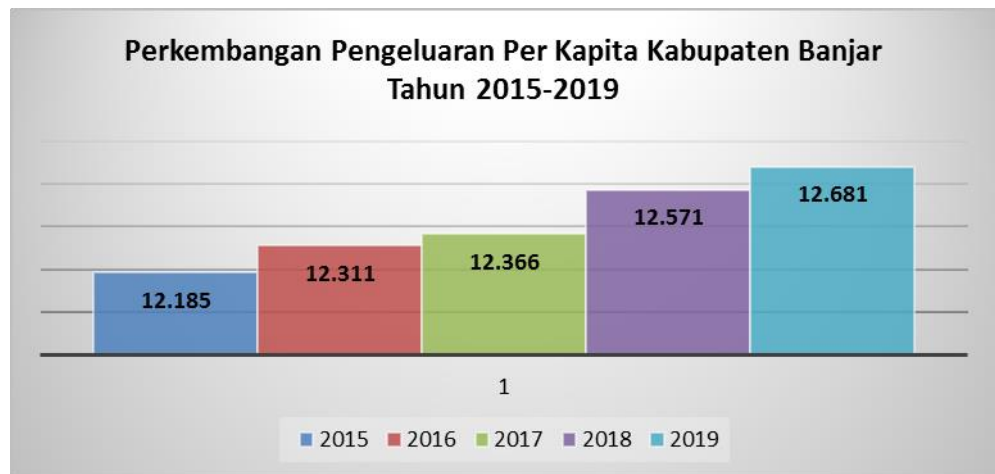


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Data diolah

d) Pengeluaran Per Kapita

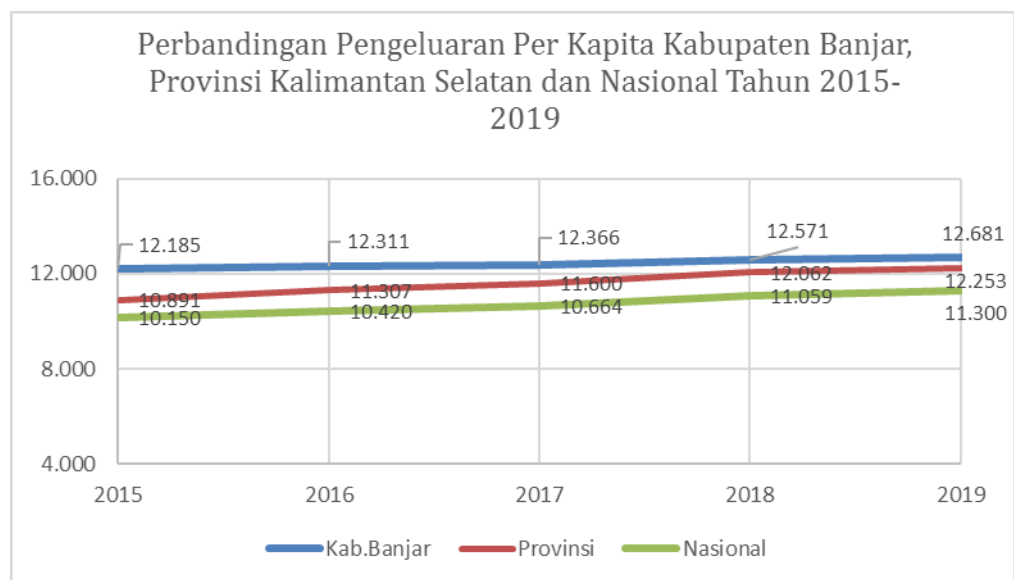
Pengeluaran perkapita di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari Rp12.185 ribu (tahun 2015) menjadi Rp12.681 ribu (tahun 2019). Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Banjar mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 16. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

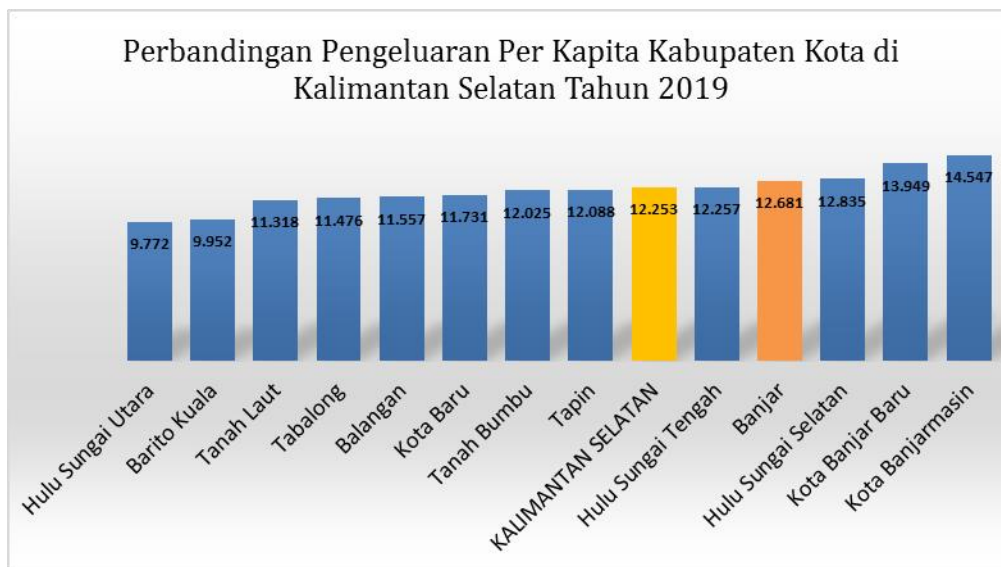
Gambar 3. 17. Perbandingan Pengeluaran Per kapita Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2019

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian pengeluaran per kapita di antara Kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar menempati posisi keempat. Pengeluaran per kapita kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3. 18. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Data diolah

Pencapaian indikator **Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia**, didukung oleh 7 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan, dengan indikator Indeks Pendidikan
2. Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat, dengan indikator persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk
3. Meningkatnya pelestarian budaya, dengan indikator Persentase budaya dilestarikan
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks kesehatan/Usia harapan hidup
5. Mantapnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan
6. Meningkatnya kesehatan reproduksi , dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga, dengan indikator indeks kebugaran.

Target, realisasi dan capaian dari masing masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pendidikan	57,60	NA	57.58	58,50	101,60 %	58.19	100,53 %
2	Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk	5.30	NA	4.52%	5,50 %	121.68 %	4.87%	112,94 %
3	Persentase budaya dilestarikan	NA	NA	70.73%	70.73%	100%	75.61%	93.55%
4	Indeks Kesehatan / Usia Harapan Hidup (UHH)	66,66	NA	66.66	66,97	100,47 %	66.94	100,04 %
5	Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	50.9	69.15	135.85%	51.1	135.32%
6	Tingkat pertumbuhan penduduk	1.48	NA	1.5%	1.39%	107.33%	1.48%	106.08%
7	Indeks kebugaran	NA	NA	0.5	0.8	160%	0.7	114.29%

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan

Secara filosofis Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kewajiban pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat (1) menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 28 B ayat (1) menyatakan setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. Hak pendidikan juga dinyatakan dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 60 UU HAM menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Menurut Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Konvensi Hak Anak, pemerintah wajib memenuhi hak mendapat

pendidikan bagi anak dan menjamin pemerataan akses pendidikan.

Ketentuan tersebut bermakna negara wajib memberikan kesempatan bagi semua anak usia sekolah agar dengan mudah memperoleh akses pendidikan yang terjangkau.

Pemerintah daerah sangat perhatian terhadap peningkatan akses dan kualitas Pendidikan di Kabupaten Banjar, dimana hal ini selalu menjadi prioritas di dalam pembangunan di Kabupaten Banjar.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan diukur dengan **indikator Indeks Pendidikan**.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, komponen pembentuknya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

IHLS = Indeks harapan lama sekolah

IRLS = Indeks rata rata lama sekolah

Capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2019 adalah 101,60 % didapat dari realisasi sebesar 58,50 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 57,68. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Indeks Pendidikan	=	$\frac{IHLS + IRLS}{2}$	X 100	
	=	$\frac{0,68 + 0,49}{2}$	X 100	= 58,50

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 menyumbang sebesar 100,53 % dari target 58,19 pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 101,60 % masuk dalam capaian kategori **Berhasil**.

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks Pendidikan tahun 2018 sebesar 57,60, maka realisasi Indeks Pendidikan tahun 2019 ada kenaikan sebesar 0,9 poin.

2. Sasaran : Meningkatkan Budaya Baca di Kalangan Pelajar dan Masyarakat

Pendidikan budaya membaca sudah harus diterapkan sejak dini, dengan kemasan-kemasan yang menarik sesuai dengan usia. Buku adalah salah satu media yang sangat baik untuk melakukan transfer nilai kepada anak serta menstimulasi kreativitasnya dan kemampuan dalam berpikir anak.

Selain meningkatkan mental illness, daya tangkap, kreativitas dan logika berpikir, kebiasaan membaca buku juga bermanfaat untuk membentuk karakter positif dan membangun hubungan emosional yang hangat dengan orang tua.

Membaca bukan hanya untuk kalangan yang bergelut dengan Pendidikan saja tetapi untuk semua golongan tanpa membedakan status ekonomi maupun sosialnya. Membaca merupakan hal sangat penting dilakukan oleh semua golongan karena membaca dalam kehidupan bermasyarakat merupakan proses pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengetahui kehidupan di sekitarnya.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat diukur dengan indikator persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk.

Formulasi perhitungan persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk diperoleh dari jumlah pemustaka dibagi jumlah penduduk dikali 100%.

Pemustaka didefinisikan adalah orang yang menggunakan fasilitas perpustakaan baik perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan percontohan, pengguna internet gratis yang disediakan oleh dinas perpustakaan dan pengunjung virtual perpustakaan di Kabupaten Banjar.

Capaian persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 121,68 % didapat dari realisasi sebesar 5,50 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,52 %. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk	=	$\frac{\sum \text{pemustaka}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$
	=	$\frac{32.316}{588.095} \times 100\% = 5,50\%$

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 sudah melebihi sebesar 112,94 % dari target 4,87 % pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 121,68 % masuk dalam capaian kategori **Berhasil**.

Penetapan indikator persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk merupakan indikator yang baru pada perubahan RPJMD dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah sehingga untuk data realisasi tahun-tahun sebelumnya tidak diperhitungkan.

Pada tahun sebelumnya indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pemustaka adalah Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah, dengan realisasi pada tahun 2016 sebesar 4,72 %, tahun 2017 sebesar 1,81 % dan tahun 2018 sebesar 5,30 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 19. Perkembangan Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan Tahun 2016 -2018



Sumber : LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjar

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Jumlah koleksi buku yang terus bertambah dan bervariasi
- 2) Kegiatan yang dilakukan lebih bervariasi dengan adanya kerjasama dengan mitra dan atau library supporter yang mendukung kegiatan perpustakaan, diantaranya :

- o Kerjasama/bermitra dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) melalui program Perpuseru
 - o Kerjasama dengan Polres Banjar melalui Program Kabinaktar Binmas Polres Banjar
 - o Kerjasama dengan beberapa SKPD terkait yang mendukung program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, dan pula sebaliknya program dan kegiatan perpustakaan yang dapat mendukung program SKPD lain dalam rangka mencapai sasaran
- 3) Pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi
 - 4) Dalam rangka upaya meningkatkan budaya dan minat baca masyarakat setiap bulannya secara berkala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengundang anak didik (PAUD/SD) untuk datang berkunjung ke Perpustakaan, disamping itu juga mempromosikan kepada masyarakat melalui Layanan Mobil Perpustakaan Keliling secara intensif.

Faktor penghambat pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat :

- 1) Tenaga pengelola perpustakaan masih terbatas/belum sesuai standar tapi telah berupaya maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP yang sudah ditetapkan

3. Sasaran : Meningkatnya pelestarian budaya

Persentase budaya yang dilestarikan merupakan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir dikali seratus. Realisasi kinerja budaya yang dilestarikan mencapai 70,73%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola sebanyak 29 unsur dibagi dengan jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir sebanyak 41 unsur dikali seratus. Budaya tak benda yang dilestarikan/dikelola sebanyak 26 buah dan budaya tak benda sebanyak 3 unsur, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3. 10. Daftar Budaya Benda di Kabupaten Banjar

No	Nama Benda/Objek Cagar Budaya	Lokasi	Jenis	Dilestarikan
1	Rumah Adat Banjar bubungan tinggi	Desa Teluk Selong, Kec.Martapura Timur	Bangunan Cagar Budaya	1
2	Rumah Adat Banjar Gajah Baliku	Desa Teluk Selong Ulu, Kec.Martapura Barat	Bangunan Cagar Budaya	2
3	Monumen ALRI Divis IV Hankam	Desa Paku Alam, Kec.Sungai Tabuk	Bangunan Cagar Budaya	3
4	Makam Syeh Abdul Hamid Abulung	Desa Sei Batang, Kec.Martapura Barat	Bangunan Cagar Budaya	4
5	Mesjid Jami Syeh Abdul Hamid Abulung	Desa Sei Batang, Kec.Martapura Barat	Bangunan Cagar Budaya	5
6	Makam Sultan Adam Al Watsiqbillah	Kelurahan Jawa, Kec.Martapura Kota	Bangunan Cagar Budaya	6
7	Makam Sultan Tahlilullah	Kelurahan Keraton, Kec Martapura Kota	Bangunan Cagar Budaya	7
8	Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah gelar Penambahan Datu Pahat	Desa Lihung, Kec.Karang Intan	Bangunan Cagar Budaya	8
9	Makam Menteri Empat Keramat	Desa Seungai Tabuk, Kec.Sungai Tabuk	Bangunan Cagar Budaya	9
10	Makam Pangeran Abdurrahman Sultan Muda Abdurrahman	Desa Pasayangan, Kec.Martapura Kota	Bangunan Cagar Budaya	10
11	Makam Syeh Abdul Wahab Bugis/ Datu	Desa Tungkaran, Kec.Martapura Timur	Bangunan Cagar Budaya	11
12	Sultan Musta'in Billah (Raja Banjar 4) bin Sultan Hidayatullah	Desa Sei Kitano, Kec. Martapura Timur	Bangunan Cagar Budaya	12
13	Makam Sultan Inayatullah Pangeran	Desa Dalam Pagar, Kec.Martapura Timur	Bangunan Cagar Budaya	13
14	Makam Pangeran Hidayatullah	Desa Jonggol, Kec.Cianjur	Bangunan Cagar Budaya	14
15	Mesjid Jami Al Mokodam	Kecamatan Sungai Tabuk	Bangunan Cagar Budaya	
16	Mesjid Jami Al Karomah	Martapura Kota	bangunan bersejarah	
17	Benteng Orange Nassau	Kecamatan Pengaron	Bangunan Cagar Budaya	15

No	Nama Benda/Objek Cagar Budaya	Lokasi	Jenis	Dilestarikan
18	Meriam depan disbudpar, Kodim Martapura dan Mahligai Sultan Adam		benda cagar budaya	
19	Makam Datu Pelampaian	Kecamatan Astambul	Bangunan Cagar Budaya	
20	Makam KH. Anang Syahrani Arif	Desa Kampung Melayu Kecamatan Martapura Timur	Bangunan bersejarah	16
21	Makam H.abdullah Atau Syeh Said Achdan Yang Bergelar Datu Kalangkala	Desa Tungkaran, Kec.Martapura Kota	Bangunan Bersejarah	17
22	Makam Syeh Aminullah Dikenal dengan Sebutan Datu Bagul	Desa Tungkaran, Kec.Martapura Kota	Bangunan Bersejarah	18
23	Makam Syah Abdul Qadir	Desa Danau Salak, Kec.Matraman	Bangunan Bersejarah	19
24	Makam P.Muhammad Noor Bumi Kencana Bin Pangeran Datu Anum Bumi Kencan	Desa Rantau Bakula, Kec.Sungai Pinang	Bangunan Bersejarah	20
25	Makam Syeh Umar/Datu Bajanggung	Desa Tungkaran, Kec.Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	21
26	Makam Datu Ma'ad bin Ali/Datu Rambut	Desa Tangkas, Kec.Martapura Barat	Bangunan Bersejarah	22
27	Makam Datu Mar'i	Desa Tungkaran, Kec. Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	23
28	Makam H.Pangeran Arga Kusuma	Desa Bincau, Kec.Martapura Kota	Bangunan Bersejarah	24
29	Makan Pangeran Muhammad Tambak Anyar Bin Sultan Adam Al Wasiqubillah	Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	25
30	Makam Pangeran Muhammad Tambak Anyar Bin Sultan Adam Al Wasiqubillah	Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Timur	Bangunan Bersejarah	26

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

Tabel 3. 11. Daftar Unsur Budaya Tak Benda

No	Unsur Budaya Tak Benda	Dilestarikan
1	Manuskrip	
2	Tradisi lisan (bakisah, bapantun, madihin, dll)	Dilestarikan
3	Adat Istiadat	
4	Ritus	
5	Pengetahuan tradisonal	
6	Teknologi tradisional	
7	Seni (musik panting, rudat, tari tradisonal banjar, dll)	Dilestarikan
8	Bahasa (bakisah bahasa banjar, dll)	Dilestarikan
9	Permainan Tradisonal	
10	Olahraga Tradisonal	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

Realisasi tahun 2019 telah menyumbang sebesar 93,55% terhadap target daerah di akhir RPJMD. Keberhasilan kinerja diatas merupakan hasil dari adanya pegiat budaya serta tenaga ahli cagar budaya yang membantu dan turut berperan aktif dalam upaya pelestarian budaya benda maupun tak benda di Kabupaten Banjar. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja diantaranya belum terdapat data kebudayaan baik benda maupun tak benda yang lengkap. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian benda, situs serta kawasan cagar budaya maupun warisan budaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan inventarisasi kebudayaan bernuansa religi, termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya Islam (alamat, keanggotaan, aktivitas) sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan dan pelestarian budaya yang bernilai religi.

4. Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program dengan berbagai upaya berkesinambungan, terpadu dan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dimaksud adalah meningkatnya umur harapan hidup , menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, menurunnya angka kesakitan

maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator **Usia Harapan Hidup (UHH)/ Angka Harapan Hidup**.

Angka harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Dalam hal ini berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (AGE SPECIFIC DEATH RATE/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program **Mortpak Lite**.

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Apabila kesehatan fisik tidak mendukung akan memberikan faktor timbulnya penyakit yang memicu pada kematian. Hal ini akan membuat penurunan angka harapan hidup, begitu juga sebaliknya. Besarnya angka umur harapan hidup menurut standar UNDP adalah $25 < x < 85$.

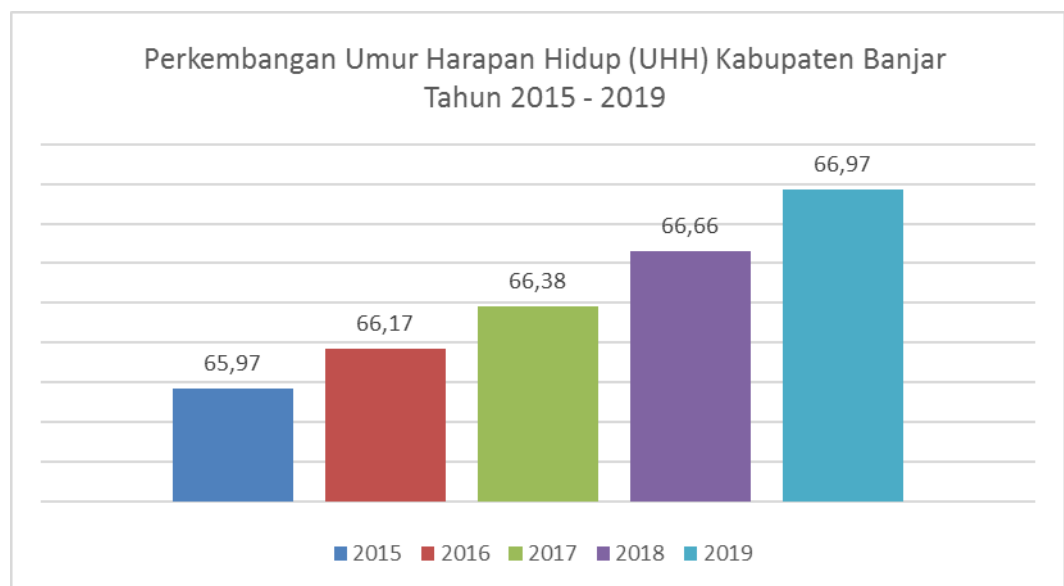
Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2019 adalah 100,47 % didapat dari realisasi sebesar 66,97 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 66,66. Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 sudah melebihi sebesar 100,04 % dari target 66,94 pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100,47 % masuk dalam capaian kategori **Berhasil**.

Perkembangan usia harapan hidup selama 5 tahun sebelumnya (tahun 2015 - 2019), menunjukkan tren yang baik yaitu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

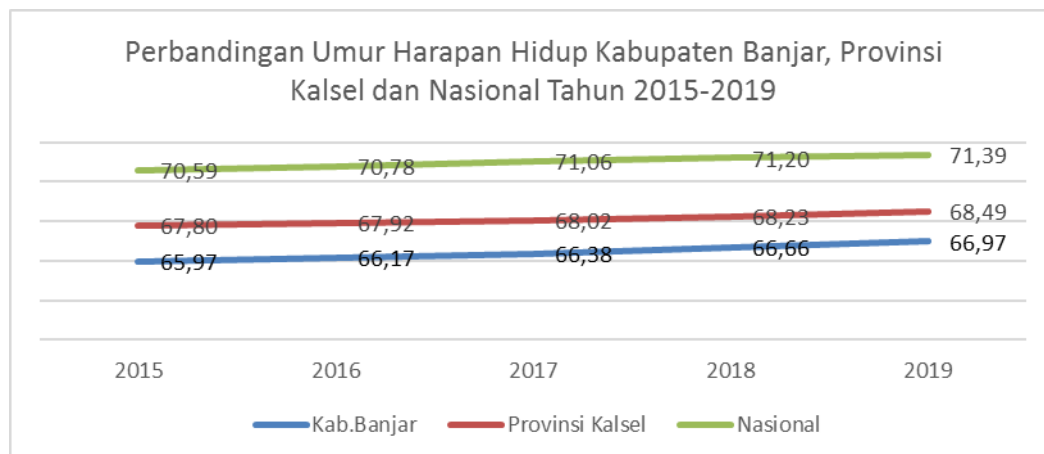
Gambar 3. 20. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, seperti gambar di bawah :

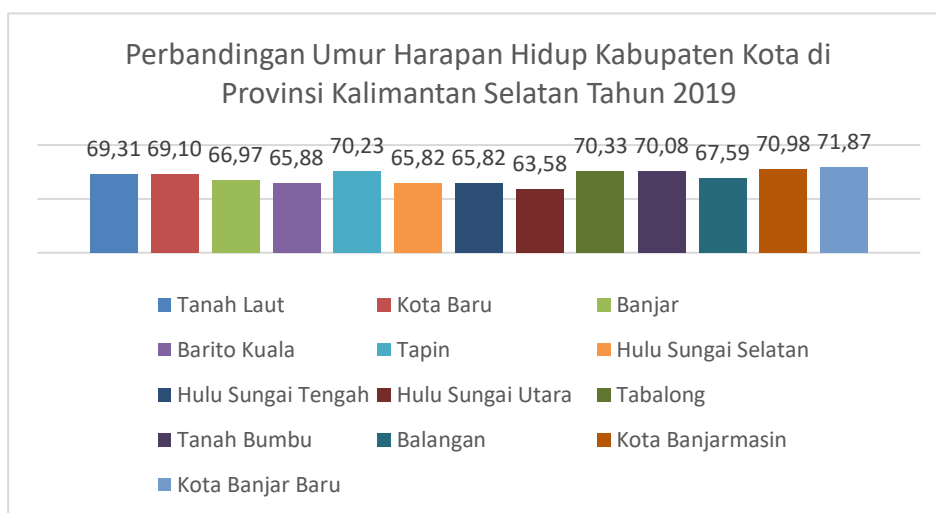
Gambar 3. 21. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 -2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Umur harapan hidup di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, umur harapan hidup Kabupaten Banjar menempati posisi ke sembilan. Sedangkan Umur Harapan Hidup yang tertinggi di tempati Kota Banjarbaru dengan Umur Harapan Hidup sebesar 71,87 Perbandingan Umur harapan hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 22. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Diolah

5. Sasaran : Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Meski berbagai negara sangat menginginkan keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi, namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak diindustrialisasikan. Kebalikannya, keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga disebutkan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pangan harus dapat diakses dengan mudah bagi rumah tangga.

Penilaian indeks ketahanan pangan terdiri dari empat aspek. Pertama, *affordability* terkait dengan cara memotong rantai pasok yang panjang. Kedua, *availability* yaitu, terjaganya penawaran. Lalu ketiga, *quality and safety* terkait kualitas dan keamanan standar nutrisi dan pengawasan impor dan keempat *natural resources and resilience* terkait dengan lahan dan produksi pangan.

Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (IAV + IBPL + IROADP + ILIT + ILEX + INUT + IWATER + IHEALTH)$$

Keterangan :

I. Ketersediaan Pangan ;

- Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih "padi + jagung + ubikayu + ubi jalar"

II Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan;

1. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
2. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai
3. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

III Pemanfaatan Pangan ;

1. Angka harapan hidup saat lahir
2. Berat badan balita di bawah standar
3. (underweight)
4. Perempuan buta huruf
5. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih
6. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan

Faktor Pendorong :

Dalam pencapaian mantapnya ketahanan pangan daerah tersebut di dorong beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Tersedianya unit-unit pelayanan sarana produksi pertanian di tiap kecamatan.
- 2) Tersedianya lahan-lahan pekarangan dan kader-kader PKK di tiap-tiap desa di Kabupaten Banjar.

Faktor Penghambat :

Dalam pencapaian mantapnya ketahanan pangan daerah tersebut mempunyai beberapa hambatan sebagai berikut :

- 1) Adanya bencana alam banjir/kekeringan serta serangan hama/penyakit pada komoditas pangan.
- 2) Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang tidak terkendali.
- 3) Fluktuasi harga pangan yang cenderung terus mengalami peningkatan pada tingkat konsumen.

Upaya yang dilakukan :

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian mantapnya ketahanan pangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pembinaan pendayagunaan sumber daya lahan
- 2) Meningkatkan frekuensi pembinaan alih teknologi bagi kelompok-kelompok wanita tani/kader PKK desa binaan.
- 3) Meningkatkan kesadaran petani/masyarakat untuk mau dan mampu melakukan penyediaan cadangan pangan di tingkat rumah tangga/desa.
- 4) Optimalisasi peran aktif Lembaga usaha mandiri yang ada di masyarakat dalam upaya memperlancar sistem distribusi dan stabilitas harga pangan masyarakat.

Dengan rencana tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 2) Penanganan kerawanan pangan daerah.
- 3) Penerapan analisis ketersediaan, cadangan pangan, distribusi dan akses pangan.
- 4) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan.

6. Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Reproduksi

Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Reproduksi menurut INTERNATIONAL CONFERENCE POPULATION AND DEVELOPMENT (ICPD) tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) dan ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS), kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan dan sebagainya.

Hasil akhir yang diharapkan dari peningkatan kesehatan reproduksi ini adalah dapat menekan tingkat pertumbuhan penduduk/laju pertumbuhan penduduk.

Angka laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometric

dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi ini diukur dari indikator **Tingkat Pertumbuhan Penduduk**.

Capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk tahun 2019 adalah 107,33 % didapat dari realisasi sebesar 1,39% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,50%.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 sudah melebihi sebesar 106,08 % dari target 1,48% pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 107,33 % masuk dalam capaian kategori **Berhasil**.

Bila dibandingkan dengan figa tahun sebelumnya (tahun 2015 -2019), tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan tren yang baik (menurun), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3. 23. Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2015 -2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, data diolah

7. Sasaran : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berolahraga

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, osteoporosis, bentuk kanker, obesitas,

dan cedera. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada indeks pembangunan olahraga (SDI). Olahraga yang secara spesifik dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi pelakunya adalah olahraga kesehatan. Dalam olahraga kesehatan tidak hanya melatih aspek jasmaniah, juga menjangkau aspek rohaniyah dan aspek sosial. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

Perkembangan zaman yang semakin maju, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan olahraga akan menentukan postur dan kemajuan pembangunan olahraga sampai ke suatu daerah. Pembangunan olahraga yang bertumpu pada peran serta masyarakat dahulu telah dicoba dalam kemasan "gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat". Artinya seluruh warga masyarakat mengenal dan menggemari berbagai jenis olahraga serta membiasakan diri untuk berolahraga. Meningkatkan partisipasi segenap lapisan masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kebiasaan. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang (1) sehat jasmani dan rohani, (2) terbentuk kepribadian, yang antara lain berani, berdisiplin, jujur, dan cinta tanah air, bangsa, dan negara, (3) berkembang tingkat pengetahuan dan kecerdasan, dan (4) berkembang rasa sosial. (Direktorat Keolahragaan, 1987: 5).

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga diukur dengan indikator **Indeks Kebugaran**.

Indeks kebugaran adalah pengukuran tingkat kebugaran masyarakat dengan menggunakan metode multistage fitness test (MFT) dengan alat tensi meter, alat ukur jantung, lintasan lari, stopwatch, timbangan BB.

Capaian Tingkat indeks kebugaran tahun 2019 adalah 160 % didapat dari realisasi sebesar 0,80 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,50.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 sudah melebihi sebesar 114,29 % dari target 0,70 pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 160 % masuk dalam capaian kategori **Berhasil**.

Indikator indeks kebugaran merupakan indikator yang baru ditetapkan setelah perubahan RPJMD sehingga untuk realisasi tahun sebelumnya tidak ada data tersedia.

Faktor Pendorong keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia adalah :

- 1) Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 berupa Peningkatan indeks Pendidikan, Peningkatan Usia Harapan Hidup dan Peningkatan Ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar.
- 2) Luas wilayah , jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam Kabupaten Banjar yang besar.

Faktor Penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia adalah :

- 1) Kondisi Kabupaten Banjar yang mempunyai kekhususan di bidang Pendidikan, dimana banyak terdapat pesantren yang masih belum menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (murni agama) dan belum terdaftar di Kementerian agama
- 2) Variabel pendidikan di dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu *Expected Years of Schooling (EYS)* dan *Mean Years of Schooling (MYS)* di Kabupaten Banjar dalam lima tahun terakhir berada di bawah rata-rata Kalimantan Selatan, termasuk beberapa indikator turunannya seperti Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pendidikan SMP dan SMA berada di bawah angka Kalimantan Selatan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Banjar tentang pentingnya pendidikan kesetaraan
- 4) Variabel kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah Angka Harapan Hidup yang dalam lima tahun terakhir

capaiannya berada di bawah pencapaian Kalimantan Selatan dan Nasional

- 5) Masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Banjar berakibat pada tingginya Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi dan kasus gizi rendah (stunting)

Upaya yang dilakukan

- 1) Membangun kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam bentuk MoU untuk penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di dalam pesantren dan Memfasilitasi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) untuk program kesetaraan Paket A, dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) program kesetaraan Paket B, dan C
- 2) Peningkatan kebutuhan prasarana pendidikan serta perbaikan fasilitas pendidikan;
- 3) Menyediakan beasiswa masyarakat miskin, dan terwujudnya penanganan masalah putus sekolah dan masalah pendidikan lainnya melalui Gerakan BADADAS (Banjar Cerdas dan Sehat) guna mengurangi jumlah siswa putus sekolah;
- 4) Memberikan bantuan kepada madrasah, swasta dan pesantren, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan guna meningkatkan peran dan partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket;
- 5) Peningkatan tunjangan kesejahteraan guru-guru agama TKA/TPA dan Madrasah Diniyah
- 6) Optimalisasi program pendidikan formal maupun non formal termasuk program kesetaraan Paket A, B, dan C
- 7) Peningkatan program pencegahan anak putus sekolah
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di wilayah pinggiran
- 9) Perbaikan sekolah/ruang kelas secara berkala
- 10) Gencar melaksanakan program Gerakan Masyarakat Sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan kesehatan
- 11) Penyediaan tenaga medis yang menetap di desa
- 12) Peningkatan akses dan pelayanan fasilitas kesehatan
- 13) Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat dengan tugas penggerakan masyarakat agar berperan aktif dalam pelayanan kesehatan

- dasar khususnya yang berkaitan dengan masalah kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan status gizi masyarakat
- 14) Penyelenggaraan Sosialisasi dan konseling terkait dampak buruk pernikahan dini dan risiko menikah muda
 - 15) Menciptakan program bantuan permodalan
 - 16) Melakukan pelatihan keterampilan padat karya
 - 17) Melakukan kontrol stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok
 - 18) Peningkatan anggaran dana desa untuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur

3.2.3. Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya jumlah, laju pertumbuhan dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Tabel 3. 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,48%	72,54 %	1.5%	1,39%	107,33%	1.48%	106,08 %

Sumber : Pengolahan Data

Capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk tahun 2019 adalah 107,33 % didapat dari realisasi sebesar 1,39% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,50%.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 sudah melebihi sebesar 106,08 % dari target 1,48% pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 107,33 % masuk dalam capaian kategori Berhasil.

Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (tahun 2015 -2019), tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan tren yang baik (menurun), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3. 24. Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2015 -2019

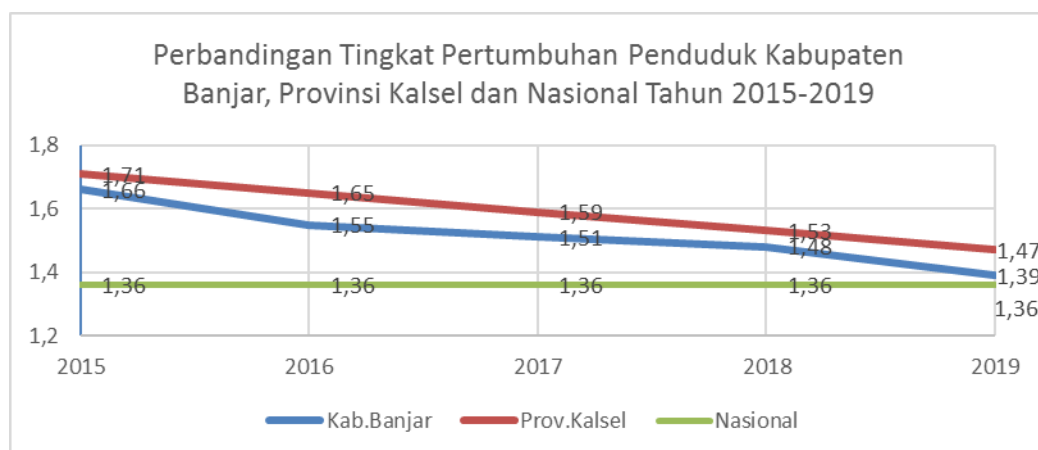


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Diolah

Berdasar data pada tabel realisasi dan capaian indikator kinerja utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk dapat terlihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar di tahun 2018 sebesar 1,48% dan terjadi penurunan sebesar 0,09 poin di tahun 2019 menjadi 1,39%. Angka ini jauh berada dibawah target RPJMD di tahun 2019 sebesar 1,50% dengan capaian realisasi sebesar 107,33% dan dapat dikategorikan berhasil.

Tingkat Pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar berada di bawah tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di atas Nasional.

Gambar 3. 25. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi dan BPS Nasional, Data diolah

Faktor Pendorong pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk :

- 1) Jumlah penduduk yang besar di Kabupaten Banjar merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun

Faktor Penghambat pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk:

- 1) Kurang meratanya persebaran penduduk, dimana sebaran penduduk di Kecamatan Martapura lebih padat daripada penduduk di kecamatan lainnya di Kabupaten Banjar
- 2) Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda dengan alasan supaya terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda-pemudi ke dalam jurang kemaksiatan, supaya terhindar dari pergaulan bebas, dapat meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga, dan belajar bertanggung jawab terhadap keluarga.

Upaya yang dilakukan:

- 1) Pemerintah daerah sangat mensupport agar program nasional untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai yaitu dengan cara masyarakat yang belum ber KB diajak dan diberikan edukasi tentang pentingnya Keluarga Berencana.
- 2) Membangun kesepahaman dengan Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai idealnya usia pernikahan dikalangan remaja dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi wanita
- 3) Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor dimana tujuan utamanya adalah mengintegrasikan kegiatan SKPD guna menunjang Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga

berencana bagi masyarakat khususnya yang masih berada di desa tertinggal

3.2.4. Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian dari tujuan menurunnya tingkat pengangguran ini diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka. Dan untuk mengetahui tingkat capaian dari tujuan menurunnya tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel berikut.

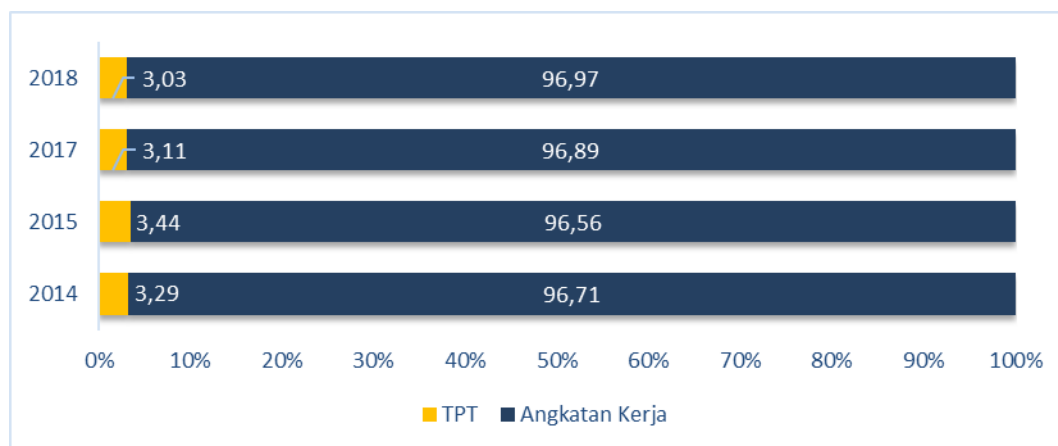
Tabel 3. 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.03%	96.97%	2.92%	3.01%	96.92%	2.73%	89.74%

Sumber : Pengolahan Data

Salah satu inklusifitas pertumbuhan ekonomi menasar pada kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam aktifitas ekonomi (lapangan usaha) sangat diperlukan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan akan semakin memberikan multiplier efek besar bagi perluasan kesempatan kerja di daerah. Implikasinya, perhatian pemerintah sudah selayaknya lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi yang padat tenaga kerja. Semakin pertumbuhan ekonomi inklusif, maka tingkat pengangguran juga akan berangsur menurun.

Gambar 3. 26. TPT dan Kesempatan Kerja Kabupaten Banjar, Tahun 2014-2018 (Persen)



Sumber: BPS Kab Banjar (data diolah)

Keterangan : Data 2016 tidak tersedia

Angka TPT Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang lumayan baik dibandingkan tahun 2014. Selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu dari 3,11 persen pada tahun 2017 turun menjadi 3,03 persen pada tahun 2018 dan terjadi penurunan lagi menjadi 3,01 persen pada tahun 2019.

Tingkat pengangguran terbuka terutama di perkotaan, hanya menyebabkan aspek-aspek yang kompleks dari masalah kesempatan kerja dan merupakan penampakan gunung es dari kejadian pengangguran. Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai karena angka tingkat pengangguran hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah menganggur (*under employment*), pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), dan pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka.

Faktor Pendukung :

- 1) Pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara alamiah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk baik karena sebab kelahiran dan kematian maupun karena migrasi. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Banjar mencapai 580 ribu orang lebih, dan sekitar 72 persennya merupakan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Banjar selalu

mengalami peningkatan tiap tahun, namun peningkatan ini tidak selamanya diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja.

- 2) Tenaga kerja yang ada tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, karena tidak memiliki keahlian tertentu.
- 3) Besarnya penawaran lapangan kerja belum sebanding dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, akibatnya, akan ada angkatan kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang disebut dengan pengangguran.

Faktor Penghambat :

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar yang mengalami penurunan di tahun 2018 setelah sebelumnya mengalami peningkatan di tahun 2017, meskipun begitu, TKK Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014-2017 yang berimplikasi pada tingkat pengangguran yang semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa lapangan kerja di Kabupaten Banjar memiliki kemampuan mengurangi tingkat pengangguran secara bertahap dapat dilihat pada Tabel 3.14. Berikut :

Tabel 3. 14. Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Banjar, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77,71	70,53	71,90	71,79
	- Tingkat Kesempatan Kerja	96,71	96,56	96,89	96,97
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29	3,44	3,11	3,03
2.	Persentase Bukan Angkatan Kerja	22,29	29,47	28,10	28,21

Sumber : Diolah dari data Sakernas Kabupaten Banjar

Keterangan : Data 2016 tidak tersedia

- 2) Mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja merupakan salah satu cara mengurangi jumlah pengangguran. Sehubungan dengan itu, pemerintah harus terus menciptakan iklim investasi yang kondusif termasuk menjaga konsistensi regulasi.

Upaya yang dilakukan pemerintah :

- 1) Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan lapangan kerja baru atau memperbesar lapangan kerja yang ada di setiap lapangan usaha.
- 2) Pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengagendakan *Job Fair* sebagai upaya untuk memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan kegiatan dalam percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan atau pendidikan khusus untuk menciptakan wirausaha baru.
- 4) Meningkatkan daya saing dengan memberikan program vokasi yaitu program pemerintah yang bertujuan memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta yang sudah mengalami pemutusan kerja atau berhenti kerja.

Dalam rangka mencapai target menurunnya tingkat pengangguran, maka telah ditetapkan sasaran-sasaran dalam RPJMD. Sasaran –sasaran yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3. 15. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	0.01%	3.05%	30.500%	0.03%	10166.67%
2	Persentase penurunan sengketa industrial	6	71	1183.33%	8	887.50%

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja

Sebagai upaya dalam menurunkan angka pengangguran, Kabupaten Banjar menetapkan kinerja untuk meningkatkan kesempatan kerja/lapangan kerja, kinerja diatas diukur dengan persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan. Pada Tahun 2019 terdaftar sejumlah 1792 orang pencari kerja dengan jumlah pencari kerja yang di tempatkan sebanyak 411 orang dengan kata lain para pencari kerja yang ditempatkan sebesar 22,9%. Bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018, dimana pencari kerja yang di tempatkan adalah 212 orang dengan jumlah pencari kerja sejumlah 2.928 atau dengan persentase 7,24%. Hal tersebut menunjukkan terdapat pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2019 dalam peningkatan tenaga kerja yaitu sebesar 216%.

Keberhasilan kinerja diatas merupakan dampak perkembangan teknologi dan media sosial sehingga penyebaran informasi lebih cepat dan luas, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 diataranya kegiatan bursa kerja khusus berupa pendampingan terhadap sekolah-sekolah dalam fasilitasi bursa kerja khusus, kegiatan job fair , kegiatan bursa kerja online yang cukup berhasil dimana lowongan yang tercatat sebanyak 275 lowongan, dan jumlah penempatan yang tercatat sebanyak 274 penempatan. Adapun catatan penting dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja seperti dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu berdaya saing, Kabupaten Banjar belum memiliki fasilitas Balai Latihan Kerja, walaupun ada 2 (dua) Pondok Pesantren yang mendapatkan BLK Komunitas, tetapi masih belum mampu menyerap untuk melatih pencari kerja dengan lingkup besar.

2. Sasaran Membaiknya hubungan industrial

Dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah berupaya menciptakan hubungan industrial yang baik atau kondusif. Sengketa industrial adalah sengketa antar pekerja dengan pemberi kerja baik berupa pemutusan hubungan kerja, perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak dan kewajiban. Untuk mengukur keberhasilan kinerja diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menetapkan

penurunan sengketa industrial sebagai parameternya. Tahun 2019 terjadi sengketa industrial sebanyak 7(tujuh) kasus, bila membanding dengan target sejumlah 12 kasus sengketa industrial, kinerja masuk dalam kategori berhasil dengan capaian melebihi dari 100%. Sejumlah kasus tersebut telah ditangani dan dapat terselesaikan 100%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, tercatat sebesar 12 kasus sengketa industrial, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan di Tahun 2019. Hal tersebut merupakan hasil daripada beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan serta fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3.2.5. Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin / tingkat kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, entah itu sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek lainnya, seperti sosial dan budaya.

Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari beberapa sudut pandang konsep kemiskinan memiliki banyak pengertian antara lain :

- a. Kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan akses kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (powerlessness), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia (Hamid, 2006).

- b. Kemiskinan juga merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal penting untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup (Slamet, 2004).
- c. Kemiskinan terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah dan minimnya investasi (Sangaji, 2006).
- d. Sesuai karakteristik, secara umum kemiskinan ditandai dengan lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas dalam akses pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1993).

Tabel 3. 16. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase penduduk miskin (tingkat kemiskinan)	2,70%	NA	2,66%	2,72%	97,74%	2,45%	88,98 %

Sumber : Pengolahan Data

Capaian Penduduk Penduduk Miskin tahun 2019 adalah 97,74 % didapat dari realisasi sebesar 2,72 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 2,66%.

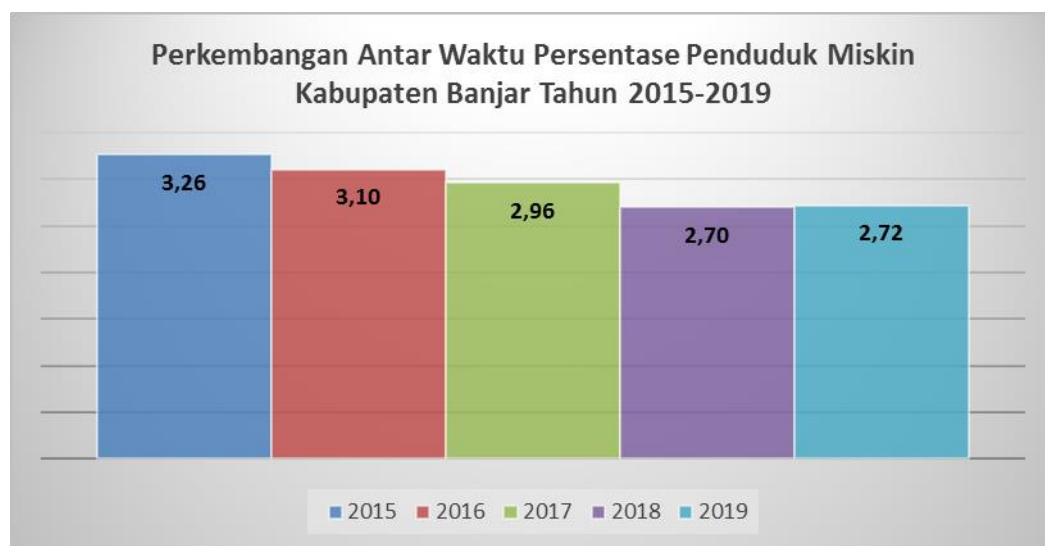
Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 menyumbang sebesar 88,98 % dari target 2,45 % pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 97,74 % masuk dalam capaian kategori Cukup Berhasil.

Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (tahun 2015 -2019), Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 -2018 menunjukkan tren yang baik (menurun), tetapi pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 0,02 poin menjadi 2,72 %. Kenaikan ini diakibatkan terjadinya kenaikan standar garis

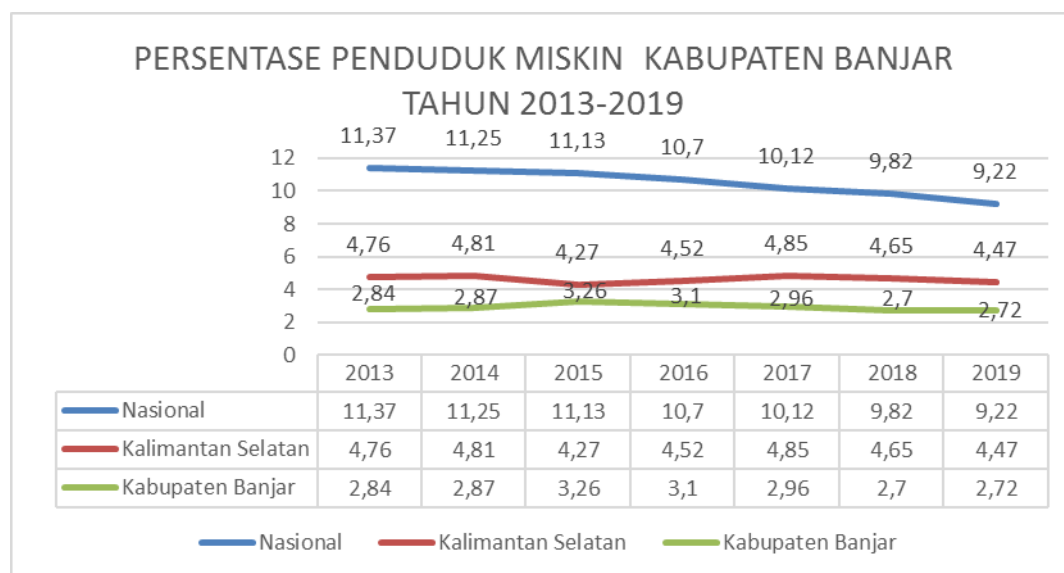
kemiskinan di Kabupaten Banjar dari yang semula sebesar Rp. 400.081,- di tahun 2018 menjadi Rp. 429.422,- di tahun 2019 , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3. 27. Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Gambar 3. 28. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS RI, Data diolah

Dilihat dari Gambar di atas, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar masih jauh berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di angka 4,47% di tahun 2019 dan angka kemiskinan Nasional yaitu 9,22% di tahun 2019.

Gambar 3. 29. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019



Sumber : BPS Kab Banjar

Apabila dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar berada di posisi pertama yang paling rendah dengan jumlah penduduk miskin sebesar 15.914 jiwa atau sebesar 2,72% di tahun 2019, diikuti oleh Kabupaten Tapin dengan Persentase Kemiskinan sebesar 3,41% atau sebesar 6.507 jiwa. Sementara untuk Persentase Kemiskinan yang tertinggi berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 6,5% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 15.398 jiwa.

Sasaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Penduduk Miskin adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, dengan indikator Persentase Penurunan PMKS.
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tabel 3. 17. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase penurunan PMKS	NA	NA	1,91%	1,56%	81,68	2,33	63,67
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,51	NA	75	NA	NA	76	NA

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial diukur dengan indikator **Persentase Penurunan PMKS**.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah masalah yang tidak ada habis-habisnya pada suatu daerah. Keberhasilan cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu ukuran kepedulian dan keberhasilan daerah dalam mensejahterakan penduduknya.

Untuk itu meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengakhiri kemiskinan sesuai dengan tujuan SDG's.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS yaitu Anak Balita Telantar, Anak

Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Telantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Masyarakat (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Komunitas Adat Terpencil.

Capaian Persentase Penurunan PMKS tahun 2019 adalah 81,68 % didapat dari realisasi sebesar 1,56 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,91%.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 menyumbang sebesar 63,67 % dari target 2,45 % pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 81,68 % masuk dalam capaian kategori **Cukup Berhasil**.

Indikator persentase penurunan PMKS ini merupakan indikator baru pada perubahan RPJMD sehingga untuk data tahun tahun sebelumnya tidak tersedia.

2. Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

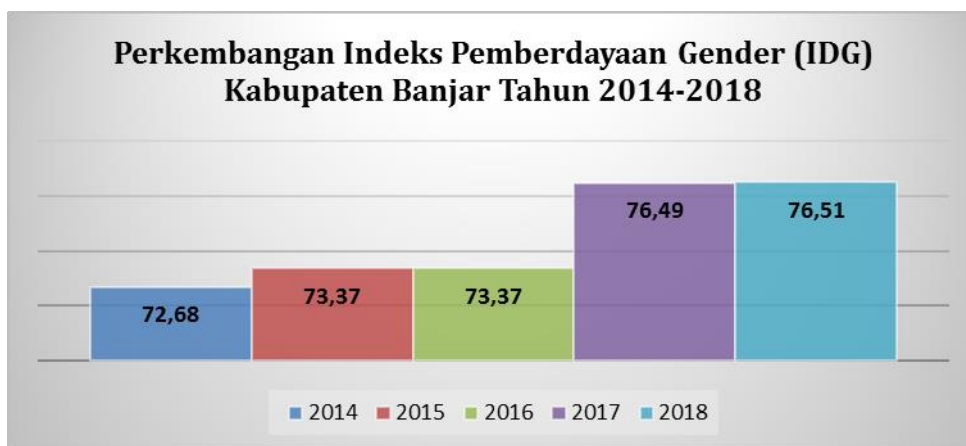
Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG).

Realisasi dan capaian IDG Kabupaten Banjar tahun 2019 belum dapat disajikan pada tabel karena belum tersedia data dari BPS Kabupaten Banjar. Tetapi dilihat dari realisasi tahun 2018 sebesar 76,51 sudah melebihi target pada tahun 2019 yaitu 75 dan target akhir RPJMD dengan target 76.

Perkembangan IDG Kabupaten Banjar pada tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan kondisi yang stabil meningkat, yaitu pada tahun 2014 sebesar 72,68 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 73,37 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 tidak dilakukan pendataan IDG tingkat Kabupaten/Kota, kemudian pada tahun 2017 capaian IDG Kabupaten Banjar naik signifikan

menjadi 76,49 dan tahun 2018 menjadi 76,51, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

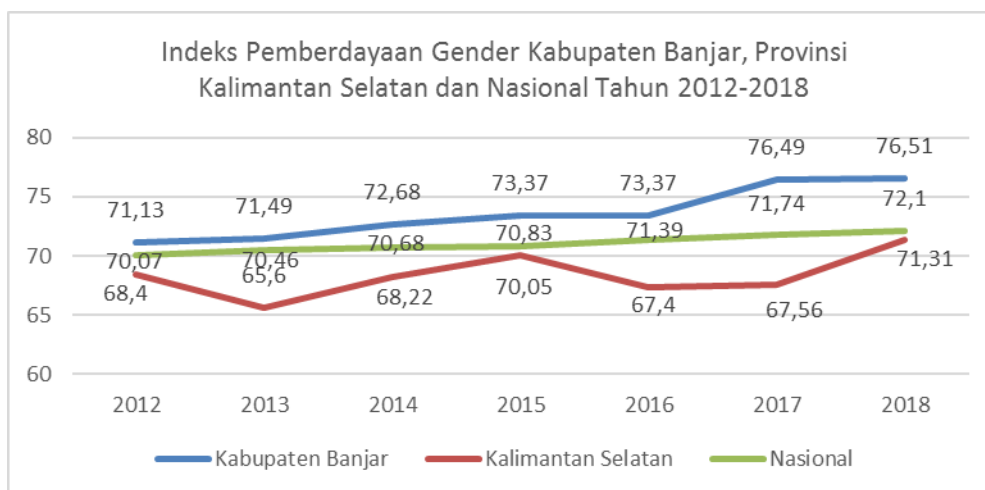
Gambar 3. 30. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Angka IDG Kabupaten Banjar berada diatas angka IDG Nasional dan IDG Provinsi Kalsel yang berfluktuasi. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini

Gambar 3. 31. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2018

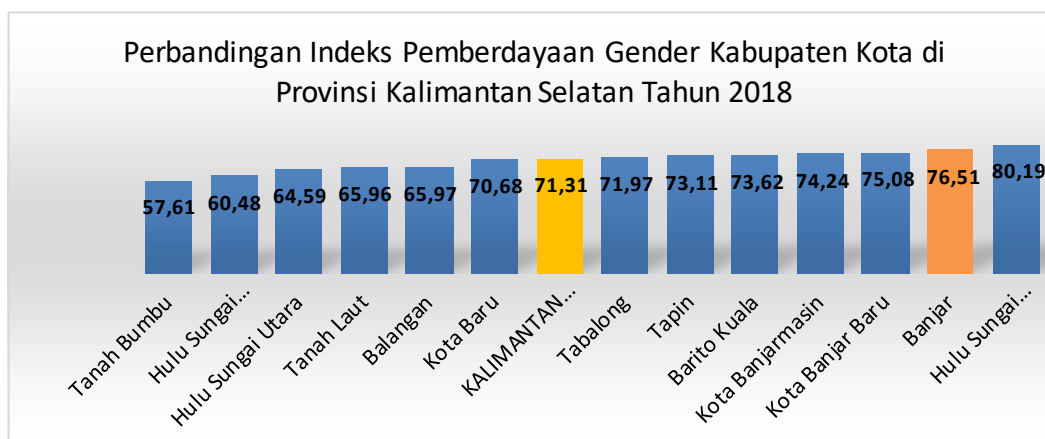


Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, data diolah

Capaian IDG Kabupaten Banjar pada tahun 2018 sebesar 76,51 berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,31 dan Nasional sebesar 71,10. Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. IDG Kabupaten Banjar menempati posisi kedua teratas setelah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3. 32. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2018



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Data diolah

Faktor Pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin :

- 1) Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat.
- 2) Potensi pasar pariwisata alam, budaya dan religius yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan.
- 3) Luasnya wilayah Kabupaten Banjar dengan potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut dan budidaya yang dapat dikembangkan
- 4) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis dan lintas SKPD baik bersumber dari dana pusat, provinsi maupun daerah.

Faktor Penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin:

- 1) Angka kemiskinan di Kabupaten Banjar sudah sangat rendah dan dapat dikategorikan sebagai kemiskinan absolut yaitu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

- 2) Masih belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin sehingga berakibat banyak ditemuinya pemberian/penyaluran program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran

Upaya yang dilakukan:

- 1) Secara berkala melaksanakan updating atau pemutakhiran penduduk miskin yang menjadi sasaran program bantuan sosial agar data menjadi lebih akurat sehingga penerima manfaat lebih tepat sasaran.
- 2) Mensinergikan semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dan mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan kemiskinan baik dari pusat, provinsi dan daerah.
- 3) Membuka Layanan Rujukan Terpadu dalam bentuk SLRT Barokah di Kabupaten Banjar serta mendekatkan layanan pemberian rujukan dan penerimaan aduan dalam bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat Desa.
- 4) Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan secara intensif bagi masyarakat miskin dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) maupun pelatihan dan pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha baik berupa uang maupun dalam bentuk barang melalui program Bantuan Langsung.
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako, maupun Program Indonesia Sehat. Tujuannya agar pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemerataan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3.2.6. Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana

Risiko bencana mulai digunakan oleh Badan Penanggulangan bencana nasional (BPBN) sejak tahun 2013 yang beberapa tahun sebelumnya menggunakan istilah kerawanan bencana. Secara substansi perubahan terminology ini menunjukkan adanya perubahan pada penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks

risiko tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu pertama bahaya, yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam, kedua keterpaparan (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, dan ketiga kapasitas pemerintah, serta komunitas dalam menghadapi bencana dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan (7) pengembangan sistem pemulihan bencana.

Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut, oleh karena itu program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan risiko bencana.

Tujuan menurunnya risiko bencana merupakan penjabaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan menurunnya risiko bencana ini bisa diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana.

Tabel 3. 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Risiko Bencana	176,40	NA	164	176,40	92,44%	158	88.35%

Sumber : Pengolahan Data

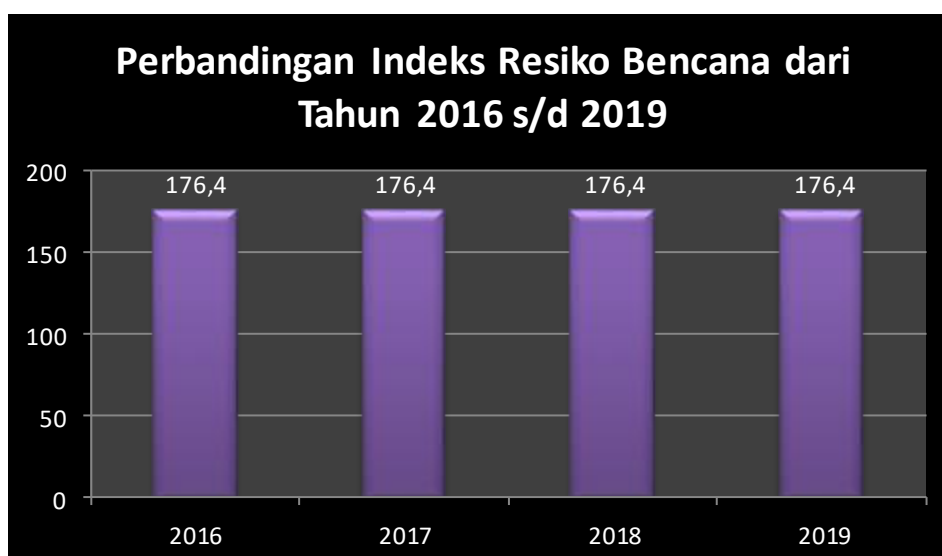
Capaian tujuan menurunnya risiko bencana yang diukur melalui indeks risiko bencana menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 92,44 persen dengan kriteria penilaian cukup berhasil. Begitu juga apabila dihitung berdasarkan target akhir RPJMD maka capaian sampai tahun 2019 baru mencapai 88.35 persen. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka realisasi tahun 2019 sama dengan realisasi tahun 2018, sedang capaian tahun 2018 tidak ada dikarenakan pada tahun 2018 indeks risiko bencana belum menjadi indikator.

Tabel 3. 19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Risiko Bencana	176,40	176,40	176,40	176,40

Sumber : Pengolahan Data

Gambar 3. 33. Perbandingan Indeks Risiko Bencana dari Tahun 2016 s/d 2019



Sumber : Pengolahan Data

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama empat tahun ini indeks risiko bencana Kabupaten banjar tidak mengalami perubahan, yaitu indeks risiko bencana sebesar 176,4 dengan nilai tinggi. Tidak berubahnya nilai indeks risiko bencana ini

dikarenakan kecenderungan nilai kapasitas tidak mengalami perubahan atau konstan.

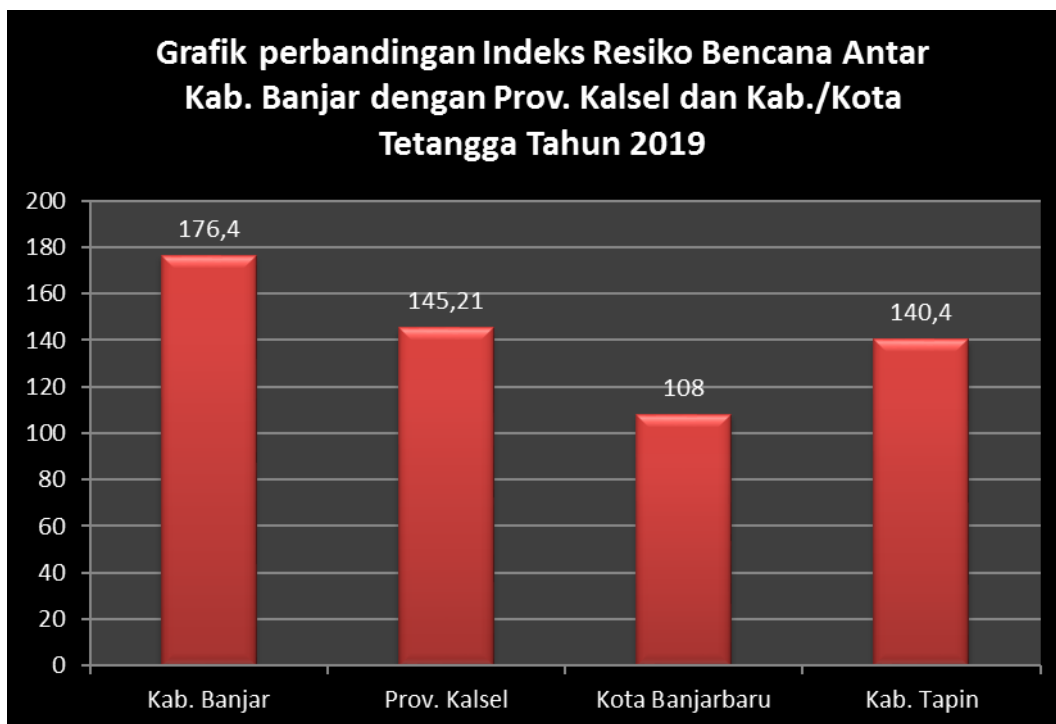
Sedangkan apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten dan kota tetangga sebagaimana tabel dibawah ini menunjukkan bahwa untuk Provinsi Kalimantan Selatan indeks risiko bencana nilainya relatif lebih rendah dengan kategori nilai sedang dan setiap tahun mengalami penurunan. Sedangkan kota Banjarbaru dan Kabupaten Tapin nilainya sedang.

Tabel 3. 20. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana dengan Provinsi Kalimantan Selatan Dan Kabupaten/Kota Tetangga

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Kabupaten Banjar	Prov. Kalsel	Kota Banjarbaru	Kabupaten Tapin
1	Indeks Risiko Bencana	176,40	145,21	108,00	140,40

Sumber : BPS, data diolah

Gambar 3. 34. Grafik perbandingan Indeks Risiko Bencana Antar Kabupaten Banjar dengan Prov. Kalsel dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019.



Sumber : Pengolahan Data

Capaian tujuan menurunnya risiko bencana didukung oleh satu sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu : persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta indikator sasaran persentase penanganan RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 21. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Peningkatan kapasitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha	74,14	107,45	70	77,24	110,34	80	96,55
2	Persentase Penanganan RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	81,2	109,73	20	18,54	92,70	30	61,80

Sumber : Pengolahan Data

Capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu : persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta indikator sasaran persentase penanganan RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) menunjukkan bahwa indikator persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terealisasi 77,24 persen dari target sebesar 70 persen dengan capaian 110,34 persen dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar menunjukkan capaian sebesar 96,55 persen. Sedang apabila dibandingkan tahun 2018 realisasi tahun 2019 lebih tinggi begitu juga capaiannya. Indikator penanganan RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) terealisasi 18,54 persen dari target

sebesar 20 persen dengan capaian 92,70 persen dengan kriteria nilai sangat tinggi, apabila dibanding dengan tahun 2018, realisasi tahun 2018 sebesar 81,20 dengan capaian sebesar 109,73. Perbedaan besaran realisasi tahun 2019 dan 2018 disebabkan perbedaan persepsi/definisi tentang penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2018 besar disebabkan bantuan logistik dimasukkan dalam penanganan RR tersebut selain penanganan infrastrukturnya, sedangkan tahun 2019 penghitungan realisasi penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan infrastruktur. sedangkan apabila dibanding dengan target akhir RPJMD, maka capaian sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 61,80 persen. Penanganan bencana selain diselenggarakan oleh BPBD juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program pengendalian daya rusak air.

Tabel 3. 22. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan daerah	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Desa Tangguh Bencana	4	100	4	4	100	8	50

Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja program pembangunan daerah dengan indikatornya Desa tangguh bencana sebagaimana pada tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasinya sebesar 4 desa atau capaiannya sebesar 100 persen, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dan capaiannya sama yaitu 4 desa dan capaiannya sebesar 100 persen. Sedang apabila dibanding dengan target akhir RPJMD maka capaian sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 50 persen. Keberadaan Desa Tangguh Bencana sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan indeks risiko bencana. Oleh karena itu keberadaan desa tangguh

bencana harus ditindaklanjuti dengan melengkapi sarana dan prasarananya serta peningkatan partisipasi masyarakatnya.

Faktor pendukung

- 1) Ketersediaan buffer stock yang tercukupi.
- 2) Sarana dan Prasarana pada kegiatan pra bencana seperti alat peraga yang berfungsi dengan baik
- 3) Adanya forum koordinasi antar instansi dalam penanganan bencana

Faktor penghambat

- 1) Proses pengajuan yang direkomendasikan untuk bantuan terkendala syarat kelengkapan data.
- 2) Tingkat kesadaran bencana masyarakat masih rendah tentang pembangunan hunian yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek kekuatan dan ketahanan bangunan sehingga bangunan menjadi rawan terhadap bencana.
- 3) Keterbatasan informasi dikarenakan tidak tersedianya jaringan komunikasi di daerah terdampak dan lambatnya pelaporan dari aparat desa yang mengakibatkan terlambatnya penanganan korban bencana

Upaya yang dilakukan

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam proses pengajuan bantuan dana yang tidak direncanakan sumber BPKAD Kabupaten Banjar
- 2) Memfasilitasi operator radio di Kecamatan, baik pelatihan maupun peralatan komunikasi
- 3) Memfasilitasi masyarakat dalam peningkatan mitigasi bencana
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan bencana

3.2.7. Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi

Capaian dari tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah ini diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mengetahui tingkat capaian dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 23. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Laju pertumbuhan ekonomi	5.01	NA	5.31%	5.18%	97.55%	5.43%	95.40%

Sumber : Pengolahan Data

Sebagaimana diketahui bersama, kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut sehingga sedikit saja perubahan yang terjadi (baik itu penurunan/penambahan produksi) maka akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian yang secara umum akan tergambar melalui pertumbuhannya.

Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 3.24. berikut ini:

Tabel 3. 24. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha		2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,99	1,47	4,45	2,94
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,48	4,43	3,13	3,28
C	Industri Pengolahan	5,74	5,87	4,18	4,68
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,84	0,80	7,27	9,23
E	Pengadaan Air	7,70	7,87	4,23	5,41
F	Konstruksi	6,29	5,31	6,03	5,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	6,75	6,91	7,59
H	Transportasi dan Pergudangan	8,41	7,39	6,84	7,20

Kategori Lapangan Usaha		2016	2017	2018*	2019**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,71	6,10	6,66	6,85
J	Informasi dan Komunikasi	8,65	7,94	5,52	7,35
K	Jasa Keuangan	3,69	5,05	1,86	6,68
L	Real Estate	6,35	3,25	4,60	5,29
M,N	Jasa Perusahaan	8,33	7,16	5,03	6,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,04	2,29	3,84	5,22
P	Jasa Pendidikan	6,42	5,52	7,63	6,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,22	5,43	5,56	7,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,73	6,98	7,17	5,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,70	4,66	5,01	5,18

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

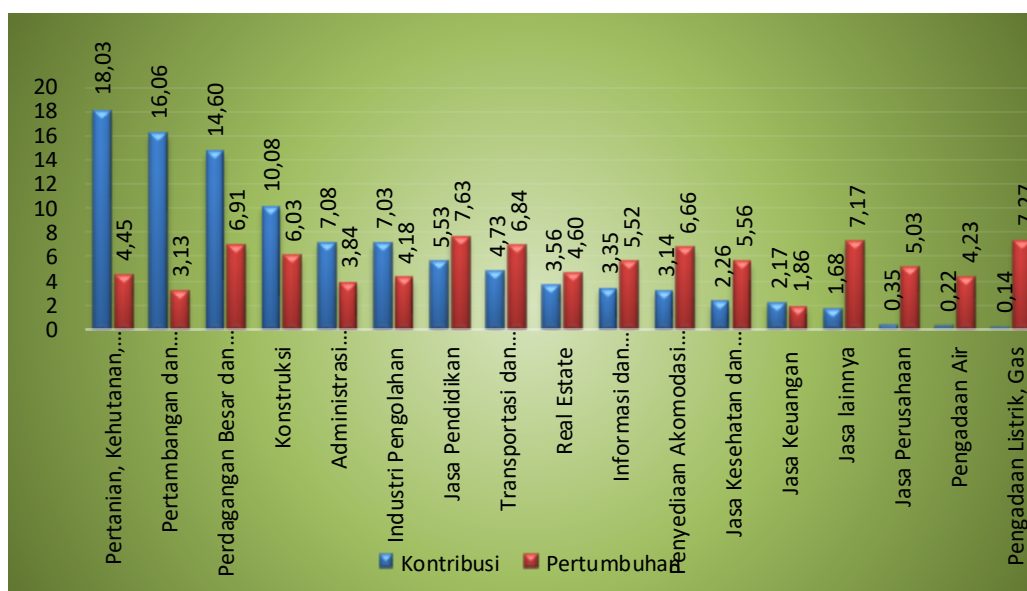
* Angka sementara

** Angka perkiraan

Melambatnya pertumbuhan ekonomi secara total yang terjadi di tahun 2017 dibanding tahun 2016 sebesar 0,04 persen. Angka ini bisa dikatakan merupakan perlambatan yang tidak terlalu besar, karena perlambatan yang terjadi di sektor pertanian akibat kekeringan dan gagal panen ini sedikit banyak dapat tertolong oleh kinerja sektor Pertambangan yang menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Banjar setelah sektor pertanian, dimana komoditi batubara di tahun 2017 mengalami kenaikan produksi dari yang sebelumnya tumbuh negatif 0,48 persen di tahun 2016 menjadi 4,43 persen di tahun 2017 dan 3,13 persen di tahun 2018. Keadaan ini diperkirakan akan terus menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2019 dengan harapan dengan asumsi terjadi kenaikan produksi pada data sementara produksi batubara di tahun 2019 maka diperkirakan pertumbuhan sektor pertambangan akan kembali tumbuh positif di tahun 2019 sehingga secara total akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara total menjadi 5,18 persen di tahun 2019 (dengan asumsi produksi padi di tahun 2019 juga tetap tumbuh positif di tahun 2019 di banding tahun 2018)

Secara agregat, dalam kurun waktu 2016 sampai 2018 perekonomian Kabupaten Banjar menunjukkan kecenderungan tren percepatan dimana Tahun 2016 tumbuh positif sebesar 4,40 persen kemudian tumbuh lebih cepat lagi di Tahun 2016 sebesar 4,70 persen meski sempat sedikit melambat menjadi 4,66 persen di Tahun 2017. Perlambatan yang terjadi di Tahun 2017 tersebut di akibatkan karena melambatnya kategori lapangan usaha menjadi sumber pertumbuhan selama ini yaitu sektor pertanian yang disebabkan penurunan produksi padi pada tahun 2017 sebesar 1,41 persen dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 4,99 persen. Sebagaimana diketahui bersama, kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut sehingga sedikit saja perubahan yang terjadi (baik itu penurunan/penambahan produksi) maka akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian yang secara umum akan tergambar melalui pertumbuhan ekonominya.

Gambar 3. 35. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar, 2018 (Persen)



Sumber : BPS RI

Jika dilihat tren dari besarnya kontribusi dan pertumbuhan setiap kategori lapangan usaha seperti pada Gambar 3.35. maka percepatan pertumbuhan yang terjadi pada kategori

perdagangan dan konstruksi akan perlahan-lahan terus tumbuh signifikan dibandingkan kategori pertambangan dan pertanian sehingga bukan tidak mungkin bila hal ini terus terjadi dalam beberapa waktu kedepan dominasi dari lapangan usaha pertanian dan pertambangan akan tergantikan oleh perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi sering disamaartikan dengan pembangunan ekonomi, tetapi pada dasarnya dua hal itu berbeda pengertiannya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan ada pembangunan ekonomi dimana dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri akan memunculkan pembangunan-pembangunan ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

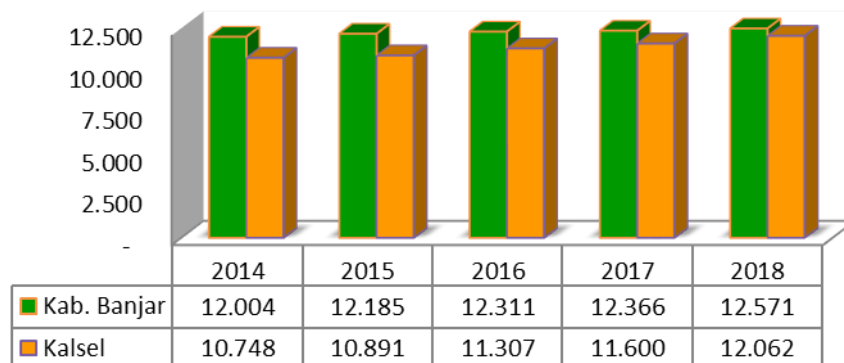
Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang hidup layak merupakan faktor yang penting didalam proses pembangunan, cepat dan lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya sebagai subjek pembangunan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melakukan proses pembangunan.

Indikator ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Gambar 3. 36. Pengeluaran Riil Perkapita Pertahun Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan, 2014 - 2018 (000 rupiah)



Sumber : BPS RI

Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Grafik 3.36. menampilkan pengeluaran riil perkapita pertahun dalam ribuan rupiah. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun tetap mengalami kenaikan. Tahun 2014 pengeluaran riil perkapita sebesar 12.004 ribu rupiah per tahun terus naik hingga menjadi 12.571 rupiah di tahun 2018.

Bila dibandingkan dengan angka provinsi Kalimantan Selatan, dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga 2018, pengeluaran riil perkapita Kabupaten Banjar selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran riil perkapita Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Sumber Daya Alam

Sektor primer adalah sektor yang bertumpu pada sumber daya alam yaitu Pertanian dan Pertambangan. Pada awalnya sektor ini sebenarnya adalah sektor yang menjadi

tumpuan dari perekonomian, namun seiring dengan semakin pesatnya peradaban dan semakin majunya pembangunan suatu daerah maka biasanya peranan kelompok sektor ini akan semakin berkurang tergantikan oleh semakin meningkatnya sektor Tersier yaitu sektor yang lebih banyak menghasilkan jasa/layanan daripada produk berupa barang.

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan terhadap ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi yang semakin lama semakin pesat, mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang awalnya memakai tangan manusia digantikan dengan mesin-mesin canggih yang berdampak pada aspek efisiensi, kuantitas serta kualitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan serta pada akhirnya akan berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi, Kinerja lapangan usaha pertanian yang mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan, khususnya kenaikan produksi tanaman pangan.

Faktor Penghambat

- 1) Karena perlambatan yang terjadi di sektor pertanian akibat kekeringan dan gagal panen
- 2) menurunnya harga karet yang sempat terjadi beberapa waktu lalu karena berkurangnya permintaan dari negara tujuan ekspor karet alam terhadap Kabupaten Banjar. Padahal Industri karet merupakan faktor yang menjadi pengungkit pertumbuhan bagi perkebunan karet yang banyak diusahakan oleh petani karet di Kabupaten Banjar sebagai tiga besar wilayah dengan petani karet terbanyak dan luas areal penanaman terbesar di Kalimantan Selatan (hasil Sensus Pertanian 2013).

Upaya Yang Dilakukan

- 1) Lapangan usaha pertanian, pertambangan dan perdagangan hingga saat ini masih merupakan lapangan usaha yang besar peranannya dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Banjar sehingga untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perhatian pemerintah selayaknya ditujukan pada ketiga lapangan usaha andalan

yang memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian daerah tersebut.

- 2) Subkategori perikanan selaku penyumbang terbesar kedua pada lapangan usaha pertanian, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 32,32 hingga 39,61 persen di tahun 2018. Subkategori Perikanan ini lebih di dominasi pada budidaya ikan tambak yang semakin bergairah semenjak adanya saluran irigasi. Dukungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam subkategori perikanan diangkat menjadi program prioritas daerah di tahun 2020 dengan menitikberatkan pada produksi di hulu dan hilirisasi dengan lokus Martapura Timur.
- 3) Kinerja perdagangan juga terbilang cukup prospektif di Kabupaten Banjar, Meskipun pertumbuhannya menurun namun kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banjar semakin meningkat dari tahun 2014-2018. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 2016 untuk memperluas pasar regional dan internasional yang akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan dengan mengembangkan Kawasan perdagangan dan jasa skala nasional, regional, dan lokal

3.2.8. Indikator Kinerja Utama Indeks Gini

Indikator Indeks Gini untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama di atas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 25. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Gini

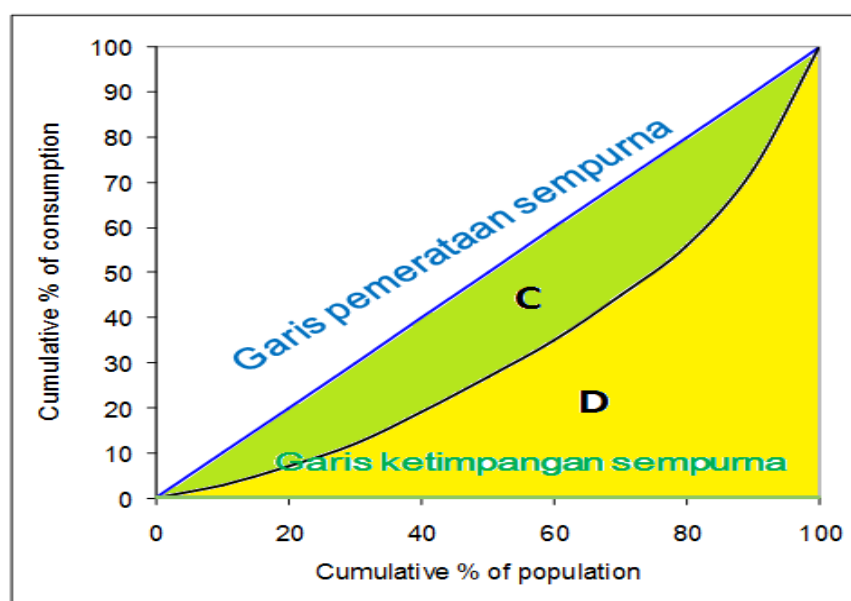
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Gini	0.35	NA	0.34	0.33	102.94%	0.32	96.88%

Sumber : Pengolahan Data

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengukur ketimpangan dengan gini ratio berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Secara grafis hubungan koefisien Gini dengan kurva Lorenz, dapat ditunjukkan pada Gambar 3.37.

Pada gambar tersebut dapat dilihat sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan dan sumbu horisontal menunjukkan persentase jumlah penduduk, sedangkan garis diagonal adalah garis yang menggambarkan pemerataan pendapatan sempurna. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis yang melengkung di bawah garis diagonal. Semakin dekat posisi garis lorenz ke garis diagonal, berarti semakin merata pendapatan. Sebaliknya bila garis Lorenz semakin menjauhi garis diagonal, berarti semakin tidak merata pendapatan yang berarti juga semakin banyak kecenderungan orang miskin di wilayah tersebut.

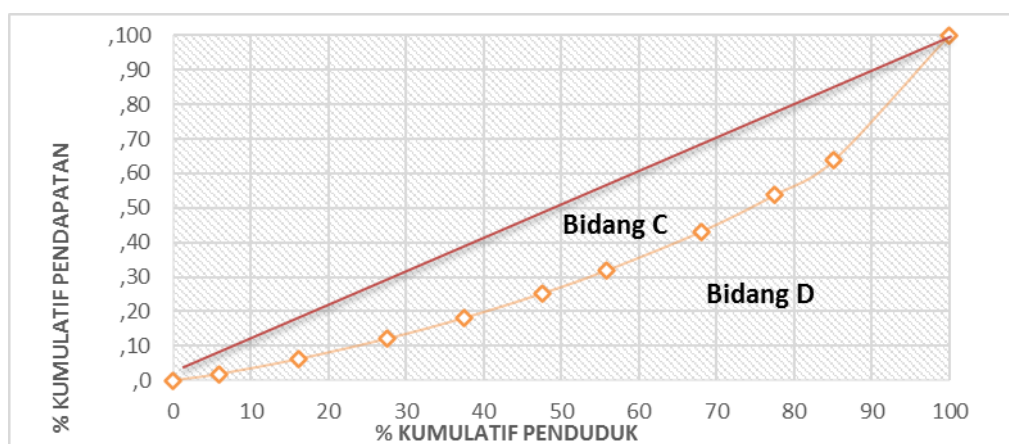
Gambar 3. 37. Kurva Lorenz



Sumber : Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2014-2018, Bappelitbang&BPS

Berdasarkan perhitungan pengeluaran penduduk Kabupaten Banjar maka distribusi pendapatan penduduk dapat digambarkan seperti pada Grafik 3.38. dimana Kurva distribusi pendapatan Kabupaten Banjar digambarkan sebagai garis toska, dan Garis diagonal (warna merah muda) adalah merupakan garis pemerataan sempurna.

Gambar 3. 38. Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2018



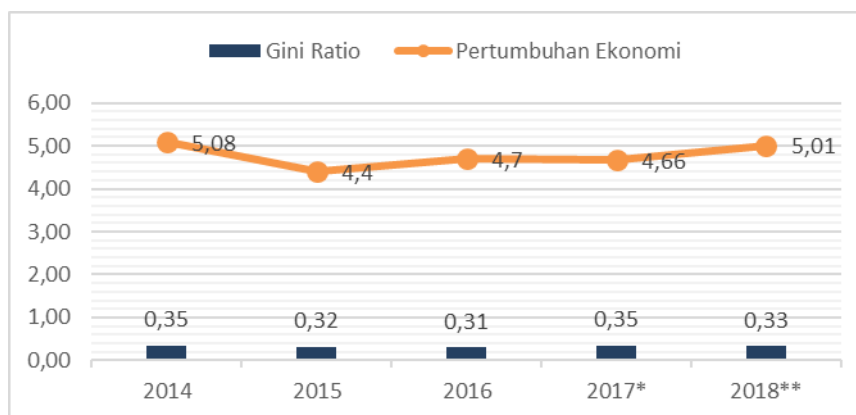
Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan (Bidang C). Jika rasio berkisar antara 0,5–0,7 maka terjadi ketimpangan yang tajam, dan jika rasio berkisar antara 0,2–0,35 maka distribusi pendapatan relatif merata.

Angka Gini Rasio terletak antara 0–1, dan apabila angka ini semakin mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah, tetapi sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Pengelompokan nilai koefisien Gini dibedakan menjadi 5 kelompok :

- GR = 0 : Pemerataan Sempurna
- 0 < GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah
- 0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang
- 0,5 < GR < 1 : Ketimpangan Tinggi
- GR = 1 : Ketimpangan Sempurna

Gambar 3. 39. Perkembangan Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar, 2014-2018



Sumber : Data Diolah dari Data Susenas 2014- 2018

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh relatif cukup baik. Dari tahun 2014-2018, data Gini Ratio Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan sedang yang ditunjukkan oleh angka GR yang berada pada kisaran 0,33 sampai dengan 0,35. Artinya distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar belum merata sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang.

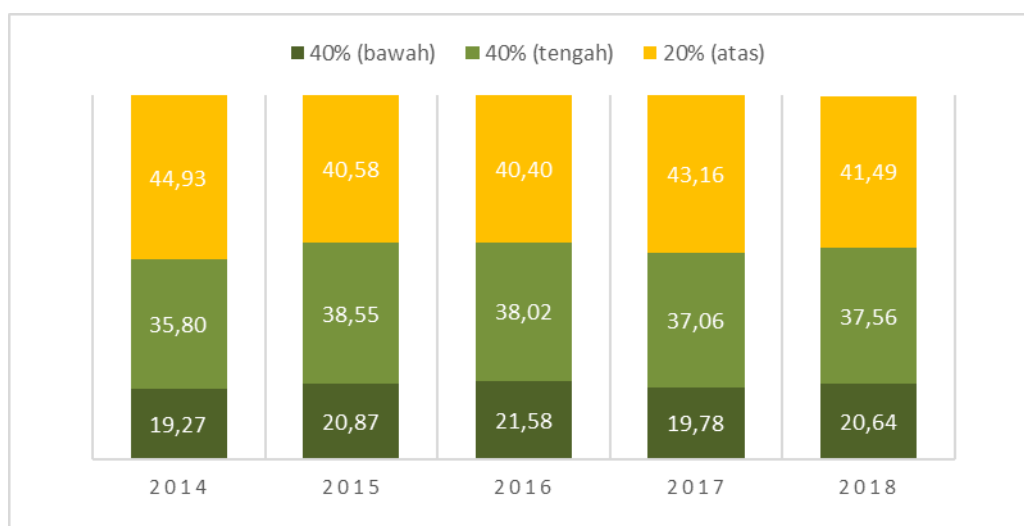
Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan Gini Ratio baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria Bank dunia.

Kriteria Bank Dunia ini, membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yakni 20 % penduduk berpendapatan tinggi, 40 % berpendapatan menengah dan 40 % berpendapatan rendah. Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya, kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah, dan kelompok ketiga adalah bagian dari populasi termiskin.

Relative inequality diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Adapun kriteria *relative inequality* adalah :

1. *High inequality* (distribusi pendapatan sangat timpang/tinggi), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.
2. *Moderate inequality* (ketimpangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.
3. *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

Gambar 3. 40. Distribusi Pendapatan Per kapita Kabupaten Banjar Menurut Kriteria World Bank, Tahun 2014-2018 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Banjar

Secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kabupaten Banjar dari tahun 2014-2018 tergolong relatif rendah atau tidak terlalu timpang (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh kelompok 40 persen dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan diatas 17 persen dari total pendapatan regional penduduk Kabupaten Banjar.

Jika dilihat secara provinsi, distribusi pendapatan penduduk di Propinsi Kalimantan Selatan juga berada pada level *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah) menurut Kriteria Bank Dunia dan level Ketimpangan Sedang menurut Koefisien Gini Ratio.

Tabel 3. 26. Distribusi Pendapatan Per Kapita Menurut Kriteria World Bank dan Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Tahun 2018 (Persen)

Kabupaten/ Kota	Total Pengeluaran			Gini Rasio
	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Selatan	19.84	37.16	43.00	0.34
Tanah Laut	25.57	40.31	34.12	0.23
Kota Baru	19.30	39.57	41.13	0.34
Banjara	20.64	37.87	41.49	0.33
Barito Kuala	20.49	37.03	42.48	0.34
Tapin	22.35	40.51	37.13	0.28
HSS	21.50	37.28	41.21	0.32
HST	21.50	37.18	41.31	0.32
HSU	21.51	36.79	41.70	0.32
Tabalong	21.77	38.50	39.73	0.31
Tanah Bumbu	20.40	37.41	42.19	0.33
Balangan	21.47	38.34	40.19	0.31
Banjarmasin	17.74	37.48	44.78	0.38
Banjarmaru	18.40	37.71	43.89	0.36

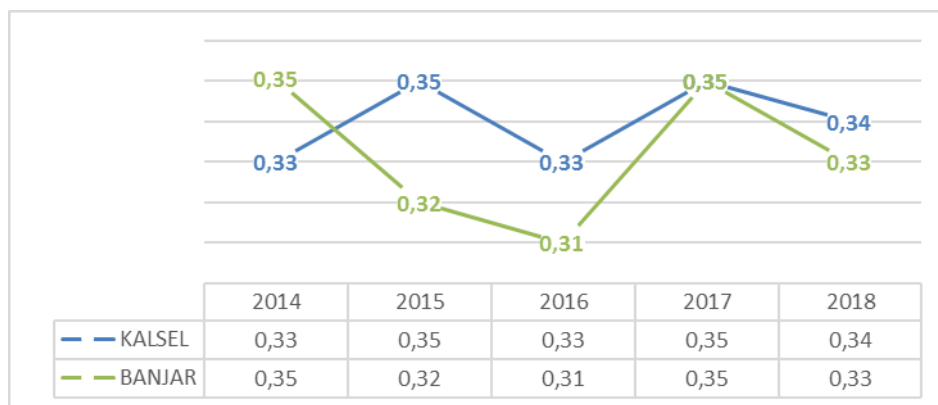
Sumber: BPS Provinsi Kalsel, data diolah dari Susenas 2018

Jika dibandingkan antar Kabupaten/kota, maka distribusi pendapatan perkapita penduduk Kabupaten/kota berada pada level yang sama, yaitu pada level *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah), dimana 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan daerahnya dengan kisaran 17-26 persen.

Dari sisi ketimpangan pendapatan, maka ada satu Kabupaten yang tergolong ketimpangan rendah, yaitu

Kabupaten Tanah Laut (0,23), sementara Kabupaten lainnya berada pada kriteria ketimpangan sedang.

Gambar 3. 41. Perkembangan Gini Rasio Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, Tahun 2014-2018 (Persen)



Sumber : Data Diolah dari Data Susenas 2014-2018

Dibanding dengan angka gini ratio Propinsi Kalimantan Selatan maka secara rata-rata selama lima periode terakhir ini, nilai Gini Ratio Kabupaten Banjar dan Propinsi Kalimantan Selatan berada pada level ketimpangan sedang, yaitu $0,3 \leq GR \leq 0,5$.

Untuk kriteria World Bank, walau berada pada level yang sama yaitu tergolong relatif rendah atau tidak terlalu timpang (low inequality) tetapi angka distribusi pendapatan 40 Persen kelompok pengeluaran terendah ini masih lebih rendah dibanding Propinsi Kalimantan selatan.

Tabel 3. 27. Pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan 40% terbawah

Tahun	Pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan 40% terbawah	
	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar
(1)	(2)	(3)
2014	20,35	19,30
2015	19,53	20,90
2016	20,04	21,60
2017	19,62	19,80
2018	19,84	20,64

Sumber : Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2014-2018, Bappelitbang&BPS

Angka Gini dan World Bank yang berfluktuasi setiap tahunnya ini dapat menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah daerah agar pada tahun berikutnya ketimpangan tidak semakin meningkat hingga berada pada level yang mengkhawatirkan. Ketimpangan yang terjadi ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan aksesibilitas penduduk terhadap sumberdaya alam, serta kualitas sumberdaya manusia. Kedua faktor ini saling berkaitan erat dalam menciptakan peluang kerja dan kesempatan kerja. Sehingga pengelolaan yang baik terhadap kedua faktor ini akan sangat menentukan dalam peningkatan pembangunan suatu daerah yang pada akhirnya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Pendukung :

- 1) Perbedaan aksesibilitas penduduk terhadap sumberdaya alam, serta kualitas sumberdaya manusia. Kedua faktor ini saling berkaitan erat dalam menciptakan peluang kerja dan kesempatan kerja. Sehingga pengelolaan yang baik terhadap kedua faktor ini akan sangat menentukan dalam peningkatan pembangunan suatu daerah yang pada akhirnya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penghambat :

- 1) Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar belum merata sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang
- 2) Tingkat kemiskinan menggambarkan bahwa diantara mereka yang miskin pun masih terjadi kesenjangan pengeluaran walaupun kecil

Upaya Yang Dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan pendapatan, antara lain:

- 1) Menyediakan pendidikan dan kesehatan terjangkau bagi masyarakat miskin merupakan upaya penting untuk menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan *skill/kemampuan* yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga terjadi *multiplier effect* yang dapat menekan angka pengangguran.

- 2) Modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya. Upaya mendorong kesejahteraan petani bisa dilakukan dengan meningkatkan produktifitas pertanian melalui perbaikan bibit, pupuk dan manajemen pertanian.
- 3) Langkah antisipasi terhadap kegiatan ekonomi yang ekstraktif SDA karena berkurangnya deposit bahan tambang demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut perlu pengembangan secara intensif pada sektor ekonomi lainnya guna mengantisipasi penurunan kinerja sektor pertambangan, sehingga perekonomian di Kabupaten Banjar tetap terjamin keberlanjutannya (sustainable)
- 4) Untuk generasi penerus para petani perlu disiapkan area lain, diperlukan *training skill* untuk menyiapkan mereka mengeksplorasi sektor yang memungkinkan pemanfaatan tanah secara lebih produktif, misalnya peternakan, perikanan dan atau industri kecil.

3.2.9. Indikator Kinerja Utama Laju Inflasi

Indikator Laju Inflasi untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama di atas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 28. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Laju Inflasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Laju inflasi	2.63%	NA	3.8%	2.63%	130.79%	3.75%	129.87%

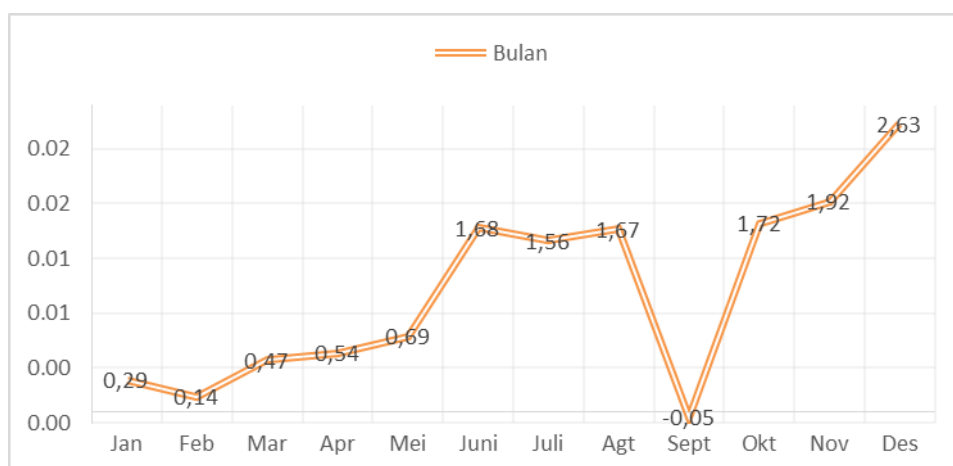
Sumber : Pengolahan Data

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat perubahan harga dari berbagai komoditi (barang dan jasa) yang dibayar oleh konsumen. Sejak

Tahun 2014 angka IHK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota disekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2018, secara umum di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 2,63 persen. Dengan kata lain secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 2,63 persen pada akhir tahun 2018 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2017. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun sebelumnya sebesar 3,82 persen yang berarti kenaikan harga barang-barang lebih kecil dibanding tahun 2017.

Gambar 3. 42. Kumulatif Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2018 (Persen)

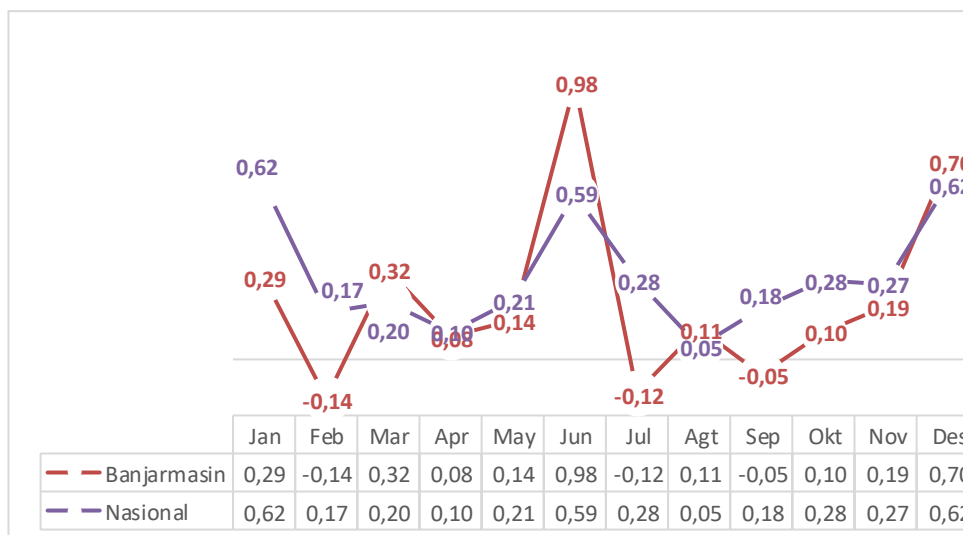


Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Gerakan inflasi bulanan, banyak dipengaruhi oleh momen perayaan hari besar agama, kondisi transportasi serta musim. Momen perayaan hari besar agama dan tahun baru merupakan momen yang merubah komposisi permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasaran. Umumnya pada momen tersebut permintaan terhadap makanan baik bahan makanan maupun makanan jadi dan permintaan sandang, serta transportasi

bertambah tinggi. Untuk faktor musim, biasanya berpengaruh pada harga barang-barang bahan makanan produk pertanian terutama padi dan palawija, sedangkan faktor kondisi transportasi akan mempengaruhi kesinambungan barang-barang yang didatangkan dari luar pulau.

Gambar 3. 43. Inflasi Bulanan Kota Banjarmasin dan Indonesia Tahun 2018 (Persen)



Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Dilihat pada gambar 6.3 inflasi Kota Banjarmasin dan Nasional sebagaimana di sepanjang tahun 2018 mengalami perubahan inflasi maupun deflasi yang beriringan, namun ada beberapa gejolak inflasi. Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu mencapai 0,98 persen. Hal ini merupakan rutinitas tiap tahun dimana salah satu penyebabnya karena adanya peringatan hari Raya Idul Fitri, puasa dan arus mudik yang tinggi. Inflasi tertinggi kedua setelah bulan Juni adalah bulan Desember. Untuk bulan Desember Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,70 persen dan Nasional inflasi sebesar 0,62 persen, hal ini juga merupakan kebiasaan tiap tahunnya terjadi terkait adanya libur Natal dan Tahun Baru. Sedangkan untuk deflasi, deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari (-0,14 persen).

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi tahun kalender 2018 terbesar terjadi pada kelompok sandang yaitu sebesar 5,94 persen. Artinya komoditi sandang mengalami kenaikan harga paling tinggi di antara komoditi lainnya yaitu

sebesar 5,94 persen dibanding tahun 2017. Sedangkan inflasi tahun kalender 2018 yang terkecil terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen, yang berarti kelompok ini mengalami kenaikan harga paling rendah yaitu 0,53 persen dibanding harga pada tahun 2017.

Tabel 3. 29. Laju Inflasi Kota Banjarmasin menurut Kelompok Komoditi, Tahun 2014–2018 (Persen)

Tahun/ Bulan	Kelompok Komoditi								
	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi Dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2014	10,13	8,65	5,15	-0,42	9,76	4,09	7,52	7,16	
2015	4,11	8,42	4,53	6,29	12,65	3,17	-0,15	5,03	
2016	2,07	7,23	0,75	4,49	3,64	3,90	3,80	3,68	
2017	1,11	3,19	7,24	7,37	2,81	0,25	3,97	3,82	
2018	4,76	2,85	1,00	5,94	4,14	1,21	0,53	2,63	
Januari	0,75	-0,01	-0,06	0,60	0,67	0,22	0,47	0,29	

Sumber : Berita Resmi Statistik No.001/01/Th.XXIII tentang Perkembangan IHK/Inflasi Prov. Kalsel, 2018

Faktor Pendukung :

- 1) Naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa
- 2) Ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), biasanya diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Bila kenaikan besarnya permintaan ini tidak diimbangi dengan penambahan volume barang dan jasa di pasar, maka hal ini akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan gaji PNS ini pada dasarnya mengindikasikan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar. Jenis inflasi ini disebut *demand-pull inflation*
- 3) Kenaikan biaya produksi
- 4) Pada waktu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka harga barang-barang di pasar juga akan meningkat. Mengapa? Karena kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi, akibatnya perusahaan juga menaikkan harga jual barang dan jasanya. Disini terjadi *cost-push inflation*.
- 5) Defisit anggaran belanja (APBN)

- 6) Defisit APBN yang ditutup dengan percetakan uang baru oleh Bank Indonesia, akan berakibat pada bertambahnya jumlah uang beredar, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.
- 7) Menurunnya nilai tukar rupiah
Menurunnya nilai tukar terhadap valuta asing, seperti US dollar, Yen, Deutsche Mark, akan berdampak pada semakin mahalnya barang-barang produksi impor. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi.

Faktor Penghambat :

Kebalikan dari faktor pendorong adalah faktor penahan inflasi, faktor-faktor inilah yang mampu menahan inflasi jangan sampai melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga, antara lain angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, telepon seluler dan televisi berwarna. Komoditas ini merupakan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar kecuali angkutan udara masuk ke kelompok transportasi dan komunikasi.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah :

- 1) Menjaga keserasian antara laju penambahan uang beredar dengan laju pertumbuhan barang dan jasa. Penambahan jumlah uang beredar harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pertumbuhan penawaran barang dan jasa. Di samping itu, jumlah uang beredar senantiasa harus dipantau dan dikendalikan. Beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah (Bank Indonesia guna mengendalikan jumlah uang beredar adalah: Politik operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*);
- 2) Politik diskonto dan bunga pinjaman; serta Politik mengubah cadangan minimal bank-bank umum pada Bank Indonesia. Selain itu perlu dilakukan pengawasan pinjaman secara selektif maupun Pembujukan moral (*moral suation*).
- 3) Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Nilai tukar rupiah yang cenderung merosot terhadap mata uang asing, akan mendorong laju inflasi. Mengapa? Sebab negara kita masih banyak mengimpor barang-barang modal dan juga bahan baku produksi. Jika mata uang rupiah merosot, maka harga barang-barang impor untuk kebutuhan produksi menjadi lebih

mahal. Hal ini berarti akan menaikkan biaya produksi, yang selanjutnya akan menaikkan harga barang dan jasa di pasar.

- 4) Melakukan intervensi pasar. Pada masa-masa tertentu dapat terjadi lonjakan terhadap permintaan barang-barang di pasar, seperti menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus, karena dapat menyulut kenaikan harga barang-barang pada umumnya. Kenaikan harga barang-barang secara temporer memang tidak dapat disebut inflasi

Tabel 3. 30. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian	2.05%	1.93%	94.15%	3.01%	64.12%
2	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	5.04%	5.31%	105.36%	5.7%	93.16%
3	Pertumbuhan omzet koperasi	4%	5.62%	140.50%	4%	140.50%
4	Pertumbuhan omzet usaha mikro	5.2%	7.78%	149.62%	5.2%	149.62%
5	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	7.1%	7.59%	106.90%	7.6%	99.87%
6	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan	6.1%	4.68%	76.72%	6.5%	72.00%
7	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6.51%	6.58%	101.08%	6.74%	97.63%
8	Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA)	1%	0.6%	60.00%	1%	60.00%

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju

dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Selain itu data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun.

Adapun cara perhitungannya dengan dasar harga konstan dapat dilihat sebagai berikut :

$$g = \frac{PDRB_{Sektor\ t} - PDRB_{Sektor\ t-1}}{PDRB_{Sektor\ t-1}} \times 100$$

Dimana :

- g = pertumbuhan sektor
- PDRB sektor t = PDRB Sektor pada tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya
- PDRB Sektor t-1 = PDRB Sektor pada tahun sebelumnya

Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah, indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah :

a. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian

a. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Banjar di tentukan oleh 2 (dua) hal yaitu :

- 1) Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan

Tanaman pangan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, dll), serta tanaman serelia lainnya.

Wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

2) Pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan

Tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman.

Faktor Pendorong :

Dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor pertanian tersebut didorong beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai kelas kelompok tani yang menandakan tingkat adopsi dan inovasi petani dalam mengelola pertanian meningkat. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung meningkatnya luas tanam tanaman pangan terutama komoditas padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Banjar.
2. Meningkatnya peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar yang didukung oleh kemampuan penyuluh sebagai : (a) penyebarluasan informasi; (b) membuat petani mampu berusaha tani dalam upaya peningkatan produksi; (c) perubahan perilaku yang berhubungan dengan keterampilan dan sikap petani dengan tujuan mampu melakukan perubahan usaha tani mereka.

Faktor Penghambat :

Dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor pertanian tersebut mempunyai beberapa hambatan sebagai berikut :

1. Dampak perubahan iklim, permukaan air di persawahan lahan lebak pada waktu musim tanam MK 2019 (periode Ap-Sep 2019) masih tinggi, sehingga jadwal tanam yang seharusnya dilaksanakan pada bulan April atau Mei mengalami pergeseran menjadi bulan Juni atau Juli. Pada saat itu anakan padi di persemaian (lacakan) sudah berumur tua dan masuk ke fase generatif, sehingga pada saat tanam di lahan sawah jumlah anakan padi tidak bertambah lagi (jumlah anakan kurang dari anakan normal). Datangnya musim kemarau yang cukup panjang, mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan, jumlah bulir permalai sedikit dan tingkat kehampaan gabah tinggi. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun dan pada akhirnya produksi menurun.
2. selain itu, musim hujan yang panjang pada awal musim tanam MH 2019/2020 (Oktober-Maret) menyebabkan permukaan air di lahan sawah cukup tinggi dalam waktu cukup lama sehingga petani memundurkan jadwal tanamnya. Pemunduran jadwal tanam menyebabkan petani yang biasanya menanam padi dua kali setahun (unggul-unggul ataupun unggul-lokal) hanya dapat menanam satu kali setahun.
3. sebagian kecamatan di Kabupaten Banjar terkena serangan tikus, WBC dan tungro membuat tanaman kerdil, menguning, anakan sedikit dan gabah hampa mengakibatkan produktivitas menurun dan pada akhirnya produksi menurun.
4. untuk komoditas jagung hanya terdapat bantuan berupa bibit, sehingga pemeliharaan usaha tani jagung kurang intensif oleh petani.
5. belum optimalnya minat petani untuk melaksanakan usaha tani kedelai karena dilihat dari kegiatan pemeliharaan dan pasca panen harus intensif dari petani.
6. produktivitas komoditas jeruk mengalami penurunan karena sebagian besar umur tanaman sudah tua dan

memerlukan peremajaan. Sementara tanaman baru yang mulai menghasilkan baru sedikit produksinya.

7. produksi dan produktivitas komoditas pisang mengalami penurunan karena luas tanam berkurang pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Dimana populasi tanam tahun 2018 sebanyak 242.834 pohon menjadi 87.843 pohon ditahun 2019. Selain itu, kurangnya minat petani menanam komoditas pisang karena tanaman pisang masih rentan terserang penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Dimana penyakit tersebut juga menyebabkan produksi dan produktivitas pisang di Kabupaten Banjar menurun.

Upaya yang di lakukan dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor pertanian tersebut adalah sebagai berikut : Meningkatkan luas tanam/panen tanaman pangan dan hortikultura :

- a. Untuk meningkatkan luas tanam melalui indeks pertanaman (IP) maka dilaksanakan kegiatan optimasi lahan rawa (SERASI).
- b. Pendampingan pelaksanaan UPSUS PAJALE dan inovasi BANJARSAPA

Dengan rencana tindak lanjut yang akan datang :

1. Intensifikasi pertanian dinilai dapat meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan rawa melalui kegiatan SERASI (selamatkan rawa sejahterakan petani) dengan tujuan peningkatan IP 100 menjadi IP 180 atau 200 dari satu kali tanam menjadi 2 kali tanam (unggul-unggul atau unggul-lokal) dan meningkatkan produktivitas padi.
2. pencapaian produksi juga dilakukan melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air dan jalan pertanian dengan sumber dana APBN dan DAK. Penyediaan sarana pengelolaan air dilakukan dengan membangun fasilitas sumber air yaitu pembangunan irigasi air tanah (dalam/dangkal), pembangunan embung, tabat/dam parit dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim. Pembangunan/ perbaikan jalan pertanian yaitu jalan usaha tani dan jalan produksi ditujukan untuk

- pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasa.
3. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, penyediaan bibit, penyaluran pupuk bersubsidi, fasilitasi akses pembiayaan/ permodalan dan fasilitasi mekanisasi pertanian. Selain itu juga dalam rangka peningkatan produk hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan.
 4. peningkatan kapasitas penyuluhan dan penguatan kelembagaan penyuluhan juga dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi karena penyuluhan merupakan kunci untuk perubahan, penyebar inovasi pertanian dan motivasi bagi petani yang selama ini bertani karena naluri dan tuntutan keluarga, agar dapat berubah untuk berusaha tani dengan berorientasi pasar (agribisnis).

Adapun foto kegiatan yang mendukung mencapai sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar :



Gambar 3. 44. Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar pertumbuhan sub sektor tanaman pangan



Gambar 3. 45. Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan

b. Pertumbuhan PDRB sektor peternakan

Peranan sektor Peternakan sangat penting dalam memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Peranan sektor peternakan adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, dan menyediakan lapangan kerja.

Kesejahteraan peternak tergantung pada tingkat pendapatan dan keuntungan yang didapat dari sektor peternakan itu sendiri, karena sektor peternakan merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis peternakan yaitu agribisnis dan agroindustri .

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai. Hal ini didasarkan ada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian

khususnya dibidang peternakan yang sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang peternakan. Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui pendapatan dari sektor peternakan baik hasil produksi peternakan serta kelembagaan petani.

Faktor Pendorong :

Dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor peternakan tersebut didorong beberapa hal sebagai berikut :

1. Potensi sumber daya lahan yang potensial untuk dikembangkan untuk wilayah perkebunan, dengan luas lahan yang memadai serta kondisi alam yang sangat menguntungkan maka perkebunan merupakan subsektor andalan di Kabupaten Banjar.
2. Dukungan sumber daya manusia peternakan dan perkebunan serta kelembagaan
3. Teknologi peternakan yang semakin variatif, terjangkau dan aplikatif.
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat, pemerintah, instansi dan stakeholder lainnya
5. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat secara periodik pada tempat/lokasi yang telah ditentukan.
6. Penambahan tenaga teknis untuk memenuhi kekurangan tenaga dilapangan belum terpenuhi agar pelayanan kesehatan hewan di masyarakat dapat lebih optimal.
7. Perlu adanya perluasan/ penambahan lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
8. Perlunya penambahan aliran irigasi perpompaan guna ketersediaan air.
9. Perlunya penambahan anggaran pemeriksaan sampel sehingga dapat dilaksanakan pengambilan disetiap pasar dan secara rutin untuk keberlanjutan pemantauan produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
10. Perlunya peran serta stakeholder terkait seperti penyuluh setempat untuk dapat ikut menangani kegiatan pemantauan hewan qurban di wilayah Kecamatan Kabupaten Banjar.
11. Terpenuhinya sarana prasarana safety (K3) untuk para petugas lapangan.

Faktor Penghambat :

Dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor peternakan tersebut mempunyai beberapa hambatan sebagai berikut :

1. Masih lemahnya sumberdaya peternak dan belum semua peternak menguasai ilmu dan teori budidaya yang baik dan benar.
2. Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi menuju kemandirian dan pengelolaan berkelanjutan.
3. Luasnya jangkauan wilayah pengobatan sehingga kapasitas layanan masih terbatas.
4. Keterbatasan tenaga medik dan paramedik.
5. Ketersediaan lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang masih kurang.
6. Kurangnya ketersediaan air pada saat musim kemarau.
7. Terbatasnya anggaran Pemeriksaan sampel cemaran mikroba dan PCR sehingga pengambilan sampel di pasar tidak dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
8. Terbatasnya petugas teknis peternakan dalam menangani pemantauan hewan qurban di setiap wilayah kecamatan sehingga ada wilayah kecamatan yang tidak terpantau saat pelaksanaan hewan qurban.
9. Belum adanya petugas “ Bucher “ untuk penyiangan (*parting*) daging Sapi/Kerbau, sehingga bisa mengurangi pengeluaran jagal dan daging yang dihasilkan lebih ASUH.

Upaya yang dilakukan :

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor peternakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan ternak perlu dilakukan terus dan perbaikan mutu genetik ternak baik melalui kawin suntik maupun kawin alam, memilih induk dan pejantan yang baik dan unggul selalu ditingkatkan sehingga pertumbuhan ternak akan lebih cepat yang pada akhirnya berpengaruh pada bobot akhir.
2. Untuk menekan pemotongan ternak besar, perlu di masyarakatkan keanekaragaman protein hewani dengan memakan selain daging ternak besar seperti unggas, telur dan ikan, hal ini bisa mendorong untuk tumbuh kembangnya ternak ternak yang lain.

3. Dibidang permodalan pemerintah telah memberikan pembinaan dan paket baik untuk ternak besar, kecil maupun unggas, Pembinaan penanaman rumput unggul terus ditingkatkan hal ini untuk memperbaiki kualitas pakan ternak yang ada.
4. Perawatan ternak dan menjaga kesehatan melalui kegiatan vaksinasi dijaga bila perlu ditingkatkan pemeriksaan kesehatan dan pengelolaan karena hanya ternak yang sehat yang baik pertumbuhannya.
5. Perbaikan sumber daya manusia melalui pembinaan kelompok, study banding dan pelatihan-pelatihan teknis perlu ditingkatkan
6. Pelaku usaha perlu penambahan modal baik lewat swasta maupun pemerintah untuk memperbesar usahanya.

Dengan rencana tindak lanjut yang akan datang :

1. Menerima kerjasama/bantuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berupa obat-obatan, penyediaan straw dan N2 cair serta kegiatan pelayanan kesehatan hewan.
2. Peningkatan dan pengembangan ternak melalui program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) yang bekerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Veteriner Kalimantan. Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).
3. Mencoba mengusulkan penampungan limbah dan penampungan air bersih RPH/RPU agar pelayan dan moto dari hasil pemotongan tersebut lebih optimal.
4. Mengoptimalkan pelayan klinik hewan.



Peresmian Klinik Hewan oleh
Bapak Kepala Dinas Peternakan
dan Perkebunan

Gambar 3. 46. Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

b. Pertumbuhan PDRB sektor perikanan

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan dimana nilai PDRB sektor perikanan atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar Rp 713.155,26 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 677.209,13 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5.31 %. dibandingkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 5.04 % maka diperoleh capaian sebesar 105.36%.

Keberhasilan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan ditandai dengan pada tahun 2019 ini jumlah produksi ikan budidaya diperoleh hasil 58.015 ton dengan capaian 90,67 % dari target 63.985 ton. Jumlah produksi Ikan tangkap diperoleh hasil 8.664 ton dengan capaian 86,21 % dari target 10.050 ton, Jumlah produksi olahan hasil perikanan diperoleh hasil 824,32 ton dengan 113,00 % dari target 730 ton dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum sumber daya perikanan dengan persentasi kepatuhan 70% dengan capaian 86.42 % dari target 81 %.

Faktor Pendorong :

Dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor perikanan tersebut didorong beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan jumlah pelaku usaha bidang perikanan budidaya, tangkap, pengolah
- 2) peningkatan jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi CBIB, CPPIB, CPIB
- 3) menurunnya jumlah pelaku *illegal fishing*
- 4) adanya diversifikasi produk olahan
- 5) Adanya gemar ikan
- 6) Adanya diversifikasi teknik budidaya ikan yang ramah lingkungan

Faktor Penghambat :

Dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor perikanan tersebut mempunyai beberapa hambatan sebagai berikut :

- 1) Adanya larangan alat tangkap
- 2) mekanisme prosedur dan pemberian bantuan hibah yang masih memiliki persyaratan yang kompleks
- 3) perilaku dan manajemen pelaku usaha perikanan masih bersifat tradisional
- 4) keseriusan pemerintah Kabupaten Banjar dalam menetapkan sektor perikanan sebagai sektor unggulan
- 5) sektor perikanan rendah alokasi pembiayaan
- 6) terbatasnya SDM penyuluh
- 7) Pembangunan sektor perikanan belum didukung sektor lain, seperti sektor ekonomi kreatif perijinan dan investasi, konektivitas dan aksesibilitas, energy dan Sumber daya Air.

Upaya yang dilakukan :

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor perikanan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan Volume satuan indikator program dengan indikator Kinerja Utama untuk penyesuan
- 2) Meningkatkan pertumbuhan usaha perikanan baik nelayan, budidaya dan pengolah.
- 3) Merubah perilaku masyarakat perikanan baik budidaya, nelayan, pengolah menjadi lebih baik.

Dengan rencana tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Membuat siklus pengusahaan sektor perikanan
- 2) Menjaga stabilitas harga produk perikanan
- 3) Mengoptimalkan pengasawan perikanan
- 4) Meningkatkan pembinaan perilaku usaha perikanan melalui pengawasan, legalitas usaha, kesehatan dan lingkungan.



Gambar 3. 47. Kegiatan untuk mendukung mencapai sasaran Strategis meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2. Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah, indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah :

a. Pertumbuhan omzet koperasi

Omzet koperasi adalah jumlah omzet seluruh koperasi. Perhitungan pertumbuhan omzet koperasi adalah jumlah omzet tahun berjalan - jumlah omzet tahun sebelumnya) : jumlah omzet tahun sebelumnya) x 100 %. Omzet koperasi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 77.024.700.745 dan omzet koperasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 81.356.909.560 Sehingga pertumbuhan omzet usaha mikro pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,62% dengan capaian sebesar 140,5%.

Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Rp.}81.356.909.560 - \text{Rp.}77.024.700.745)}{\text{Rp.}77.024.700.745} \times 100 = 5,62$$

Keberhasilan pertumbuhan omzet koperasi ditandai dengan tumbuhnya koperasi aktif di Kabupaten Banjar. Pada Tahun 2019 koperasi aktif berhasil tumbuh sebesar 1,12% dengan target angka pertumbuhan koperasi aktif sebesar 1 %. Capaian tersebut didapat melalui pertumbuhan persentase koperasi aktif pada Tahun 2018 64,20% dan pada Tahun 2019 sebesar 64,92%. Pada Tahun 2019 terdapat 161 Koperasi aktif yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Banjar. Selain hal tersebut diatas juga adanya daya saing usaha koperasi yang meningkat, adanya dukungan regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi dan yang teanyar adalah adanya gerakan reformasi total koperasi yang pada dasarnya mengembalikan koperasi pada format yang sebenarnya yaitu kebersamaan, gotong royong dan kesadaran berpribadi.

Faktor Pendorong :

- 1) Dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sektor usaha
- 2) Meningkatnya penguatan kapasitas manajerial usaha mikro
- 3) Dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lainnya)
- 4) Meningkatnya daya saing usaha koperasi
- 5) Dukungan regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi
- 6) Adanya gerakan reformasi total koperasi yang pada dasarnya mengembalikan koperasi pada format yang sebenarnya yaitu kebersamaan, gotong royong dan kesadaran berpribadi.

Faktor Penghambat :

- 1) Belum optimalnya pelaku usaha mikro dan koperasi dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah;
- 2) Kurangnya penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.

Upaya yang dilakukan :

- 1) Mengoptimalkan berbagai kebijakan dari Pemerintah dan peningkatan akses permodalan untuk pelaku usaha mikro dan koperasi;

- 2) Meningkatkan penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.



Gambar 3. 48. Kegiatan Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM



Gambar 3. 49. Kegiatan pelatihan kewirausahaan

b. Pertumbuhan omzet usaha mikro

Definisi operasional omzet usaha mikro adalah jumlah omzet usaha mikro yang terdata. Formulasi pertumbuhan omzet usaha mikro adalah $(\text{jumlah omzet tahun berjalan} - \text{jumlah omzet tahun sebelumnya}) : \text{jumlah omzet tahun sebelumnya} \times 100$. Target pertumbuhan omzet usaha mikro tahun 2019 yang telah ditetapkan adalah 5,2%.

Jumlah pelaku usaha mikro yang terdata pada tahun 2018 sebanyak 10.184 pelaku dan memiliki omzet usaha sebesar Rp. 762.881.753.112. adapun jumlah pelaku usaha mikro yang terdata pada tahun 2019 sebanyak 11.140 pelaku dan memiliki omzet usaha sebesar Rp.822.177.290.340. Sehingga omzet usaha mikro yang tumbuh pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,8% dengan capaian sebesar 150%.

Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Rp.822.177.290.340} - \text{Rp.762.881.753.112})}{\text{Rp.762.881.753.112}} \times 100 = 7,8$$

Keberhasilan pertumbuhan omzet usaha mikro merupakan hasil kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan usaha mikro yang berdaya saing diantaranya usaha mikro yang mengakses perbankan serta dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lainnya). Pada Tahun 2019 Kabupaten Banjar menempuh beberapa kegiatan seperti sosialisasi dukungan informasi permodalan, pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM, pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, sehingga jumlah usaha mikro yang mengakses perbankan melonjak sebanyak 7563 UM

c. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Potret dari struktur perekonomian Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki kontribusi terbesar ketiga setelah kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan dengan total kontribusi sebesar 14,60 persen di tahun 2018. Besarnya postur perdagangan ini turut didorong oleh aktivitas yang terjadi di kategori pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Kategori ini terdiri dari dua subkategori yaitu perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasi serta perdagangan besar dan eceran. Dari besarnya share PDRB kategori lapangan usaha perdagangan, tampak bahwa nilai tambah yang tercipta di perdagangan, didominasi oleh usaha perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, yang menyumbang PDRB kategori lapangan usaha perdagangan lebih dari 89 persen setiap tahunnya.

Sedangkan sumbangan dari sub kategori perdagangan mobil, motor, dan reparasinya berada di kisaran 11 persen. Kontribusi kategori lapangan usaha perdagangan semakin menunjukkan peningkatan yang berarti dengan prospek yang cerah sehingga diperkirakan perlahan lahan akan menggerus dua lapangan usaha terbesar di atasnya yaitu pertanian dan pertambangan. Besarnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Banjar tersebut terdorong karena aktifitas niaga ekspor komoditas penting seperti batubara, kelapa sawit, dan karet. Selain itu, perdagangan di Kabupaten Banjar juga didorong oleh aktifnya kegiatan di kategori lapangan usaha konstruksi. Kontribusi diperkirakan akan meningkat di tahun 2018 sebesar 14,57 persen karena pengaruh peningkatan kinerja produksi di pertanian dan pertambangan.

Tabel 3. 31. Kontribusi Per Sub kategori Perdagangan Terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)

Sub Kategori Lapangan Usaha		2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		100	100	100	100
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	11,60	11,44	10,90	10,71
2	Perdagangan Besar dan Eceran	88,40	88,56	89,10	89,29

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019

* Angka sementara

** Angka perkiraan

Dari besarnya share PDRB kategori lapangan usaha perdagangan, tampak bahwa PDRB yang tercipta di perdagangan didominasi oleh usaha perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) yang menyumbang PDRB kategori lapangan usaha perdagangan mencapai 89,10 persen pada tahun 2018 dan diperkirakan meningkat di tahun 2019 menjadi 89,29 persen.

Kinerja perdagangan Kabupaten Banjar dapat dikatakan sangat prospektif. Di dalam perekonomian yang terjadi di Kabupaten Banjar, kategori lapangan usaha perdagangan masih bertahan dengan menunjukkan pertumbuhan yang tinggi di atas

kisaran tujuh persen setiap tahunnya, tren dari pertumbuhan perdagangan sangat bergantung kinerja lapangan usaha komoditas yang diperdagangkan yang bersumber dari sektor pertambangan dan pertanian.

Gambar 3. 50. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)



d. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan

Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan yang didapat dari nilai PDRB sektor industri atas dasar harga konstan tahun N dikurang tahun sebelumnya (N-1) dibagi nilai PDRB tahun (N-1) dikali 100 persen. PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 4,68%, menunjukkan sektor.

Tabel 3. 32. Kontribusi Per Sub kategori Perdagangan Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan

No	Sub Kategori PDRB	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
A	Industri Pengolahan	5.74	5.87	4.18	4.68
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas				
2	Industri Makanan dan Minuman	7.27	6.00	3.30	5.28
3	Pengolahan Tembakau				
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	5.46	7.91	8.43	5.76
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki				
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.91	1.51	3.26	1.87

No	Sub Kategori PDRB	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.94	1.17	3.95	3.50
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.90	3.50	1.16	3.58
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.53	7.29	6.95	4.06
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0.60	1.51	2.88	1.69
11	Industri Logam Dasar				
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.42	2.30	1.14	2.09
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	2.06	1.51	3.77	2.57
14	Industri Alat Angkutan	2.37	6.13	(4.65)	1.29
15	Industri Furnitur	3.52	3.14	4.74	3.55
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	3.30	7.31	2.43	3.15

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019

Kategori lapangan usaha industri pengolahan dalam PDRB dengan tahun dasar 2010 dibagi kedalam 16 Subkategori lapangan usaha. Subkategori lapangan usaha yang mendominasi kinerja industri pengolahan di Kabupaten Banjar adalah industri makanan dan minuman. Kontribusi industri makanan dan minuman rata-rata selama tahun 2016 hingga 2018 mencapai lebih dari 60 persen dari total industri pengolahan secara keseluruhan di Kabupaten Banjar. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pun cukup stabil di kisaran rata-rata 5,52 persen selama tahun 2016 hingga tahun 2018 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,28 persen pada tahun 2019. Subkategori lapangan usaha ini dirasa cukup menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten Banjar terlihat dari jenis usaha pada industri makanan dan minuman yang didominasi usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman Kabupaten Banjar diantaranya adalah air mineral, aneka kue kering dan basah, dan sirup. Kontribusi per subkategori lapangan usaha menurut industri pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 33. Kontribusi Per Subkategori Industri terhadap PDRB
Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Banjar, 2016-
2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)**

Sub Kategori Lapangan Usaha		2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Pengolahan		100	100	100	100
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	65,54	66,19	65,86	66,43
3	Pengolahan Tembakau	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4,18	4,16	4,37	4,44
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,08	1,02	1,01	0,99
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,44	0,42	0,42	0,41
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,14	0,14	0,14	0,13
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18,40	18,51	18,76	18,45
10	Industri Barang Galian bukan Logam	7,77	7,17	7,07	6,81
11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,38	0,36	0,36	0,35
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,26	0,24	0,24	0,23
14	Industri Alat Angkutan	0,11	0,11	0,10	0,09
15	Industri Furnitur	0,44	0,42	0,43	0,42
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1,26	1,27	1,25	1,25

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019

* Angka sementara

** Angka perkiraan

Selain industri makanan dan minuman, penyumbang terbesar nilai tambah dalam industri manufaktur Kabupaten Banjar adalah industri pengolahan karet yang menyumbang PDRB mencapai 18,76 persen dari total PDRB industri pengolahan Kabupaten Banjar pada tahun 2018. Kendati demikian kinerja industri pengolahan mengalami penurunan selama kurun waktu

tiga tahun terakhir. Sebagian besar produksi karet alam di Kabupaten Banjar diekspor keluar daerah dalam bentuk mentah. Di sisi lain pertumbuhan industri karet juga mengalami percepatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2018. Diperkirakan terjadi perlambatan di tahun 2019 sebesar 4,06 persen seiring dengan menurunnya harga karet yang sempat terjadi beberapa waktu lalu karena berkurangnya permintaan dari negara tujuan ekspor karet alam terhadap Kabupaten Banjar. Padahal Industri karet merupakan faktor yang menjadi pengungkit pertumbuhan bagi perkebunan karet yang banyak diusahakan oleh petani karet di Kabupaten Banjar sebagai tiga besar wilayah dengan petani karet terbanyak dan luas areal penanaman terbesar di Kalimantan Selatan (hasil Sensus Pertanian 2013). Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dari tiga besar subkategori industri yang memberikan kontribusi terbesar untuk kategori industri:

Gambar 3. 51. Pertumbuhan Tiga Besar Sub kategori Industri Pengolahan, 2016-2018 dan Perkiraan 2019



Sumber: BPS Kabupaten Banjar

Faktor kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Tidak adanya pelabuhan di wilayah Kabupaten Banjar, sehingga menghambat transaksi ekspor pelaku usaha
- 2) Tidak adanya perusahaan atau pabrik yang dapat langsung menyalurkan produk karet pelaku usaha di Kabupaten Banjar

untuk diekspor, yang ada hanya di Banjarmasin dan Kalimantan Tengah

- 3) Menurunnya harga karet secara global
- 4) Masih banyaknya pelaku usaha karet yang mengolah produknya tidak sesuai aturan, sehingga mengakibatkan harga jual produk mereka rendah
- 5) Sebaran pelaku usaha yang dimonitoring sangat luas, sehingga menyulitkan dalam proses pendataan
- 6) Ada beberapa tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat
- 7) Ada beberapa pelaku usaha yang tidak dapat ditemui akibat perpindahan alamat ataupun tempat usaha
- 8) Anggaran yang terbatas, sehingga hanya dapat memfasilitasi 8 orang pelaku usaha
- 9) Pembangunan/ Penataan Pasar Kuliner CBS (Lanjutan) :
 - Lokasi pembangunan sangat dekat dengan aktifitas pasar
- 10) Pembangunan/ Penambahan Los Pasar Pengaron:
 - Lokasi pembangunan sangat dekat dengan aktifitas pasar
- 11) Bantuan Tenda dari kementerian Perdagangan:
 - Bentuk dan spesifikasi tenda berbeda dengan bantuan sebelumnya sehingga ketika digunakan beberapa tenda mengalami kerusakan
- 12) Monitoring Pupuk Bersubsidi:
 - Beberapa kios penyalur ketika dilakukan monitoring tidak ada aktifitas penjualan dan Beberapa lokasi kios yang didata sulit dijangkau.
- 13) Pedagang sulit memberikan data omzet
- 14) Pendataan Sarana Prasarana Perdagangan:
 - Beberapa pangkalan gas LPG ketika dilakukan pendataan tidak ada aktifitas penjualan;
 - Beberapa lokasi pangkalan gas LPG yang didata sulit dijangkau.
- 15) Luasnya wilayah Kabupaten Banjar mengakibatkan sulitnya pemberian sosialisasi ataupun informasi, dan tidak optimalnya pemberian sosialisasi dan informasi kepada pelaku usaha karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia
- 16) Kurangnya personil yang melakukan pendataan dan monitoring sehingga monitoring tidak berjalan dengan maksimal dan Luasnya wilayah Kabupaten Banjar mengakibatkan sulitnya pemberian sosialisasi ataupun informasi

- 17) Produk yang dibawa pengrajin untuk dipromosikan terbatas jumlahnya.
- 18) Ada pedagang yang kurang terbuka dalam memberikan keterangan harga bahan pokok
- 19) Terkadang pedagang/ pemilik toko enggan memberikan keterangan. Dan Faktor cuaca, seperti hujan deras juga membuat petugas susah untuk mendata
- 20) Dalam Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perdagangan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) secara teknis dan tindak lanjut penyidikan diperlukan Tenaga Pengawas Kemetrolagian. Sampai dengan saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum memiliki Tenaga Pengawas Kemetrolagian dan tidak memiliki ASN yang memenuhi persyaratan untuk di didik menjadi Pengawas Kemetrolagian.
- 21) Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) belum maksimal sampai dengan pengujian BDKT, karena belum memiliki alat pengujian BDKT
- 22) Minimya SDM kemetrolagian berupa penera ahli maupun terampil
- 23) Belum memiliki rekanan reparatir yang memiliki payung hukum
Belum memiliki database potensi UTTP yang lengkap se Kabupaten Banjar sehingga proses pemetaan potensi UTTP belum bisa terlaksana
- 24) Belum memiliki tempat penyimpanan standar berskala laboratorium
- 25) Belum memiliki tenaga pranata laboratorium sehingga kegiatan verifikasi peralatan standar masih bergantung pada SDM pranata laboratorium yang ada di BSML Regional III Kalimantan
- 26) Belum ada MOU dan nota kerjasama operasional terkait UTTP listrik dan Meter air dengan PDAM intan Banjar dan PLN
- 27) ASN dan PTT metrology kab Banjar Belum memiliki Perangkat safety dan pakaian lapangan yang memadai
- 28) Publikasi dan expose kegiatan kemetrolagian masih sangat rendah
- 29) Pungutan retribusi untuk jasa pelayanan tera dan tera ulang belum memiliki kode rekening setoran sendiri
- 30) Belum ada sistem apikasi pelayanan tera dan tera ulang secara on line

- 31) Pelayanan tera dan tera di pasar tradisional belum mencapai pelosok karena anggaran yang tersedia masih sangat terbatas sehingga hanya mampu melayani tera dan tera ulang di beberapa kecamatan saja

Upaya perbaikan :

- 1) Dengan memfasilitasi dan tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi dengan pelaku usaha karet secara berkesinambungan. Serta terus memantau harga karet secara nasional yang secara langsung mempengaruhi pelaku usaha karet itu sendiri.
- 2) Dalam pembangunan Penataan Pasar Kuliner CBS (Lanjutan) dan Penambahan Los Pasar Pengaron hendaknya Dalam pelaksanaan pembangunannya secara rutin dilaksanakan evaluasi dan koordinasi dengan PD. Pasar Bauntung Batuah.
- 3) Setiap pemilik/ pengelola pangkalan gas LPG dan kios pupuk bersubsidi dimintakan nomor kontak sehingga ketika pendataan dilaksanakan pangkalan dan kios yang tidak buka atau sulit dijangkau maka dihubungi melalui telepon.
- 4) Penyebaran leaflet sebagian diberikan ke pihak kecamatan untuk disebarluaskan ke masyarakat dan pelaku usaha
- 5) Monitoring dilakukan secara bertahap, sehingga dapat pendataan atau monitoring dapat berjalan dengan optimal
- 6) Mengurangi kuantitas produk yang dibawa namun variasi produk unggulan yang dipromosikan lebih beragam
- 7) Memberikan penjelasan/ pemahaman kepada pedagang bahwa apabila menaikkan harga sepihak dan melakukan penimbunan komoditi akan ditindak oleh pihak terkait dan menyampaikan himbauan dengan memasang spanduk/ pemberitahuan agar para pedagang tetap menjual barang pokok sesuai HET.
- 8) Kerja sama dengan Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III Kementerian Perdagangan untuk meminta pendampingan Tenaga Pengawasan Metrologi setiap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perdagangan di Kabupaten Banjar. Itupun terbatas karena BSML hanya memiliki 1 orang Pengawas Kemetrolagian yang lingkup tugasnya di seluruh Wilayah Kalimantan.
- 9) Mengajukan permohonan formasi calon Tenaga Pengawas Kemetrolagian ke Badan Kepegawaian Daerah Dan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau menarik ASN yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan calon Pengawas Kemetrolagian.
- 10) Setiap tahun mencicil pengadaan alat-alat pengujian BDKT untuk menyiasati keterbatasan anggaran.
 - 11) Meminta Pengadaan SDM kemetrolagian formasi penera ke BKDPSDM Kabupaten Banjar
 - 12) Melakukan bimbingan teknis reparatir bekerjasama dengan Kabupaten kota lainnya dan mengakselerasi pembentukan badan hukumnya
 - 13) Menambah anggaran untuk pendataan UTP ke seluruh pelosok Kabupaten Banjar dan anggaran pembuatan database potensi UTP
 - 14) Meminta anggaran untuk rehab ruangan penyimpanan peralatan standar agar sesuai standar laboratorium.
 - 15) Pengadaan ASN formasi pranata laboratorium atau ASN yang ada harus Mengikuti diklat pengelolaan laboratorium dan verifikasi standard
 - 16) Membuat anggaran untuk koordinasi dan rapat dengan PDAM dan PLN agar tercapai MOU dan nota kesepahaman
 - 17) Membuat anggaran pengadaan APD (Alat Pelindungan diri) dan perlengkapan safety yang sesuai dengan standad
 - 18) Membuat anggaran publikasi
 - 19) Mendaftarkan jasa pelayanan tra dan tera ulang pada kode rekening sendiri sehingga memudahkan dalam arus transaksi retribusi
 - 20) Membuat sistem aplikasi pelayanan online tera dan tera ulang
 - 21) Menambah anggaran tera dan tera ulang pasar tradisioanal agar seluruh kecamatan terlayani.

e. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

Pendekatan perhitungan PDRB sektor pariwisata diukur dengan PDRB sub kategori transportasi, akomodasi dan makan minum. Dalam postur perekonomian Banjar, kategori transportasi secara total menyumbang sebesar 4,64 persen di tahun 2018 terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjar, dimana subkategori yang mendominasi adalah angkutan darat yang menyumbang PDRB kategori transportasi sebesar 92,22 persen di tahun 2018. Besarnya kontribusi kategori transportasi darat ini

didukung oleh tingginya aktivitas angkutan penumpang mengingat wilayah ini merupakan jalur yang dilalui oleh lintas antar propinsi dan Kabupaten, ditambah lagi angkutan batubara dan jalur komoditas perdagangan. Selain itu, aspek pendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha tersebut juga berasal dari tumbuhnya usaha travel antar kota. Subkategori lapangan usaha angkutan darat tersebut menjadi motor penggerak kategori lapangan usaha transportasi dengan kontribusi diatas 90 persen setiap tahunnya. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Subkategori lapangan usaha tersebut tidak hanya memiliki pangsa yang besar dibandingkan dengan Subkategori lapangan usaha transportasi lain, akan tetapi juga didukung oleh pertumbuhan Subkategori lapangan usaha tersebut yang relatif tinggi (rata-rata hampir 7 persen per tahun). Perkembangan kategori lapangan usaha perdagangan yang telah dibahas sebelumnya juga tidak terlepas dari kinerja kategori lapangan usaha transportasi.

Tabel 3. 34. Kontribusi Per Subkategori Terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)

Sub Kategori Lapangan Usaha		2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Transportasi dan Pergudangan		100	100	100	100
1	Angkutan Rel	-	-	-	-
2	Angkutan Darat	91,61	91,87	92,22	92,33
3	Angkutan Laut	-	-	-	-
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	4,31	4,21	4,03	3,93
5	Angkutan Udara	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019

* Angka sementara

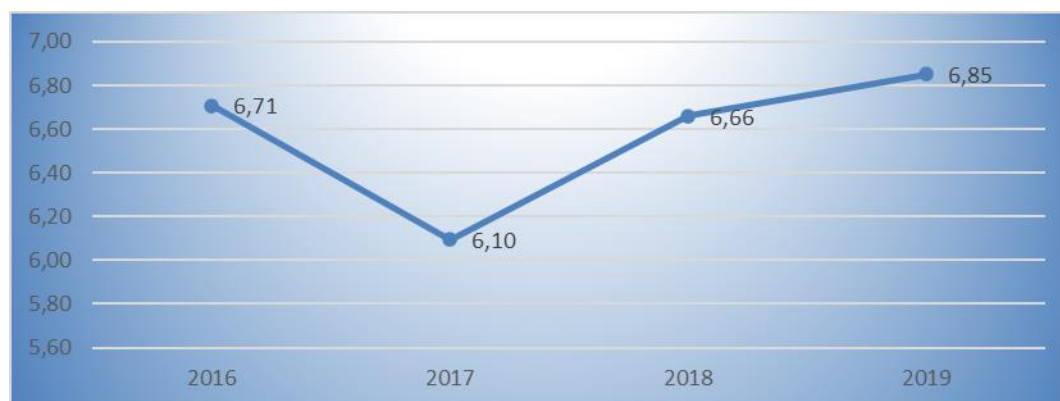
** Angka perkiraan

Kategori penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Kategori ini mempunyai kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap total PDRB Kabupaten

Banjar yaitu hanya sekitar 3,14 persen di tahun 2018, dimana sub kategori penyedia makan dan minum mendominasi pangsa pasar di lapangan usaha ini yaitu sebesar 95,84 persen di tahun 2018, sedangkan untuk penyedia akomodasi memberikan sumbangan yang cukup kecil yaitu 4,16 persen. Meskipun begitu, Kabupaten Banjar cukup dikenal sebagai surga wisata kuliner dan belanja makanan khas banjar, hal ini ditunjukkan melalui keberadaan berbagai penyediaan makan minum dan mulai tersedianya pilihan hotel yang cukup beragam.

Konsentrasi utama usaha tersebut terdapat di Kecamatan Martapura dan Gambut mengingat wilayah Martapura sebagai ibu kota Kabupaten sehingga kegiatan bisnis di wilayah ini memang cukup padat. Meski dari sisi kontribusinya cukup kecil namun demikian, pertumbuhan kategori ini cukup stabil setiap tahunnya di kisaran angka 6 persen. Karakteristik masyarakat di Kabupaten Banjar yang memiliki kecenderungan konsumsi makanan yang tinggi bila didukung kondisi daya beli masyarakat yang cukup baik menjadi salah satu aspek pendorong tumbuhnya kategori ini. Dalam selang waktu lima tahun terakhir banyak bermunculan hotel/ penginapan serta usaha kuliner baru yang turut mendorong pertumbuhan kategori tersebut. Keberadaan berbagai hotel/penginapan dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum lainnya di Kabupaten Banjar cukup menjanjikan dengan konsentrasi utama usaha tersebut terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Martapura dengan pariwisata religinya dan Kecamatan Kertak Hanyar yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis di wilayah yang disebutkan tadi cukup padat.

Gambar 3. 52. Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019



Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019

Meskipun dilihat dari sisi kontribusinya terhadap PDRB masih cukup kecil, yaitu hanya sekitar 3 persen per tahun. Di sisi pertumbuhannya terdapat kecenderungan melambat, hal ini tidak serta merta menunjukkan kondisi daya beli masyarakat yang juga menurun. Kecenderungan konsumsi masyarakat Kabupaten Banjar menjadi salah satu aspek pendorong tumbuhnya kategori lapangan usaha ini. Dalam beberapa tahun terakhir kemunculan hotel/penginapan serta usaha kuliner belum terlalu signifikan untuk turut mendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha tersebut. Sementara itu, daya tarik wisata pun nampaknya belum pudar dari wilayah ini.

Tabel 3. 35. Kontribusi Per Subkategori terhadap PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Banjar, 2016-2018 dan Perkiraan 2019 (Persen)

Sub Kategori Lapangan Usaha		2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		100	100	100	100
1	Penyediaan Akomodasi	4,11	4,21	4,16	4,15
2	Penyediaan Makan Minum	95,89	95,79	95,84	95,85

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2019

* Angka sementara

** Angka perkiraan

Sektor pariwisata merupakan sektor prioritas daerah dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Banjar, Sektor pariwisata diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi dari sumber daya tak terbarukan ke sumber daya terbarukan. Kabupaten Banjar memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, ini ditunjukkan dengan data objek wisata Kabupaten Banjar yang ada pada Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/440/KUM/2018 yang berjumlah 105 objek wisata dengan rincian wisata alam 42 buah, wisata buatan 11 buah dan wisata budaya sebanyak 52 buah. PDRB sektor pariwisata di tahun 2019 adalah sebesar 6,58%, data tersebut menunjukkan sektor pariwisata Kabupaten Banjar mulai tumbuh.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata pemerintah daerah fokus dalam peningkatan pengunjung wisata baik nusantara maupun mancanegara, adapun arah kebijakan yang telah ditempuh adalah dengan melaksanakan 4 pilar pembangunan pariwisata, yaitu destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan serta mengembangkan kepariwisataan dengan konsep 3A (Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas). Pada Tahun 2019 angka pengunjung wisata sebanyak 9.116.576 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 36. Angka Pengunjung Wisata

Bulan	Pengunjung dalam negeri	Pengunjung luar negeri
CBS dan Mesjid Al-Karomah	1,722,668 Orang	88 Orang
Kelampaian	960,175 Orang	6 Orang
Pulau Pinus I & II, Danau Riam Kanan	84,264 Orang	10 Orang
Bincau	144,682 Orang	- Orang
Pasar Terapung (lok Baintan)	66,318 Orang	761 Orang
Tahura Sultan Adam	75,132 Orang	16 Orang
Sungai Kembang	29,525 Orang	- Orang
Makam Guru Sekumpul	5,864,200 Orang	264 Orang
Waterboom	56,591 Orang	- Orang
Rumah Adat Banjar	3,251 Orang	295 Orang
Oranje Nassau	5,538 Orang	- Orang
Danau Tamiyang	41,098 Orang	- Orang

Bulan	Pengunjung dalam negeri		Pengunjung luar negeri	
Bukit Matang Kaladan	60,384	Orang	124	Orang
Penggosokan Intan	898	Orang	288	Orang
Jumlah	9,114,724	Orang	1,852	Orang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3. Sasaran : Meningkatnya nilai investasi

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya nilai investasi untuk Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah melalui Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA) sebagai indikator kinerja.

Iklim investasi di Kabupaten Banjar relatif sudah baik, ini ditunjukkan dengan tingginya potensi investasi pada tahun 2019 yang mencapai angka nilai enam triliun, hanya saja dalam realisasinya masih menemukan beberapa kendala dan permasalahan, sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan realisasi investasi di Tahun 2019 yaitu di angka Rp.1.024.139.054.828,00. Adapun faktor internal yang menjadi penyebab perlambatan realisasi investasi diantaranya masih terdapat regulasi perijinan yang dianggap belum pro investor dalam kemudahan proses perijinan, sehingga persyaratan-persyaratan dalam proses perijinan harus di tinjau ulang guna kemudahan dan percepatan penyelesaian perijinan, serta peningkatan pelayanan dengan integrasi SKPD pelayanan perizinan dan percepatan pelimpahan wewenang perijinan kepada SKPD koordinator untuk pelayanan terpadu satu pintu.

Selain faktor-faktor diatas terdapat pula faktor penyebab dari luar seperti kasus perusahaan besar tidak dapat melaporkan laporan kegiatan penanaman modal dikarenakan data perusahaan dipegang oleh pusat perusahaan. Sementara untuk meminta data ke pusat sangat dipersulit sekalipun anak cabang perusahaan yang berada di Kabupaten Banjar. Jadi perusahaan tersebut melaporkan investasinya (laporan kegiatan penanaman modal) melalui pusat. sehingga nilai realisasi investasi tidak masuk di Kabupaten Banjar, Adapula beberapa perusahaan melaporkan nilai realisasi investasi nol rupiah (Rp.0) dikarenakan perusahaan asal-asalan dalam melaporkan laporan kegiatan

penanaman modal tanpa konsultasi dahulu dengan staf bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal informasi penanaman modal. Masih ada sebagian perusahaan kurang mengetahui mengenai kewajiban melaporkan laporan kegiatan penanaman modal. ketika mendapatkan himbauan dari pusat perusahaan masih menganggap acuh dengan surat tersebut, sampai akhirnya mendapatkan surat peringatan (sp1) para pelaku usaha baru berbondong-bondong datang ke kantor dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu untuk mengurus laporan kegiatan penanaman modal tersebut.

3.2.10. Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi berdampak pula pada rusaknya lingkungan hidup, banyak masalah yang terkait dengan rusaknya lingkungan hidup mulai dari banjir karena membuang sampah disungai, kebakaran hutan dan lahan, efek rumah kaca yang mengakibatkan menipisnya ozon di bumi, pencemaran udara akibat asap dari pabrik, dan kerusakan lainnya. Kerusakan ini berimbas pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu upaya baik oleh individu, masyarakat maupun pemerintah untuk mencegah makin menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan kewajiban untuk semua baik individu, masyarakat maupun pemerintah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan yang luas. Peran serta tersebut tidak hanya oleh individu yang terkena peraturan tetapi juga peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat diketahui dengan membandingkan realisasi kualitas lingkungan hidup yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihasilkan dari akumulasi perhitungan antara indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.

Capaian dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 37. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,50	99,30	69,70	72,36	103,82	72,10	100,36

Sumber : Pengolahan Data

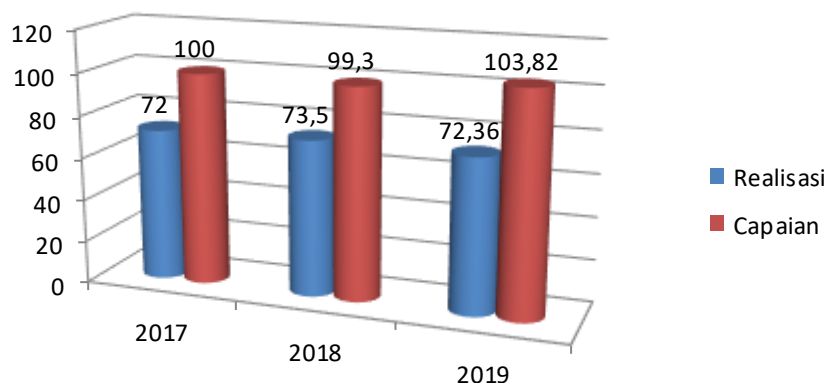
Capaian Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel diatas adalah 72,36 melampaui target yang ditetapkan yaitu 69,70 atau mencapai 103,82%. Sedang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan 1,14 meskipun secara capaian pada pada tahun 2018 capaiannya 99,30 persen, hal itu disebabkan pada saat dilakukan revisi RPJMD target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk tahun 2019 terjadi penurunan target. Apabila diperbandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka capaian sampai tahun 2019 sudah mencapai 100,36 persen. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72	100	73,50	99,30	72,36	103,82

Sumber : Pengolahan Data

Gambar 3. 53. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2017 s/d 2019



Sumber : Pengolahan Data

Capaian dari Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh capaian dari indikator kinerja sasaran yang meliputi : indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Sedang keberhasilan indikator kinerja sasaran juga dipengaruhi oleh indikator program pembangunan daerah yaitu : Rata-rata indeks pencemaran air (IP), Baku Mutu Parameter Udara Ambien (SO₂), Baku Mutu Parameter Udara Ambien (NO₂), dan Persentase Kecamatan Pelaksanaan Gamis Hijau (Gerakan Menanam Hari Kamis untuk Penghijauan). Capaian indikator Sasaran dan indikator Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja sasaran

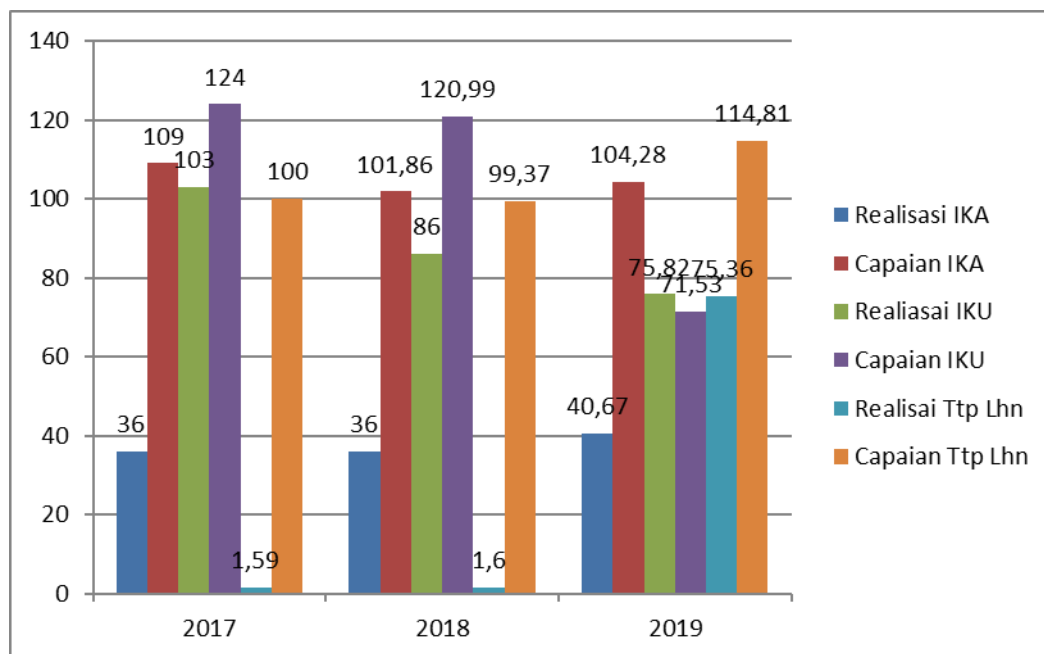
No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	36%	101,86%	39%	40.67%	104.28%	43%	94.58%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86%	120,99%	106%	75.82%	71.53%	110%	68.93%
3	Indeks Tutupan Lahan	1,60%	99,37%	65,64%	75.36%	114.81%	67,46%	111.71%

Sumber : Pengolahan Data

Capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan tiga indikator menunjukkan bahwa indeks tutupan lahan yang terealisasi 75.36 persen dari target 65,64 persen atau mencapai 114.81 persen dan indikator indeks kualitas air capaiannya sebesar 104.28 persen kedua indikator tersebut termasuk kriteria penilaian sangat baik, sedangkan indeks kualitas udara capaiannya sebesar 71.53 persen saja. Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan karena terjadi kemarau panjang sehingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kualitas udara menjadi turun. Perhitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang menggunakan sulfur lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada empat lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler.

Gambar 3. 54. Perbandingan realisasi dan capaian IKA, IKU, dan Tutupan Lahan Tahun 2017 s/d 2019



Sumber : Pengolahan Data

Tabel 3. 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan daerah	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Rata-rata Indeks Pencemaran Air (IP)	5,58	-	5,57	6,81	81,79	5,55	81,81
2	Baku Mutu Parameter Udara Ambien (SO ₂)	-	-	≤900 μ/m ³	575,40	156,41	≤900 μ/m ³	156,41
3	Baku Mutu Parameter Udara Ambien (NO ₂)	-	-	≤400 μ/m ³	363,60	110,01	≤400 μ/m ³	110,01
4	Persentase Kecamatan Pelaksanaan Gamis Hijau (Gerakan Menanam Hari Kamis untuk Penghijauan)	20	-	35	55	157,14	45	122,22

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, data diolah

Capaian indikator program pembangunan daerah sebagaimana tabel diatas memperlihatkan bahwa dari empat indikator program pembangunan daerah, satu indikator tidak mencapai target yaitu indikator rata-rata indeks pencemaran air, hal ini disebabkan musim kemarau yang panjang dan juga kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan khususnya aliran sungai. Budidaya ikan dalam keramba di sungai dan juga masih banyaknya jamban-jamban apung diatas sungai sangat mempengaruhi kualitas air sungai, meskipun pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait kapasitas air sungai untuk budidaya ikan dalam kerambah pada saat musim kemarau. Begitu juga terkait dengan jamban-jamban yang ada di sungai, pemerintah daerah sangat perhatian terhadap kualitas air, sehingga pemerintah daerah telah mencanangkan penghapusan 1.000 jamban dan saat ini telah dihapuskan 900 jamban lebih. Namun karena jumlah

jamban yang ada cukup banyak maka peningkatan kualitas air tidak cukup signifikan.

Indikator yang terkait dengan kualitas udara yaitu baku mutu parameter udara ambien SO₂ dan baku mutu parameter udara ambien NO₂ yang menggunakan acuan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 053 Tahun 2007, menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut realisasinya cukup baik yaitu dibawah ambang baku mutu yaitu 575,70 untuk SO₂ dari target 900 atau dengan capaian 156,41 persen. Sedangkan untuk NO₂ realisasinya sebesar 363,60 dari 400 atau mencapai 110,01 persen. Untuk indikator persentase kecamatan yang melaksanakan Gamis Hijau (Gerakan menanam hari kamis untuk penghijauan) terealisasi 55 persen dari target 35 persen dengan capaian sebesar 157,14 persen dengan kriteria penilaian sangat baik.

Faktor pendukung keberhasilan adalah :

- 1) Adanya program prioritas daerah terkait peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya sanitasi dalam hal ini penghapusan 1.000 jamban yang ada di sungai.
- 2) Adanya dukungan instansi lain dalam hal pengurangan atau menurunnya kualitas air sungai.
- 3) Adanya dukungan anggaran dari APBN yang dikucurkan dalam rangka pelaksanaan program sanitasi.

Faktor Penghambat Keberhasilan adalah :

- 1) Peran stakeholder dalam melakukan kegiatan terkait dengan pengendalian lingkungan belum maksimal
- 2) Kesadaran masyarakat untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih masih rendah, khususnya dalam hal pengelolaan sampah.
- 3) Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk kegiatan MCK dan kegiatan lainnya yang berpengaruh pada penurunan kualitas air sungai
- 4) Terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan
- 5) Prasarana dan Sarana pendukung untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan masih kurang

Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengendalian kualitas lingkungan hidup
- 2) Melengkapi prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan perbaikan kualitas lingkungan hidup

3.2.11. Indikator Kinerja Utama Persentase Konektivitas

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kemudahan dalam mobilitas baik orang maupun barang. Oleh karena itu memungkinkannya mobilitas orang maupun barang karena adanya konektivitas antar wilayah. Untuk mengukur kemudahan dalam mobilitas masyarakat tersebut digunakan indikator tingkat konektivitas. Peningkatan konektivitas antar wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas yaitu Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-modala supply chain sistem* yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Wilayah Kabupaten Banjar yang cukup luas, sangat wajar apabila pembangunan bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan terbukanya akses antar wilayah maka diharapkan masyarakat di kantong-kantong produksi tidak kesulitan dalam membawa hasil produksinya ke pusat-pusat pemasaran, sehingga dengan lancarnya arus barang tersebut maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Begitu juga dengan bidang pelayanan dasar, dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah diharapkan masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan baik pendidikan maupun kesehatan.

**Tabel 3. 41. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Konektivitas**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Konektivitas	98,73%	NA	73,67%	76,27%	103,53%	78,73%	96,88%

Sumber : Pengolahan Data

Capaian Tujuan kinerja meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator persentase konektivitas pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi dari indikator persentase konektivitas adalah sebesar 76,27 persen, lebih besar dari nilai yang ditargetkan yaitu 73,67 persen dengan capaian sebesar 103,53%. Sedang apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian sampai tahun 2019 baru mencapai 96,88 persen. Pada tahun 2018 realisasi dan capaian indikator persentase konektivitas belum digunakan, sehingga nilainya belum bisa dicantumkan.

Indikator tujuan persentase konektivitas diperoleh melalui formulasi persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan ditambah persentase sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi. Indikator tujuan persentase konektivitas didukung oleh dua sasaran dengan dua indikator yaitu sasaran meningkatnya akses dan kualitas transportasi dengan indikatornya Persentase prasarana transportasi dan sasaran Meningkatkan akses dan kualitas sarana transportasi dengan indikatornya rasio transportasi.

Tabel 3. 42. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Prasarana Transportasi	NA	NA	61,34	80,00	130,41	65,14	122,81
2	Persentase Sarana Transportasi	NA	NA	85,99	80,00	93,04	92,33	86,64

Sumber : Pengolahan Data

Pada tabel diatas diketahui bahwa capaian sasaran kinerja meningkatnya akses dan kualitas transportasi dengan indikatornya persentase prasarana transportasi, terealisasi diatas target. Indikator kinerja sasaran persentase prasarana transportasi terealisasi 80 persen dari target yang ditetapkan yaitu 61,34 persen atau mencapai 130,41 persen dengan kriteria penilaian sangat baik. Sedang apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian sampai tahun 2019 sudah melampaui target dengan capaian sebesar 122,81 persen. Indikator kinerja sasaran meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi dengan indikator rasio sarana transportasi terealisasi 80,00 persen dari target 85,99 persen dengan capaian sebesar 93,04 persen.

Keberhasilan atau capaian kedua indikator sasaran tersebut didukung oleh tiga indikator program pembangunan daerah, yaitu persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap, persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan rasio angkutan umum layak terhadap jumlah penduduk, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan daerah	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	71,97	100	73,06	73,90	100	74,08	99,76
2	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	-	-	80,00	80,00	100	90,00	89,00
3	Rasio angkutan umum layak terhadap jumlah penduduk	-	-	0,00061	0,000540	88,52	0,000659	82,00

Sumber : Pengolahan Data

Capaian indikator kinerja program pembangunan daerah, sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa dari tiga indikator tersebut dua indikator realisasinya mencapai target yang ditetapkan yaitu Indikator persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap terealisasi sebesar 73,90 dari target sebesar 73,06 dengan capaian sebesar 101,14 dengan kriteria penilaian sangat baik, dan indikator persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi terealisasi 80,00 persen dari target 80,00 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen dengan kriteria penilaian sangat baik. Sedang indikator rasio angkutan umum layak terhadap jumlah penduduk terealisasi 0,000540 dari target sebesar 0,00061 dengan capaian 88,52 persen.

Faktor yang mendukung

- 1) Terjalinnnya kerjasama yang baik dari berbagai pihak
- 2) adanya kucuran dana dari pusat berupa Dana DAK.
- 3) Pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal perencanaan

Faktor yang menghambat keberhasilan

- 1) wilayah Kabupaten Banjar yang cukup luas dan kepadatan penduduk yang tidak merata
- 2) jumlah moda transportasi umum yang masih terbatas
- 3) jumlah trayek yang masih terbatas, dan belum bisa menjangkau ke seluruh ibu kota kecamatan

Upaya perbaikan yang dilakukan tahun yang akan datang

- 1) melakukan pembinaan terhadap kapasitas masyarakat transportasi melalui pemilihan Abdiyasa Teladan terhadap para awak kendaraan umum
- 2) meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan

3.2.12. Indikator Kinerja Utama Persentase Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum serta mempunyai penunjang fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman dikatakan layak huni apabila memenuhi 8 indikator yang ditetapkan antara lain : Bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan, drainase

lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau. Ketidaklayakan hunian permukiman terjadi karena kurang terpenuhinya syarat-syarat yang menjadi indikator dari permukiman yang dikatakan layak huni tersebut.

Tujuan dari meningkatnya kelayak hunian merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menurunkan tingkat permukiman kumuh.

Capaian dari tujuan meningkatnya kelayak hunian ini diukur dengan indikator persentase permukiman layak huni. Dan untuk mengetahui tingkat capaian dari tujuan meningkatnya kelayak hunian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 44. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Permukiman Layak Huni

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Permukiman Layak Huni	92.96	NA	70,49%	95,25%	135,12%	79,00%	120,57%

Sumber : Pengolahan Data

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian meningkatnya kelayakhunian yang diketahui melalui indikator persentase permukiman layak huni menunjukkan tingkat capaian 135,12 persen atau kriteria penilaian sangat berhasil, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 79,00 persen menunjukkan capaian sampai dengan tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 120,57 persen.

Keberhasilan capaian Indikator persentase permukiman layak huni didukung oleh 3 sasaran strategis, dengan perhitungan komposisi 40 persen dari perhitungan rumah layak huni, yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, dan 30 persen lingkungan permukiman yang nyaman, indikator ini merupakan indikator komposit yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu : Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup, serta 30 persen pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 45. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Layak Huni	NA	NA	97,71%	98,55%	100,86%	98,00%	100,56%
2	Persentase Lingkungan Pemukiman Yang Nyaman	NA	NA	48,41%	53,94%	111,42%	57,49%	93,83%
3	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Dan Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	NA	NA	56,28%	92,13%	163,69%	75,18%	122,55%

Sumber : Pengolahan Data

Capaian dari 3 indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah terealisasi diatas target yang ditetapkan, masing-masing adalah : (1) Indikator persentase rumah layak huni terealisasi sebesar 98,55 persen dari target yang ditetapkan sebesar 97,71 persen atau capaiannya sebesar 100,86 persen. Jika dibanding dengan target akhir RPJMD, maka capaian sampai tahun 2019 adalah sebesar 100,56 persen. (2) indikator persentase lingkungan pemukiman yang nyaman terealisasi sebesar 53,94 persen dari target sebesar 48,41 persen dengan angka capaian sebesar 111,42 persen. Namun dibanding target akhir RPJMD maka capaian sampai akhir tahun 2019 adalah sebesar 93,83 persen. (3) indikator persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan tata ruang, realisasinya

sebesar 92,13 persen dari target sebesar 56,28 persen dengan capaian sebesar 163,69 persen. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian sampai akhir tahun 2019 telah mencapai sebesar 122,55 persen.

Tabel 3. 46. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja Program pembangunan daerah	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase peningkatan Rumah Layak Huni	-	-	0,10	0,17	170	0,34	50,00
2	Persentase Lingkungan Pemukiman Yang Nyaman	-	-	48,41	53,93	111,40	57,49	93,80
3	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	92,12	100,00	92,13	92,13	100,00	92,15	100
4	Persentase Pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	-	-	8,33	8,33	122,44	10,20	100

Sumber : Pengolahan Data

Capaian indikator kinerja program Pembangunan Daerah sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa dari empat indikator, semua telah terealisasi melampaui target yang ditetapkan. Indikator persentase rumah layak huni terealisasi sebesar 0,17 persen dari target sebesar 0,10 persen dengan capaian sebesar 170 persen; indikator persentase lingkungan pemukiman yang nyaman terealisasi sebesar 53,93 persen dari target yang ditetapkan sebesar 48,41 persen atau mencapai 111,40 persen; dan indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang terealisasi sebesar 92,13 persen

dari target sebesar 92,13 persen atau mencapai 100 persen; serta indikator pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang terealisasi sebesar 8,33 persen dari target sebesar 8,33 persen atau mencapai 100 persen.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

Faktor pendukung keberhasilan :

- 1) Dana tersedia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- 2) Kegiatan pelaksanaan menyesuaikan anggaran yang tersedia
- 3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- 4) Adanya tenggat waktu penyelesaian permasalahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman
- 5) Banyaknya Permintaan Pengesahan Siteplan/Dokumen Teknis dari pengembang untuk pembangunan perumahan
- 6) Banyaknya pengajuan permohonan serah terima aset PSU perumahan oleh pengembang
- 7) Adanya semangat dan motivasi untuk melayani masyarakat dalam bidang Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan
- 8) Tersedia Sumber Daya Manusia yang bisa mengitung tagihan rekening Penerangan Jalan Umum
- 9) Faktor pendorong kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Reguler) yaitu, Time Schedule program DAK Bidang Perumahan yang sudah dijadwalkan dari pusat

Faktor penghambat keberhasilan :

- 1) Target 100 unit rehabilitasi rumah korban bencana alam tidak dapat tercapai karena tidak tersedianya dana untuk rehabilitasi fisik pada kegiatan ini. Kegiatan yang merupakan SPM Dinas Perumahan dan Permukiman ini pada DPA 2019 hanya menganggarkan pengawasan dan perencanaan. Sesuai dengan arahan pusat yang dikarenakan keterlambatan sosialisasi tentang SPM ini dan sudah terlajur disahkannya DPA Pergeseran dan Perubahan, maka kegiatan diarahkan pada pendataan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar kegiatan di tahun 2020 dan tahun selanjutnya, dan untuk penyusunan dokumen Rencana Aksi

Daerah tersebut digunakanlah anggaran perencanaan yang terdapat di DPA 2019.

- 2) Anggaran pada kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial tidak dapat diserap oleh karena tidak adanya kebijakan pemerintah yang membutuhkan relokasi penduduk pada suatu permukiman.
- 3) Pemeriksaan atau verifikasi permohonan pengesahan siteplan dan dokumen teknis perumahan saat melaksanakan tinjauan ke lapangan ternyata sudah terbangun dan pembangunan perumahan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Permohonan pengesahan siteplan oleh pengembang perumahan untuk komposisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang diajukan belum sesuai dengan standar teknis dalam peraturan bupati tentang penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berlaku.
- 5) Pada pelaksanaan serah terima fisik PSU perumahan yang sertifikat PSU telah dikeluarkan oleh BPN namun saat peninjauan kondisi lapangan ternyata posisi sarana tidak sesuai dengan siteplan yang disahkan.
- 6) Banyaknya anggota pokja PKP pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu SKPD, pihak perbankan, perwakilan asosiasi pengembang, perwakilan akademisi, perwakilan PLN, perwakilan PDAM, perwakilan city changer, perwakilan FKA-LKM, Tim KOTAKU serta perwakilan LSM Kabupaten Banjar yang terkait sehingga ketika diadakannya rapat koordinasi tidak semua anggota dapat berhadir atau hanya perwakilan yang menyebabkan sering tidak dapat langsung diputuskan.
- 7) kurang tersedianya Dokumen Perencanaan (DED) pada kawasan permukiman kumuh serta pembebasan lahan masyarakat belum dilaksanakan pada kawasan kumuh Desa Murung Kenanga dan tidak adanya dokumen *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) menyebabkan penanganan masalah kumuh permukiman belum optimal dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Banjar.
- 8) Pada kegiatan Penyusunan /Pemuktakhiran Sistem Informasi/Database Kawasan Permukiman yang merupakan kegiatan review Surat Keputusan (SK) Bupati No. 189 Tahun 2013 atas penetapan lokasi kawasan yang terdiri dari 12 Kecamatan pada tahun ini baru bisa dikerjakan sebanyak 3

Kecamatan yaitu 2 Kecamatan dikerjakan di APBD murni dan 1 Kecamatan di APBD-Perubahan yaitu Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk pada triwulan II dan IV, untuk Kecamatan yang lainnya belum bisa diselesaikan pada tahun yang bersangkutan karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan identifikasi seluruh Kecamatan dalam SK 2013. Dengan adanya Program KOTAKU sehingga dana yang sebenarnya diperuntukkan untuk Identifikasi Kecamatan di alihkan ke Kegiatan yang mendukung Program Kegiatan KOTAKU berupa Masterplan Kawasan Air Santri Kelurahan Murung Kenanga dan Identifikasi Status Penguasaan Lahan.

- 9) Pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman untuk sosialisasi Kecamatan Sungai Tabuk tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini dikarenakan kurangnya dana yang tersedia sebab Identifikasi Kecamatan Sungai Tabuk dilaksanakan pada APBD-Perubahan.
- 10) Peta digital/peta citra yang ada tidak up to date sebagai data sumber, sehingga pengambilan kebijakan tata ruang tidak tepat.

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun selanjutnya:

- 1) Perlu diadakan anggaran pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Perlu diadakan anggaran kegiatan fasilitasi dan stimulasi Rumah Akibat Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3) Dihimbau kepada pengembang agar tidak melakukan pembangunan sebelum siteplan dan dokumen teknis disahkan.

- 4) Mengarahkan kepada pemohon dalam membuat siteplan dan dokumen teknis perumahan harus sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku
- 5) Tim verifikasi menghimbau kepada pemohon penyerahan PSU untuk merevisi siteplan yang disahkan sesuai dengan kondisi lapangan.
- 6) Perlu dilakukan kesepakatan dalam penentuan jadwal rapat koordinasi agar semua anggota tim koordinasi dapat berhadir pada setiap rapat.
- 7) Pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman adalah tindak lanjut dari pada kegiatan Identifikasi Kecamatan untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat pentingnya lingkungan yang bebas dari kumuh serta kegiatan pendampingan Program Kegiatan KOTAKU yang berada di Kecamatan Martapura terutama pada KPKP I (Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan) perlu anggaran yang mencukupi untuk mensosialisasikan kegiatan kawasan bebas kumuh.

3.2.13. Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga merupakan upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia.

Indeks Reformasi Birokrasi adalah tata cara dan mekanisme penilaian yang terdiri dari dua komponen penilaian yaitu komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria penilaian salah satunya adalah 8 area perubahan yang termasuk di dalam komponen pengungkit. 8 area perubahan-perubahan tersebut terdiri dari: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM;

(6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan.

Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama di atas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 47. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	72.71	NA	73	72.71	99.60%	77	94.43%

Sumber : Pengolahan Data

Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 adalah 99,6 % didapat dari realisasi sebesar 72,71 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 73, capaian sebesar 99,6 % ini masuk dalam kategori cukup berhasil walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian Tahun 2019 menyumbang sebesar 94,43 % dari target Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan sebesar 77 pada Tahun 2021.

Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka realisasi tahun 2019 sama dengan realisasi tahun 2018, sedang capaian tahun 2018 tidak ada dikarenakan pada tahun 2018 indeks reformasi birokrasi belum menjadi indikator.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, maka telah ditetapkan sasaran-sasaran dalam RPJMD. Sasaran –sasaran yang mendukung sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal
2. Sasaran Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah
3. Sasaran kualitas perencanaan pembangunan daerah
4. Sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
5. Sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan desa
6. Sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik
7. Saaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah

Tabel 3. 48. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks profesionalisme ASN	59.49	56.31	94.65%	70	80.44%
2	Indeks kepatuhan	88.38	84.99	96.16%	90.13	94.30%
3	Nilai Sakip	70.01	68.70	98.13%	75.3	91.24%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	73%	80,27%	109.96%	-	-
5	Skor evaluasi perkembangan desa	416	420	100.96%	446	94.17%
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.3	2.63	114.35%	2.8	93.93%
7	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70	70	100%	100	70%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.90	81.96	100.07%	82.1	99.83%
9	Opini BPK (Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan)	WTP	WTP	100%	WTP	100%
10	Jumlah pendapatan asli daerah (Rp.)	187.568.305.370	223.039.381.642,4	120.56%	192.000.000.000	116.17%
11	Nilai/Skor EKPPD	3.1800	3.1589	99.34%	3.2	98.72%

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran : Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal

Sasaran sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah Indeks profesionalisme ASN.

Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. Sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan handal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan handal dengan meningkatkan manajemen sumber daya aparatur. Pada tahun 2019 pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan handal menunjukkan hasil cukup berhasil. Rencana dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Sumber Indikator yang dimiliki adalah berupa Persentase distribusi ASN sesuai kompetensi, dengan target 59,49% dengan realisasi sebesar 56,31% dan capaian sebesar 94,65%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 49. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks profesionalisme ASN	-	NA	59.49	56.31	94.65%	70	80.44%

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan data pada tabel diatas Tabel Perbandingan Realisasi/capaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya,

bahwa Indikator Kinerja Indeks professional ASN dimana indikator IPA ini mencakup beberapa indikator untuk perhitungannya yaitu;

1. Kualifikasi
2. Kompetensi
3. Kinerja, dan
4. Disiplin

Dimana empat indikator pembentuk IPA tersebut merupakan bagian dari perhitungan format IPA sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Professional ASN. Dengan begitu pada tahun 2019 ini tidak bisa membandingkan capaian tahun lalu dengan tahun 2019 ini. Pada tahun 2019 ini realisasi Indeks Profesional ASN Kabupaten Banjar hanya 56,31 sedangkan target pada tahun 2019 ini 59,49. Sehingga capaian hanya 94,65%.

Dimana berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 kategori tingkat professional ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------|-----------------|
| a. | 91-100 | = Sangat Tinggi |
| b. | 81-90 | = Tinggi |
| c. | 71-80 | = sedang |
| d. | 61-70 | = Rendah |
| e. | > 60 | = Sangat Rendah |

Maka berdasarkan kategori tersebut maka ASN Kabupaten Banjar untuk professional ASN di kategorikan Sangat Rendah yaitu 56,31. Berdasarkan sasaran strategis dengan indikator Indeks profesional ASN capaian kinerja dapat dikatakan cukup berhasil dari target yang ditetapkan sebesar 59,49 dengan capaian realisasi 94,65%. dari segi profesional maka dapat disimpulkan profesional ASN Kabupaten Banjar masih sangat Rendah karena hanya mencapai Indeks 56,31 sedangkan realisasi capaian kinerja dari target sudah hampir memenuhi yaitu 94,65%.

2. Sasaran : Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berintegritas melalui Indeks Kepatuhan sebagai indikator kinerja, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian

berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata} = (\%LHKPN + \%LHKASN + \%TLHP\text{-}BPK + \%TL\text{-}APIP) / 4$$

Tabel 3. 50. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks kepatuhan	NA	NA	88.38	84.99	96.16%	90.13	94.30%

Sumber : Pengolahan Data

Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :

- 1) Progres Penyelenggara Negara / Wajib Lapo (PN/WL) LHKPN yang menyampaikan LHKPN melalui aplikasi e-filing sebagai salah satu unsur dalam Indeks Kepatuhan mencapai 100%, meskipun masih ada PN / WL yang tidak tepat waktu.
- 2) Objek Pemeriksaan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan semakin meningkat.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :

- 1) Seluruh PN / WL LHKPN dapat menyampaikan pelaporan LHKPN 100% dengan Tingkat Kepatuhan juga mencapai 100%.
- 2) Aparatur Sipil Negara yang menyampaikan Laporan LHKASN semakin meningkat.

Upaya perbaikan :

- 1) Indeks Kepatuhan meliputi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Tindak Lanjut atas rekomendasi BPK dan Tindak Lanjut atas rekomendasi Inspektorat.
- 2) Untuk mengoptimalkan variable dalam Indeks Kepatuhan, Inspektorat meningkatkan pelaksanaan fungsi consulting dalam bentuk sosialisasi, pendampingan dan ruang konsultasi bagi perangkat daerah dan aparat desa.

Berdasarkan Tabel 3.50. indikator Indeks Kepatuhan tidak dapat dibandingkan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya,

karena indikator ini merupakan indikator yang baru. Capaian indikator ini pada tahun 2019 (84,99%) dibandingkan dengan capaian pada periode akhir RPJMD (90,13%) perlu peningkatan sebesar 5,14% agar capaian pada akhir periode RPJMD bisa dicapai 100%.

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Meningkatkan fungsi consulting dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya ketidakpatuhan terhadap aturan / ketentuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di objek pemeriksaan
- 2) Melakukan perencanaan berbasis risiko untuk memetakan risiko yang besar untuk dilakukan pengawasan lebih intensif.

3. Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui Nilai SAKIP sebagai indikator kinerja.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 3. 51. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Banjar	Penilaian KemenPAN RB atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Dasar hukum : Peraturan Presiden Nomor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian penilaian atas AKIP PemKabupaten Banjar dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan indikator - indikator sbb : a). Perencanaan Kinerja bobot 30%; b). Pengukuran Kinerja bobot 25%; c). Pelaporan Kinerja bobot 15%; d). Evaluasi kinerja bobot 10%; dan e). Pencapaian Kinerja bobot 20%. 2. Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator; 3. Hasil penilaian atas AKIP PemKabupaten Banjar tahun (N) didapatkan pada akhir tahun; 4. Kategori Penilaian SAKIP : 	Matriks Renstra dan Surat Keputusan IKU SKPD)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data																												
		29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>10%</td> <td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	Total		100%		
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																													
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)																													
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																													
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																													
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																													
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)																													
Total		100%																														

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappelitbang Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3. 52. Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2019			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Banjar	1. Pemberian penilaian atas AKIP Pemkabupaten Banjar dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan	%	70,01	68,70	98,13	Cukup Berhasil

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019



Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat																											
			Satuan	Tahun 2019																														
		indikator - indikator sbb : a). Perencanaan Kinerja bobot 30%; b). Pengukuran Kinerja bobot 25%; c). Pelaporan Kinerja bobot 15%; d). Evaluasi kinerja bobot 10%; dan e). Pencapaian Kinerja bobot 20%. 2. Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator; 3. Hasil penilaian atas AKIP PemKabupaten Banjar tahun (N) didapatkan pada akhir tahun; 4. Kategori Penilaian SAKIP :																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub-Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi Perencanaan Rencana (2%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Perencanaan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemenuhan pelaporan (4,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Emulasi Internal</td> <td>10%</td> <td>a. Pemenuhan emulasi (2%) b. Kualitas emulasi (5%) c. Pemenuhan hasil emulasi (3%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang dilaporan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Perencanaan Rencana (2%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Perencanaan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemenuhan pelaporan (4,5%)	4	Emulasi Internal	10%	a. Pemenuhan emulasi (2%) b. Kualitas emulasi (5%) c. Pemenuhan hasil emulasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	Total		100%					
No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen																															
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Perencanaan Rencana (2%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Perencanaan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)																															
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																															
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemenuhan pelaporan (4,5%)																															
4	Emulasi Internal	10%	a. Pemenuhan emulasi (2%) b. Kualitas emulasi (5%) c. Pemenuhan hasil emulasi (3%)																															
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)																															
Total		100%																																

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Banjar realisasi tahun 2019 adalah **68,70** jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2021) sebesar **75,30** capaiannya adalah **91,24%**. Target akhir RPJMD optimis akan tercapai karena adanya komitmen dari Bappedalitbang, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda Banjar dan semua SKPD untuk memperbaiki sistem dan dokumen dalam rangka penilaian SAKIP Kabupaten Banjar.

Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019 tidak dibandingkan dengan target nasional karena di tingkat nasional tidak ada target nilai SAKIP tingkat nasional. Namun target kinerja sasaran tahun 2019 dibandingkan dengan target provinsi. Realisasi Kinerja

Sasaran Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target Provinsi sebagai berikut :

Tabel 3. 53. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 dan Target Provinsi

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Provinsi Tahun 2019	Target Nasional Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Banjar		A	-	B
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD		A		A

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar, Bappeda Prov. Kalsel, Biro Organisasi Prov.Kalsel

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa target nilai SAKIP Prov. Kalsel adalah A dengan realisasi A, sedangkan target nilai SAKIP Kabupaten Banjar BB dengan realisasi B.

Jika nilai SAKIP Kabupaten Banjar dibandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan, maka nilai SAKIP Kabupaten Banjar masih rendah dibawah nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan

Rumusan indikator yang digunakan adalah Penilaian KemenPAN RB atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Dasar hukum : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas nilai (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Banjar mendapat nilai 68,70 atau dengan predikat penilaian “B”.

Tabel 3. 54. Komponen penilaian SAKIP

INDIKATOR	BOBOT
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	25
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Internal	10
Capaian Kinerja	20

Sumber : Permenpan 12 Tahun 2015

Nilai SAKIP Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah penilaian atas pelaksanaan SAKIP Kabupaten Banjar selama tahun 2018. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar memperoleh nilai **68,70** atau predikat “**B**”, yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome*) pada pemerintah Kabupaten Banjar sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 55. Rincian Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Banjar

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2018	NILAI 2019
Perencanaan Kinerja	30	24,92	23,88
Pengukuran Kinerja	25	15,59	16,08
Pelaporan Kinerja	15	11,11	11,15
Evaluasi Internal	10	5,46	5,98
Capaian Kinerja	20	11,53	11,60
Nilai Hasil Evaluasi		68,61	68,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banjar Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Nilai SAKIP Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah 68,70 predikat (B) dari target 70,01 predikat (BB) dengan tingkat capaian 98,13 % (cukup berhasil). Nilai SAKIP Kabupaten Banjar Tahun 2019 belum mencapai target, namun secara nilai mengalami kenaikan dari Tahun 2018 yaitu dari nilai 68,61 (B) menjadi nilai 68,70 (B)

Faktor pendorong :

- 1) Dalam rangka perbaikan indikator kinerja pada dokumen perencanaan telah dilakukan revisi RPJMD 2016-2021, diantaranya dengan memunculkan indikator tujuan dan perbaikan indikator pada level sasaran
- 2) Pemimpin Daerah bersama dengan Kepala SKPD telah melakukan upaya peningkatan Sistem Manajemen Kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil beserta indikatornya dalam dokumen perencanaan.
- 3) Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga eselon IV.

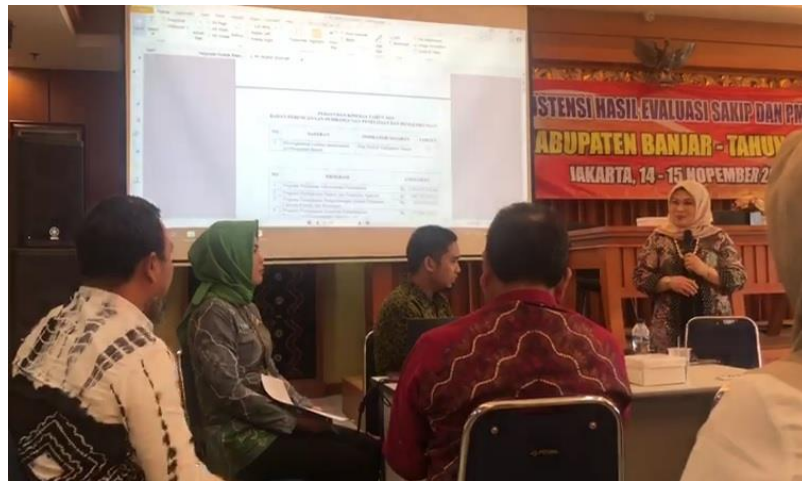
Faktor penghambat :

- 1) Belum maksimalnya penerapan SAKIP dalam mendukung kinerja SKPD
- 2) Sasaran Kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

- 3) Indikator Kinerja sasaran strategis pada SKPD belum sepenuhnya berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai.
- 4) Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja program, masih pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 5) Laporan kinerja telah disusun hingga ke level SKPD tetapi isi laporan masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, serta belum mampu sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program juga belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
- 6) Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program, dan hanya pelaksanaan program/kegiatan serta penyerapan anggaran.

Upaya perbaikan :

- 1) Melakukan workshop SAKIP lingkup Kabupaten Banjar dengan narasumber dari Kemen-PAN
- 2) Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*) mulai dari level SKPD sampai dengan Indikator kinerja di Level eselon II, III, IV, dan individu pegawai sebagai dasar perubahan RENSTRA
- 3) Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *outcome* dan *output* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja organisasi dengan memanfaatkan aplikasi E-ANDAL sebagai alat pengukur kinerja SKPD, termasuk sebagai dasar pemberian *Reward* dan *Punishment*
- 4) Melakukan *reviu* dan pendampingan terhadap laporan capaian kinerja SKPD
- 5) Meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai.
- 6) Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
- 7) Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD.



Gambar 3. 55. Asistensi Hasil Evaluasi SAKIP dengan KEMENPAN-RB



Gambar 3. 56. SAKIP Award 2019

4. Sasaran : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Sasaran lainnya yang mendukung tujuan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat, diukur dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 56. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Tahun 2019

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah masyarakat yang ikut memilih dalam pemilu dibagi jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dikali 100%	%	73	80,27	109,96%	Berhasil

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, data diolah

Adapun untuk sasaran strategis Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu datanya didapatkan dari KPU Kabupaten Banjar, dimana pada tahun 2019 diselenggarakan pemilihan umum yakni pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Di Kabupaten Banjar terdapat jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 414.549 orang, terdiri dari 208.545 laki-laki dan 206.004 perempuan. Dari seluruh pemilih tersebut, banyak didominasi oleh pemilih usia produktif 31-40 tahun, yakni berjumlah 100.972 orang. Kemudian disusul pemilih muda, usia antara 21-30 orang sebanyak 97.533 orang. Sedangkan pemilih dengan kisaran umur 41-50 tahun sebanyak 85.973 orang. Sementara mereka yang berusia 51-60 tahun sebanyak 55.390 orang. Dan umur 60 tahun ke atas sebanyak 39.080 orang. Terakhir pemilihan pemula 17-21 tahun sekitar 35.601 orang

Partisipasi pemilih pada tahun 2019 cukup tinggi, masyarakat yang memberikan suaranya melalui pemilu tercatat

ada sebanyak 332.749 orang. sehingga dapat dihitung persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu ada sebesar 80,27 persen, realiasi ini lebih tinggi dari partisipasi pemilih pemilu legislatif pada tahun 2014 yakni sebesar 74,41 persen. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 73 persen maka diperoleh capaian sebesar 109,59 persen atau dengan predikat berhasil. Dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target sebesar 73 persen maka capaian pada tahun 2019 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 109,96 persen

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terutama pada pemilih pemula atau potensial di dua puluh kecamatan. Kategori pemilih pemula di Kabupaten Banjar merupakan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 31.512 pemilih atau 7,6% dari jumlah DPT, dimana 16.220 di antaranya laki-laki dan 15.292 pemilih perempuan.
- 2) Peranan partai politik yang menggerakkan kadernya untuk senantiasa berperan serta dalam pemilu.
- 3) Situasi Kamtibmas yang kondusif dimasyarakat

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

Membentuk forum diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuka agama.

Upaya perbaikan :

Forum diskusi bukan lagi berupa presentasi/paparan dari narasumber tetapi diarahkan pada *brainstorming* (curah pendapat) antar stakeholder

5. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah Skor Evaluasi Perkembangan Desa

Skor evaluasi perkembangan desa adalah Nilai evaluasi yang bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Pengukuran target kinerja dari sasaran

strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menggunakan suatu instrumen yang telah dirumuskan Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung Skor Evaluasi Perkembangan.

Tabel 3. 57. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2018		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Skor Evaluasi Perkembangan Desa	405	100,96	416	420	100,96	446	94,17

Sumber : Pengolahan Data

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya, pada tahun 2018 indikator kinerja sasarnya adalah Persentase desa berkembang dimana realisasi sebesar sebesar 405% dengan capaian 100,9%. Sedangkan pada tahun 2019 indikator kinerja sasarnya adalah Skor Evaluasi Perkembangan Desa. Realisasi pada tahun 2019 sebesar 420 poin dari target 416 poin, dengan demikian terjadi peningkatan sebanyak 4 poin dengan capaian persentase skor evaluasi perkembangan desa sebesar 100,96%.

Target Indikator Kinerja Utama Skor Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2019 sebesar 416 dan terealisasi 420 dengan capaian kinerja 100,96 %, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 446 maka capaian kinerja masih sebesar 94,17 %. Target Indikator Kinerja Utama Skor Evaluasi Perkembangan Desa optimis akan tercapai pada akhir RPJMD melihat bahwa Tahun 2019 realisasi melebihi target dan karena adanya pembinaan dari provinsi, Kabupaten dan kecamatan ke desa serta adanya dana desa yang tujuannya untuk memberantas kemiskinan dan menaikkan status desa.

Adapun cara perhitungan indikator tersebut menggunakan Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa sebagai berikut :

- 1) Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai perkembangan Desa.
- 2) Untuk pengisian Instrumen Evaluasi ini dibutuhkan kejujuran karena akan berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Desa. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Bagi Desa itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Desa masing-masing.
- 4) Pengisian instrumen pengungkap data dilakukan dengan cara melingkari poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Sub indikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.
- 5) Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
- 6) Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

Rumus Perhitungan Indikator

Adapun rumus perhitungan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, adalah sebagai berikut :

$$\text{Total skor evaluasi perkembangan desa} \\ = \frac{\text{Bidang Pemerintahan} + \text{Bidang Kewilayahan} + \text{Bidang Kemasyarakatan}}{277 \text{ desa}}$$

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, pada tahun 2019 DPMD Kabupaten Banjar membagikan Instrumen Pengungkap Data ke 277 Desa di Kabupaten Banjar, data tersebut diisi oleh masing-masing desa sehingga diperoleh Hasil rekapitulasi Evaluasi Perkembangan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan desa Kabupaten Banjar tahun 2019 total keseluruhan hasil evaluasi perkembangan desa adalah sebesar 116.340, dan jumlah desa sebanyak 277 desa, maka diperoleh skor evaluasi sebesar 420 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Total Skor Evaluasi Perkembangan Desa} = \frac{116.340}{277} = 420$$

6. Sasaran : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik** merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah :

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government.

Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Implementasi e-government akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Bedasarkan Perpres Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah 'dipaksa' untuk menerapkan e-government secara terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan semua urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menerapkan SPBE.

Digitalisasi sistem pemerintahan ini, adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima. Penerapan SPBE secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari

pusat hingga daerah, harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Informasi publik dikategorikan sebagai Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik, informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tabel 3. 58. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3	2,63	114,35	2.8	93.93%
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70	70	100,00	100	70%

Sumber : Pengolahan Data

Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banjar Target di Tahun 2019 sebesar 2,3 adapun realisasi sebesar 2,63 dan capaian sebesar 114,35 %. Apabila dibanding dengan target akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD sudah mencapai 93,93 persen Sedangkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik target tahun 2019 sebesar 70 persen dengan realisasi sebesar 70 persen, atau capaian sebesar 100%. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100 persen, maka capaian tahun 2019 terhadap akhir RPJMD adalah sebesar 70,00 persen.

Faktor Pendorong:

- Tersedianya Tupoksi yang mendukung Diseminasi Informasi, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pers dan Telekomunikasi
- Tersedianya media informasi untuk didayagunakan
- Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

d) Kebutuhan pengembangan E-Government

Faktor Penghambat :

Penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian secara umum terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

- a) Bentang geografis Kabupaten Banjar yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya.
- b) Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK)
- c) Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
- d) Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.

Upaya Yang Dilakukan

Guna mengatasi permasalahan yang ada, maka direkomendasikan beberapa hal berikut ini :

- a. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update.
- b. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di tempat umum.
- c. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan peningkatan kompetensi KIM dengan berbasis teknologi
- d. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan serta mengidentifikasinya sebagai upaya solusi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi LAPOR!.

7. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil analisis di unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar di peroleh Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan sebesar 81,96 yang berada pada kategori BAIK. Analisis selanjutnya disajikan

berdasarkan masing-masing ruang lingkup pelayanan. Berikut ini adalah Perangkat Daerah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang melakukan survei antara lain:

1. Data Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik :

- 1 Badan Pendapatan Daerah
- 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3 Dinas Penanaman modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
- 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6 Rumah Sakit Ratu Zalecha
- 7 Dinas Lingkungan Hidup

KECAMATAN

- 9 Kecamatan Aluh-Aluh
- 10 Kecamatan Aranio
- 11 Kecamatan Astambul
- 12 Kecamatan Beruntung Baru
- 13 Kecamatan Gambut
- 14 Kecamatan Karang Intan
- 15 Kecamatan Kertak Hanyar
- 16 Kecamatan Martapura
- 17 Kecamatan Martapura Barat
- 18 Kecamatan Martapura Timur
- 19 Kecamatan Mataraman
- 20 Kecamatan Paramasan
- 21 Kecamatan Pengaron
- 22 Kecamatan Sambung Makmur
- 23 Kecamatan Simpang Empat
- 24 Kecamatan Sungai Pinang
- 25 Kecamatan Sungai Tabuk
- 26 Kecamatan Tatah Makmur
- 27 Kecamatan Telaga Bauntung
- 28 Kecamatan Cintapuri Darussalam

KELURAHAN

- 29 Kelurahan Gambut
- 30 Kelurahan Gambut Barat
- 31 Kelurahan Jawa
- 32 Kelurahan Keraton
- 33 Kelurahan Kertak Hanyar
- 34 Kelurahan Manarap Lama
- 35 Kelurahan Mandar Sari
- 36 Kelurahan Murung Keraton
- 37 Kelurahan Pasayangan
- 38 Kelurahan Sekumpul
- 39 Kelurahan Sungai Lulut

- 40 Kelurahan Sungai Pering
 - 41 Kelurahan Tanjung Rema Darat
 - PUSKESMAS**
 - 42 Puskesmas Aluh-Aluh
 - 43 Puskesmas Aranio
 - 44 Puskesmas Astambul
 - 45 Puskesmas Beruntung baru
 - 46 Puskesmas Gambut
 - 47 Puskesmas Karang Intan 1
 - 48 Puskesmas Karang Intan 2
 - 49 Puskesmas Kertak Hanyar
 - 50 Puskesmas Martapura 1
 - 51 Puskesmas Martapura 2
 - 52 Puskesmas Martapura Barat
 - 53 Puskesmas Martapura Timur
 - 54 Puskesmas Mataraman
 - 55 Puskesmas Paramasan
 - 56 Puskesmas Pengaron
 - 57 Puskesmas Sambung Makmur
 - 58 Puskesmas Simpang Empat 1
 - 59 Puskesmas Simpang Empat 2
 - 60 Puskesmas Sungai Pinang
 - 61 Puskesmas Sungai Tabuk 1
 - 62 Puskesmas Sungai Tabuk 2
 - 63 Puskesmas Sungai Tabuk 3
 - 64 Puskesmas Telaga Bauntung
 - 65 Puskesmas Tatah Makmur
-

2. Hasil Pengukuran

Sebelum mengetahui hasil penilaian responden terhadap 9 unsur pelayanan yang telah ditentukan tersebut diatas, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik responden itu sendiri, yang bisa dilihat dari 4 faktor, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Hal ini berkaitan erat dengan cara mereka membuat keputusan dalam melakukan penilaian terhadap pelayanan yang mereka terima

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik, memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan
- 8) Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan Pelayanan
- 9) Sarana dan Prasarana

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang “ masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata- rata (NRR) tertimbang dengan rumus :

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$IKM \text{ NUnit Pelayanan} \times 25$$

Kategorisasi Mutu Pelayanan :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

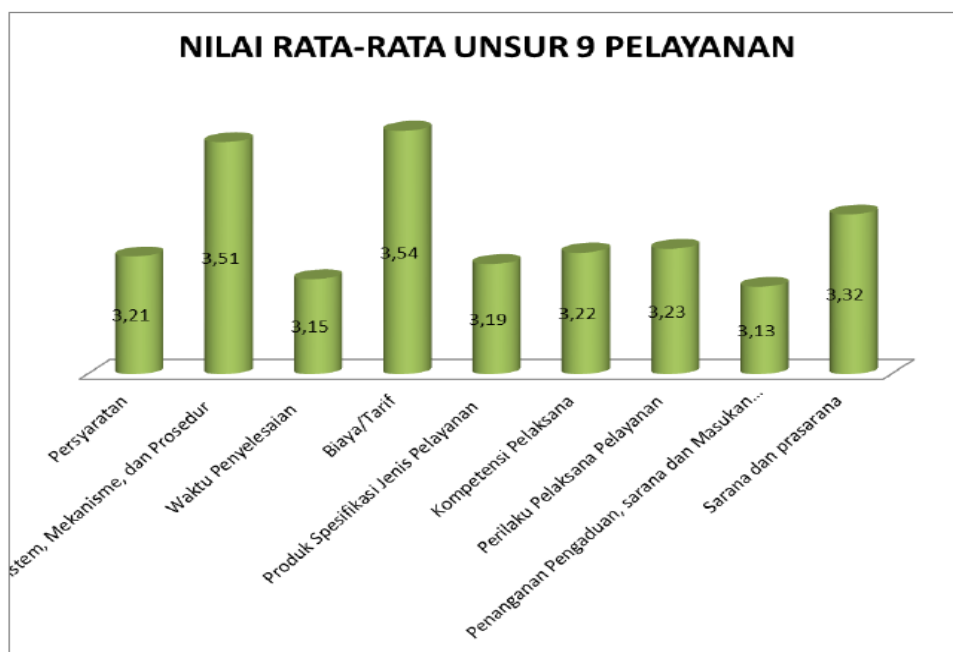
Sumber : Biro Organisasi Kabupaten Banjar

Nilai Rata-rata (NRR) Unsur 9 Pelayanan :

1.	Persyaratan	3,21
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,51
3.	Waktu Penyelesaian	3,15
4.	Biaya/Tarif	3,54
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,19
6.	Kompetensi Pelaksana	3,22
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,23
8.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan Pelayanan	3,13
9.	Sarana dan prasarana	3,32

Sumber : Biro Organisasi Kabupaten Banjar

Gambar 3. 57. Nilai Rata-Rata Unsur 9 Pelayanan



Sumber : Biro Organissi Kabupaten Banjar

Maka untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(3,21 \times 0,11111) + (3,51 \times 0,11111) + (3,15 \times 0,11111) + (3,54 \times 0,11111) + (3,19 \times 0,11111) + (3,22 \times 0,11111) + (3,23 \times 0,11111) + (3,13 \times 0,11111) + (3,32 \times 0,11111) = 3,28$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan di (Nama SKPD/Unit Kerja Pelayanan Publik) Kabupaten Banjar hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai indeks x Nilai Dasar

$3,28 \times 25 = 81,96$

- b. Mutu Pelayanan adalah BAIK
- c. Kinerja Unit Pelayanan BAIK

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjar Target di Tahun 2019 sebesar 81,9 adapun realisasi sebesar 81,96 dan capain sebesar 100,07%. Apabila dibanding dengan target akhir RPJMD maka capaian tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD sudah mencapai 99,83 persen.

Faktor Pendorong :

- 1) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjar selalu melaksanakan sosialisasi survey kepuasan masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

8. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah** merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, indikator – indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah :

a. Opini BPK (Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan)

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah salah satunya diukur dengan Opini BPK (Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan).

Capaian kinerja yang diukur dengan indikator sasaran pada tahun 2019 dapat memenuhi target yang direncanakan, yaitu Opini WTP dapat berhasil dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% (Berhasil)

Faktor Pendorong :

- 1. Memenuhi indikator keberhasilan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual,
- 2. Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan,
- 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset

Upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran kinerja agar dapat dijadikan dasar sistem reward dan punishment.
2. Meningkatkan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan bahwa perencanaan didahului dengan merencanakan kinerja (hasil), baru kemudian merencanakan kebutuhan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama dengan penganggarnya.
3. Mengimplementasikan/memanfaatkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta penilaian dan peningkatan kinerja.

b. Jumlah pendapatan asli daerah (Rp.)

Merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Diukur melalui beberapa indikator yaitu : **Jumlah pendapatan asli daerah (Rp.)**

Pendapatan Asli Daerah (*Original Local Government Revenue*) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya.[2] PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Hasil evaluasi capaian indikator ini tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 59. Realisasi Indikator Tahun 2019

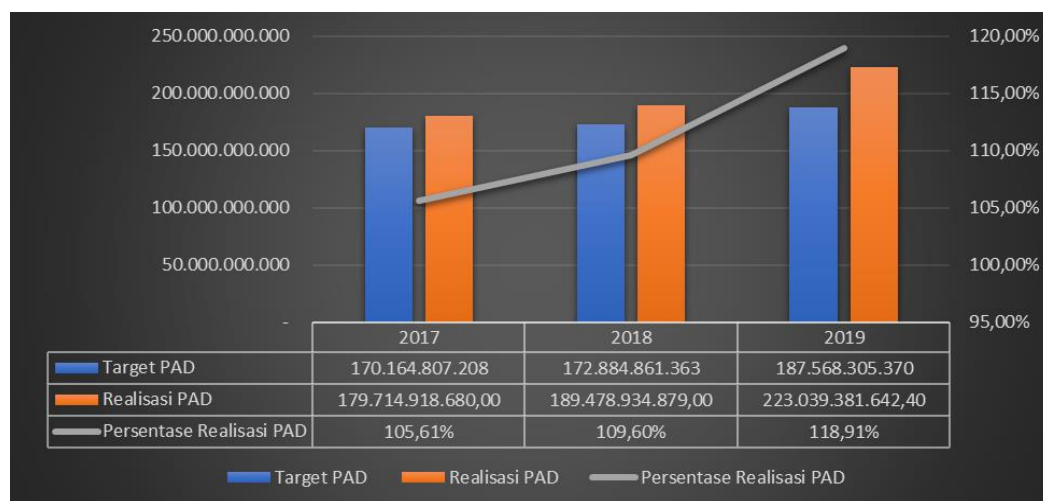
Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	187.568.305.370,00	223.039.381.642,40	120,56

Sumber : Pengolahan Data

PAD Kabupaten banjar tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 223.039.381.642,4 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 187.568.305.370 atau dengan capaian 120,56 persen dengan kriteria berhasil. Dibandingkan dengan target pendapatan akhir periode RPJMD sebesar Rp. 192.000.000.000,00 maka capaian pada tahun 2019 ini telah melampaui target dengan capaian 116,17 persen.

Dibanding tahun sebelumnya, realisasi PAD konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PAD dapat direalisasikan sebesar 179,7 milyar atau 105,61 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2018 PAD dapat ditingkatkan menjadi 172,88 milyar atau meningkat sebesar Rp.9,76milyar atau 109,60 dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 terus konsisten mengalami penambahan PAD sebesar Rp. 33,56 milyar menjadi Rp. 223,04 Milyar atau sebesar 17,91 persen dari target yang ditetapkan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 3. 58. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Banjar Tahun 2017 – 2019



sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah Kembali

Pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah secara aturan sudah ditegaskan bagian mana saja yang boleh dikenakan pungutan dan bagian mana yang tidak boleh, sehingga daerah ada keterbatasan terhadap jumlah pungutan yang bisa dilakukannya. Batasan tersebut tentunya membatasi gerak daerah untuk mengembangkan potensinya terhadap pungutan lain yang lebih potensial, akan tetapi selama aturannya belum berubah maka pungutan yang tidak ada diaturan dianggap ilegal dan melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi.

Berangkat dari hal tersebut daerah hanya mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada dalam artian memaksimalkan penerimaan dari sektor yang sesuai ketentuan tanpa bisa meningkatkan potensi lainnya yang diluar ketentuan pemerintah pusat. Begitu pula terhadap objek dan wajib pajak dikarenakan pajak merupakan kewajiban seseorang untuk melaporkan harta dan usaha yang dimilikinya, daerah hanya melakukan pengawasan dan penyisiran jikalau ada objek pajak dan wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dibatasi pada 11 item Pajak Daerah dan 3 retribusi daerah. Padahal item tersebut merupakan lahan potensial untuk menggali pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka daerah menyusun Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang pajak daerah yaitu menetapkan 11 pajak daerah, Sedangkan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Daerah nomor 6, 7 dan 8 tahun 2011

Untuk bagi hasil laba perusahaan daerah terdiri dari :

1. Perusahaan Daerah
 - PD. Baramarta
 - PD. PBB (Pasar Bauntung Batuah)
 - PD. BIM (Barakat Intan Mandiri)
2. BUMD
 - Bank Kalsel
 - BPR (Bank Pembangunan Rakyat)

Sedangkan lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
2. Penerimaan Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga Deposito
4. Tuntutan Ganti Rugi

5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan PK
6. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
7. Pendapatan Denda Pajak
8. Pendapatan dari Pengembalian
9. Pendapatan Denda Pelanggaran Perda
10. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
11. Pendapatan dari Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Rs. Raza)
12. Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
13. Pendapatan dari Kontribusi Investasi Pembangunan

Perkembangan realisasi komponen PAD Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 60. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019

Pendapatan Asli Daerah	2017	2018	2019
Pajak Daerah	66.632.374.971	2.021.842.947	80.830.944.474,86
Retribusi	7.183.346.364	4.189.906.671	6.445.233.089,00
Bagi hasil laba perusahaan daerah	6.787.200.322	8.478.950.429	2.445.796.650,00
Lain Lain PAD yang Sah	99.111.997.023	104.788.234.832	133.317.407.428,54

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah Kembali

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak

No.	Tempat Penyuluhan	Sasaran Penyuluhan
1.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak parkir
2.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak air tanah
3.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak reklame
4.	Kecamatan Pengaron	Wajib pajak restoran/rumah makan dan wajib pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
5.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak restoran/katering bagi bendahara SKPD
6.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak restoran/katering bagi bendahara kecamatan
7.	Kecamatan Sungai Pinang	Wajib pajak restoran/rumah makan

No.	Tempat Penyuluhan	Sasaran Penyuluhan
		dan wajib pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
8.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak SPBU
9.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak reklame vendor/biro jasa reklame
10.	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	Wajib pajak restoran/rumah makan dan wajib pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
11.	Kecamatan Astambul	Wajib pajak restoran/katering dan wajib pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
12.	Kecamatan Tatah Makmur	Wajib pajak restoran/katering
13.	Kecamatan Aluh-Aluh	Wajib pajak restoran/katering dan wajib pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
14.	Aula Badan Pendapatan Daerah	Wajib pajak restoran/katering

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah Kembali

- Melakukan pengawasan pajak daerah yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan PR serta Dinas Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kegiatan pengawasan itu dilaksanakan pada :

No.	Sasaran Pengawasan	Lokasi Pengawasan
1.	Wajib pajak Reklame	Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar
2.	Wajib pajak MBLB	Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan
3.	Wajib pajak sarang burung walet	Kecamatan Aluh-Aluh
4.	Wajib pajak restoran	Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar
5.	Wajib pajak hotel	Trisakti, Kecamatan Kertak Hanyar
6.	Wajib pajak parkir	Pasar Martapura
7.	Wajib pajak air tanah	RSU Sambang Lihum, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar
8.	Wajib pajak hiburan	Stadion Demang Lehman, Kecamatan Martapura Kota

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah Kembali

3. Melakukan pemutakhiran data PBB dan BPHTB
4. Koordinasi yang terus terjalin dengan SKPD pengelola distribusi dan Perusahaan Daerah terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran :

- a. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini disebabkan :
 1. Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan mekanisme perhitungan pajak masih rendah;
 2. Adanya potensi pajak yang masih bisa digali;
Adanya wajib pajak yang belum taat membayar pajak sesuai ketentuan;
- b. Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat tidak akurat, yaitu :
 1. Data PBB belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 2. Masyarakat tidak mengetahui besaran pajak PBB yang terhutang;
- c. Harga jual tanah transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT), disebabkan :
 1. Tidak adanya lokasi yang mengacu pada Zona Nilai Tanah;
 2. Adanya penambahan wajib pajak setiap tahun;
- d. Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik, seperti :
 1. Masih adanya potensi retribusi daerah yang belum terdata oleh SKPD pemungut;
 2. Adanya perubahan kebijakan regulasi retribusi daerah;
 3. Perlunya data penilaian dan penetapan target retribusi daerah sebagai acuan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik, yaitu seperti :
 1. Kurang terbukanya dana terkait pendapatan dari perusahaan daerah dan BUMD;
 2. Perubahan data dan informasi terkait penyaluran dan serapan dana transfer tergantung keaktifan daerah;

3. Sumber data pendapatan daerah dipegang oleh beberapa instansi.

Upaya perbaikan :

1. Menggali potensi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi;
2. Mempermudah dan memperjelas alur pelayanan pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi;
3. Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga ahli perpajakan di tiap SKPD;
4. Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling dan BPN;
5. Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
6. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung oleh Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui sosialisasi dan uji petik;
8. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran PDRD;
9. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada;
10. Melaksanakan sosialisasi PDRD kepada wajib PDRD sampai ke tingkat desa/kelurahan;
11. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan.

c. Nilai/Skor EKPPD

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah diukur dari Nilai/Skor EKPPD

EKPPD adalah mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Capaian Nilai/skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019 adalah 99,34% didapat dari realisasi sebesar 3,1589 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 3,1800. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun

2019 telah menyumbang sebesar 98,72% dari target 3,200 pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 99,34% masuk dalam capaian kategori Cukup Berhasil.

Indikator Kinerja Utama Nilai/Skor EKPPD dilaksanakan pada Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan kegiatan koordinasi Penyusunan LPPD dan EKPPD.

Faktor Kegagalan

Adapun faktor yang menghambat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu :

- 1) Adanya inkonsistensi antara data pada awal penyusunan LPPD dengan hasil EKPPD;
- 2) Perbedaan pandangan dalam memahami Indikator Kinerja Kunci (IKK) antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Pedoman Penyusunan LPPD;
- 3) Sulitnya menyamakan data dukung antar satu SKPD dengan SKPD lain seperti data dukung seluruh PNS di Kabupaten Banjar tahun 2018, dimana hingga batas akhir EKPPD data tersebut baru berhasil disamakan;
- 4) Terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten yang belum dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten seperti survey kepuasan masyarakat (SKM) SKPD yang tidak memberikan pelayanan publik;
- 5) Terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten; dan
- 6) Kurangnya kuantitas rapat ataupun asistensi antara Tim LPPD dengan SKPD dikarenakan anggaran yang terbatas.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

1. Perlu adanya sinergitas yang lebih baik antar SKPD di Kabupaten Banjar;
2. Agar Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dimasukkan menjadi salah satu target dalam Renstra;
3. Perlu ditingkatkan kuantitas rapat ataupun asistensi pada saat penyusunan LPPD, dalam hal ini diperlukan dukungan pendanaan.
4. Agar setiap triwulan diadakan monitoring dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing SKPD,

sehingga LPPD bukan hanya kegiatan yang dilakukan satu waktu saja.

Upaya perbaikan :

Adapun upaya yang dapat dilakukan pada tahun 2020 yaitu :

1. Pada akhir tahun 2019 telah dilakukan Bimbingan Teknis untuk persiapan penyusunan LPPD 2020;
2. Permintaan data dukung dasar telah dilakukan pada akhir tahun 2019, sehingga persiapan penyusunan data dukung dapat lebih matang;
3. Setiap bulan akan dilakukan asistensi secara terjadwal, sehingga makna indikator kinerja kunci (IKK) dapat disamakan;
4. Membangun komunikasi yang intens dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKP.

Indikator kinerja sasaran Nilai/Skor EKPPD merupakan indikator kinerja sasaran yang baru dimunculkan pada renstra perubahan 2016- 2021 sehingga tidak ada perbandingan realisasi kinerja di tahun sebelumnya

Tindak lanjut yang akan datang :

Adapun tindak lanjut yang telah dipersiapkan agar target dapat tercapai yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD;
2. Melakukan review capaian kinerja yang terdapat dalam indikator kinerja kunci (IKK) per triwulan, sehingga capaian kinerja per urusan dapat lebih terawasi;
3. Meningkatkan intensitas rapat ataupun asistensi dalam rangka menyamakan persepsi terkait makna Indikator Kinerja Kunci (IKK);
4. Peningkatan wawasan ataupun study referensi penyusunan LPPD ke pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten/kota yang berhasil memperoleh skor EKPPD yang terbaik.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 94.65% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per indikator tujuan, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di indikator tujuan Tingkat Persentase penurunan Angka Kemiskinan (97.09%). Sedangkan

penyerapan terkecil pada program/kegiatan di indikator tujuan Indeks Risiko Bencana (82.76%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana tujuan dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai indikator tujuan, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh indikator tujuan menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Terdapat indikator kinerja yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, contohnya Angka Kriminalitas, untuk indikator tujuan semacam ini perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji kembali indikator tujuan dan target tujuan berdasarkan kemampuan input daerah serta seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 61. Pencapaian Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas	10,17	11,74	84,55	16.377.735.972	14.901.450.407	90,99
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,32	68,94	100,91	213.106.196.846	201.015.608.505	94,33

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
3	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,50%	1,39%	107,33	5.661.904.000	5.278.114.502	93,22
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,92%	3,01%	96,92	1.397.286.680	1.292.509.739	92,50
5	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan	2,66%	2,72%	97,74	4.738.616.784	4.600.588.580	97,09
6	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	164	176,4	92,44	5.777.810.000	4.781.851.550	82,76
7	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	5,31%	5,18%	97,55	47.971.778.939	43.995.803.601	91,71
8	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Gini	0,34	0,33	102,94			
9	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi	3,80%	2,63%	130,79			
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,7	72,36	103,82	3.164.022.000	3.000.955.343	94,85
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	73,67%	76,27%	103,53	153.461.410.217	146.196.522.487	95,27
12	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	70,493%	95,250%	135,12	92.420.818.600	87.944.639.490	95,16
13	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	73,00	72,71	99,60	273.199.566.757	260.582.704.579	95,38

Sumber : Pengolahan Data

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat hanya 5 dari 13 indikator tujuan menunjukkan pencapaian lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Indikator tujuan yang berhasil

dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 62. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (rupiah)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	213.106.196.846	201.015.608.505	94,33	12.090.588.341	5,67
2	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	5.661.904.000	5.278.114.502	93,22	383.789.498	6,78
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	3.164.022.000	3.000.955.343	94,85	163.066.657	5,15
4	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	153.461.410.217	146.196.522.487	95,27	7.264.887.730	4,73
5	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	92.420.818.600	87.944.639.490	95,16	4.476.179.110	4,84

Sumber : Pengolahan Data

BAB 4 PENUTUP

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Pemkab Banjar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar dan bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD.

Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kinerjanya :

- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator Angka kriminalitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kesehatan reproduksi dengan indikator Tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial dengan indikator Persentase penduduk miskin /

tingkat kemiskinan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.

- Hasil pencapaian kinerja utama Menurunnya risiko bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kinerja Indeks Gini menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kinerja Laju Inflasi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator Persentase konektivitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kelayakhunian dengan indikator Persentase pemukiman layak huni menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Ada beberapa sasaran indikator kinerja yang tren pencapaiannya belum memenuhi target kinerjanya, yaitu :

- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Menurunnya tingkat pengangguran menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.

- Hasil pencapaian kinerja utama Menurunnya risiko bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian tujuan dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab 3 dan terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2019, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya serta pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link webmonev untuk pelaporan kinerja triwulanan yang bisa diakses publik adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang. Peran Pemerintah Kabupaten Banjar diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berbagai unsur baik instansi/organisasi pemerintah lainnya di wilayah Kabupaten Banjar,

daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif, adaptif dan iklim investasi yang kondusif, perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan dan terciptanya ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. (0511) 4772500 Martapura Kode Pos 70613
KALIMANTAN SELATAN
www.inspektoratbanjar.blogspot.com; email : inspektoratbanjar@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja mejadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banjar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Martapura, 16 April 2020

Inspektur Kabupaten Banjar,



Kencana Wati, S.Hut, ME
NIP.19731015 200003 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KHALILURRAHMAN
Jabatan : BUPATI BANJAR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target yang menjadi bagian kinerja rencana jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Martapura, 29 Januari 2019

↳ Bupati Banjar, ✕


H. KHALILURRAHMAN ✕

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KABUPATEN BANJAR**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th. 2019
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas	Skor	10,17
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,32
3	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,50
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,92
5	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan	Persen	2,66
6	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	164
7	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,31
8	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Gini	Indeks	0,34
9	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi	Persen	3,80
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,70
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	Persen	73,67
12	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	Persen	70,49
13	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	73,00

No.	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 90.266.498.168,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 27.778.531.859,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 1.036.070.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 5.827.680.450,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 3.789.011.110,00
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 6.683.275.333,00
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 92.582.961.529,00

No.	Program	Anggaran
8	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 12.366.264.400,00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 4.822.013.700,00
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 889.899.900,00
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 7.132.348.190,00
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 23.432.392.100,00
13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 813.272.500,00
14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 422.100.000,00
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 1.558.751.600,00
16	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rp. 10.454.337.160,00
17	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp. 3.280.638.950,00
18	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Rp. 12.897.100.300,00
19	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 3.858.612.450,00
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp. 387.241.400,00
21	Program Kesehatan Keluarga	Rp. 4.062.982.000,00
22	Program Upaya Kesehatan Tradisional	Rp. 42.000.000,00
23	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 7.756.647.000,00
24	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Rp. 1.752.580.000,00
25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp. 61.995.000,00
26	Program Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa	Rp. 10.289.399.000,00
27	Program Penanganan Jaringan Perairan	Rp. 5.796.827.000,00
28	Program Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku	Rp. 175.000.000,00
29	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Rp. 1.324.300.000,00
30	Program Penanganan Drainase	Rp. 4.639.583.354,00
31	Program Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp. 392.936.920,00
32	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Rp. 259.829.080,00
33	Program Penerbitan Ijin Usaha jasa Konstruksi Nasional	Rp. 182.983.000,00
34	Program Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	Rp. 138.799.000,00
35	Program Penanganan Jalan Kabupaten	Rp. 49.316.142.520,00
36	Program Penanganan Jembatan Kabupaten	Rp. 10.547.820.160,00

No.	Program	Anggaran
37	Penanganan Jalan Poros Desa	Rp. 67.951.681.160,00
38	Program Penanganan Jembatan Desa	Rp. 7.933.518.120,00
39	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan	Rp. 670.400.000,00
40	Program Perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang	Rp. 1.123.125.000,00
41	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Rp. 9.130.210.904,00
42	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Rp. 11.008.572.000,00
43	Program Penataan Bangunan Dan Tata Lingkungan	Rp. 1.317836.000,00
44	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Rp. 7.206.635.920,00
45	Program Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang	Rp. 624.537.142,00
46	Program Pengendalian dan Pengawasan Bangunan	Rp. 871.692.160,00
47	Program Penanganan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp. 10.622.228.000,00
48	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Rp. 312.481.960
49	Program Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 261.935.000,00
50	Program Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Perumahan	Rp. 1.142.158.940,00
51	Program Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman	Rp. 1.141.231.620,00
52	Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 1.106.865.620,00
53	Program Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Rp. 425.000.000,00
54	Program Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	Rp. 260.500.000,00
55	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Rp. 14.237.123.820,00
56	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 1.201.950.000,00
57	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 195.801.640,00
58	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 188.603.840,00
59	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp. 625.482.900,00
60	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 759.065.595,00
61	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 452.172.050,00
62	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 1.015.601.000,00
63	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 1.611.578.000,00
64	Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal	Rp. 134.050.000,00
65	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Rp. 687.380.000,00

No.	Program	Anggaran
66	Program pencegahan Dini bahaya kebakaran	Rp. 151.065.850,00
67	Program peningkatan kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran	Rp. 606.420.000,00
68	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 1.277.770.000,00
69	Program Pasca Bencana	Rp. 396.480.000,00
70	Program Tanggap Darurat	Rp. 2.378.000.000,00
71	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	Rp. 506.350.000,00
72	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 920.682.700,00
73	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.338.773.132,00
74	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp. 208.345.000,00
75	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp. 116.732.000,00
76	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp. 221.660.000,00
77	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 927.937.152,00
78	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 682.917.240,00
79	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 388.320.440,00
80	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 353.108.920,00
81	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Rp. 391.965.000,00
82	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 325.820.000,00
83	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 1.610.690.000,00
84	Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Rp. 545.000.000,00
85	Program Penatausahaan Pertanahan	Rp. 737.700.000,00
86	Program Pengaturan Bidang Pertanahan	Rp. 100.000.000,00
87	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 3.450.857.500,00
88	Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau	Rp. 450.500.000,00
89	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Rp. 611.061.000,00
90	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 325.000.000,00
91	Program Penataan Sda, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Rp. 325.191.300,00
92	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Rp. 540.249.500,00
93	Program Pembinaan & Penataan Di Bidang Lingkungan	Rp. 524.801.200,00


No.	Program	Anggaran
94	Program Pengelolaan Sampah	Rp. 9.697.273.700,00
95	Program Pengelolaan Sampah (BLUD)	Rp. 6.986.496.000,00
96	Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup	Rp. 582.919.000,00
97	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.709.015.000,00
98	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 1.082.164.860,00
99	Program Pelayanan dan penataan administrasi Pendaftaran Penduduk	Rp. 419.178.800,00
100	Program Pelayanan dan penataan administrasi Pencatatan sipil	Rp. 672.313.640,00
101	Program Pengelolaan Pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Rp. 307.052.000,00
102	Program Pembinaan bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa	Rp. 1.820.766.930,00
103	Program Pembinaan bidang kewilayahan desa	Rp. 859.513.250,00
104	Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa	Rp. 1.390.179.500,00
105	Program Keluarga Berencana	Rp. 5.554.006.000,00
106	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. 107.898.000,00
107	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 2.366.820.000,00
108	Program Pemenuhan Prasarana Perhubungan	Rp. 230.850.000,00
109	Program Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Rp. 318.605.000,00
110	Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Rp. 944.900.000,00
111	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 313.930.000,00
112	Program Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas	Rp. 678.910.000,00
113	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Rp. 5.825.000.012,00
114	Program Pengamanan Informasi	Rp. 329.200.000,00
115	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 6.019.350.000,00
116	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp. 93.600.000,00
117	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 1.079.130.000,00
118	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 279.600.000,00
119	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 503.593.000,00
120	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Rp. 315.000.000,00
121	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 291.896.000,00
122	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 1.065.992.160,00

No.	Program	Anggaran
123	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp. 841.114.602,00
124	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp. 1.148.678.300,00
125	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp. 1.359.441.436,00
126	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp. 82.302.340,00
127	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 545.400.000,00
128	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 1.106.659.000,00
129	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 582.987.340,00
130	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 200.000.000,00
131	Program Pengelolaan Informasi Budaya	Rp. 70.600.000,00
132	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rp. 47.500.000,00
133	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp. 469.950.000,00
134	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rp. 35.955.000,00
135	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp. 93.225.000,00
136	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp. 1.489.154.000,00
137	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp. 149.500.000,00
138	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp. 235.650.000,00
139	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan, Pengendalian dan penegakan hukum Sumberdaya Perikanan	Rp. 56.390.000,00
140	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.519.736.500,00
141	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 3.093.102.500,00
142	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 370.089.200,00
143	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp. 886.326.980,00
144	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp. 246.649.600,00
145	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian	Rp. 6.536.756.980,00
146	Program Peningkatan Penyuluh Pertanian	Rp. 2.185.590.360,00
147	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 115.746.880,00
148	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp. 147.090.000,00
149	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp. 902.041.500,00
150	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp. 367.728.880,00
151	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp. 228.558.680,00

No.	Program	Anggaran
152	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp. 1.507.646.600,00
153	Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/ Perkebunan Lapangan	Rp. 531.600.000,00
154	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 764.456.000,00
155	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 270.000.000,00
156	Program Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan	Rp. 3.387.442.500,00
157	Program Bina usaha dan pelaku distribusi	Rp. 261.000.000,00
158	Peningkatan pemasaran produk dalam negeri	Rp. 699.500.000,00
159	Program Pengendalian perdagangan dalam negeri	Rp. 250.000.000,00
160	Program Penataan Struktur Industri	Rp. 35.750.000,00
161	Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA	Rp. 1.842.294.700,00
162	Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM	Rp. 914.050.000,00
163	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 31.898.925.000,00
164	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 5.613.637.200,00
165	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.134.797.800,00
166	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Rp. 768.578.160,00
167	Program Peningkatan pengelolaan lembaga zakat	Rp. 92.306.000,00
168	Program Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian dan Invesatasi Daerah	Rp. 1.204.131.200,00
169	Program Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.545.271.300,00
170	Program Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	Rp. 2.620.841.640,00
171	Program penegasan batas daerah	Rp. 407.002.000,00
172	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Rp. 26.745.120.252,00
173	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.876.500.000,00
174	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 502.050.000,00
175	Program Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 213.750.000,00
176	Program pencegahan dan pemberantasan korupsi	Rp. 936.152.000,00
177	Program Kerjasama Pembangunan	Rp. 56.526.600,00
178	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 517.806.700,00
179	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.001.912.050,00

No.	Program	Anggaran
180	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.132.472.240,00
181	Program Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan	Rp. 2.088.000.000,00
182	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp. 1.443.183.380,00
183	Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 796.949.500,00
184	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.375.740.100,00
185	Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Rp. 3.286.744.700,00
186	Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Rp. 1.445.208.995,00
187	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Rp. 3.282.990.000,00
188	Program Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Penghapusan Aset Daerah	Rp. 1.689.960.000,00
189	Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	Rp. 962.035.700,00
190	Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 1.642.345.000,00
191	Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 432.458.800,00
192	Program Pencapaian Target Retribusi Daerah	Rp. 613.436.900,00
193	Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Rp. 617.335.100,00
194	Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Rp. 213.382.900,00
195	Program Penataan Aparatur	Rp. 1.254.441.600,00
196	Program Pengembangan Aparatur	Rp. 658.192.000,00
197	Program Pembinaan Aparatur	Rp. 252.046.800,00
198	Program Disiplin Aparatur	Rp. 276.813.400,00
199	Program Kesejahteraan Aparatur	Rp. 310.920.000,00
200	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp. 1.479.775.100,00
201	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	Rp. 3.590.997.500,00

Martapura, 29 Januari 2019
Bupati Banjar,


H. KHALILURRAHMAN ✓



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

- a. IKU;
- b. Penetapan IKU;
- c. Penggunaan IKU; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III
IKU

Pasal 3

- (1) IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Satuan Kerja Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*);
- (4) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PENGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Januari 2019

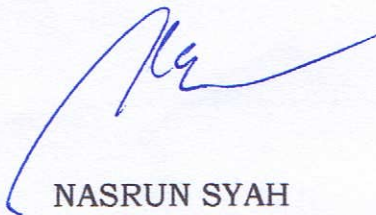
BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,



NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 6 TAHUN 2019
 TANGGAL : 28 JANUARI 2019

FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Angka kriminalitas yang tertangani}}{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000}} \times 10.000$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Pendidikan 4. Satpol PP 5. Dinas Pemuda Dan Olahraga 6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pertumbuhan Penduduk 	$IPM = \sqrt[3]{I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran}}$ $\text{Pertumbuhan Penduduk} = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$ <p> P_t = Jumlah Penduduk pada Tahun t P_0 = Jumlah Penduduk pada Tahun dasar t = Periode Waktu antara Tahun Dasar dan Tahun T (dalam tahun) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 4. Dinas Kesehatan 5. RSUD Ratu Zalecha 6. Dinas Ketahanan Pangan 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 8. Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>jumlah pengangguran terbuka adalah usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100 %</p> $\frac{\text{Tingkat pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan	<p>1. R = H x V (E)/C "R : Risk (Risiko), Pengertian risiko: (1) Risiko adalah peluang untuk rugi. (2) Risiko adalah kemungkinan kehilangan. (3) Risiko adalah ketidakpastian (uncertainty). (4) Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan, Bencana (Disaster)" V : Vulnerability (kerentanan) E : Elemen berisiko C : Capacity (kapasitas) kemampuan masyarakat mengatasi bencana</p> <p>Percentase Penduduk Miskin = $\frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$</p>	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	<p>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Jika suatu kejadian sudah terjadi dan kejadian tersebut mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu dinyatakan sebagai BENCANA, bukan risiko mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu</p>	

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi 2. Indeks Gini 3. Laju inflasi	<p style="text-align: center;">FORMULASI</p> <p>Pertumbuhan PDRB</p> $\frac{PDRB_{t+1} - PDRB_t}{PDRB_t} \times 100\%$ <p>Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p> <p>Indeks Gini</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau penghasilan sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p> $[(1 + \Delta inf_1)(1 + \Delta inf_2) \dots (1 + \Delta inf_n)]^{1/n} - 1$ <p>Dimana : Δinf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan Δinf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta inf = \frac{\ln inf_{t+1} - \ln inf_t}{\ln inf_t} \times 100\%$ <p>Dimana : inf_n = nilai inflasi pada tahun n inf_{t+1} = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...</p>	1. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3. Dinas Petermakan Dan Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 6. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 7. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	<p>Formulasi Indeks LH</p> $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Keterangan: IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Nilai relatif = $\frac{C_i}{L_i}$</p> <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_i)_{Maksimum}^2}{2}}$ <p> $0 \leq P_I \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < P_I \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < P_I \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $P_I > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p> <p>Peningkatan Kualitas Udara</p> <p>Indeks</p> <p>Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Indeks</p> $IKU = 100 - [50/0.9 \times (Icu - 0.1)]$ <p> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>	1. Dinas Lingkungan Hidup
8.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	<p>persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan ditambah persentase sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan
9.	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	<p>penjumlahan persentase bobot dari komponen pemukiman layak huni yaitu 40% cakupan rumah layak huni ditambah 30% lingkungan pemukiman yang nyaman ditambah 30% pemanfaatan tata ruang dan bangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Dan Permukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Satpol PP

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	<p>Akumulasi penilaian program-program reformasi birokrasi sebagai komponen pengungkit dengan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.</p> <p>Komponen pengungkit terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penataan Dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen Sdm 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>Komponen Hasil terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn 3. Kualitas Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 6. Pemerintah Desa 7. Kecamatan 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 9. Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) 10. Dinas Perpuustakaan Dan Kearsipan 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 12. Satpol PP 13. Dinas Pertanahan 14. Rsud Ratu Zalecha 15. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 16. Dinas Pendapatn 17. Sekretariat Daerah 18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN